



Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.Si.
Prof. Dr. A.Nuzul, S.H., M.Hum.

ISLAM & KETAHANAN PANGAN



Editor
Jumriani, S.Sos., M.Si.

trust
media
publishing

ISLAM *&*
KETAHANAN
PANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.Si.
Prof. Dr. A.Nuzul, S.H., M.Hum.**

ISLAM & KETAHANAN PANGAN

**Editor
Jumriani, S.Sos., M.Si.**



Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.
Prof. Dr. A.Nuzul, S.H., M.Hum.

ISLAM & KETAHANAN PANGAN

Yogyakarta: 2021

xviii + 216 hal., 16 x 23,5 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit

Penulis : Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.
Prof. Dr. A.Nuzul, S.H., M.Hum.

Editor : Jumriani, S.Sos., M.Si.

Desain Cover : TrustMedia

Cetakan I : 25 Mei 2021

ISBN : 978-602-5599-44-6

Penerbit : **TrustMedia Publishing**
Jl. Cendrawasih No. 3
Maguwo-Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp. +62 274 4539208, +62 81328230858.
e-mail: penerbittrustmedia@gmail.com

Motto:

وفوق كل ذي علم عليم

“Dan di atas orang yang berilmu, ada orang lain yang lebih ‘alim” (QS. Yusuf [12]: 76).

KATA PENGANTAR PENULIS



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan taufiq dan hidayat-Nya sehingga buku “Islam & Ketahanan Pangan” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kemudian shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan selama enam bulan pada tahun 2020 dengan judul “Konstruksi Sosial Keagamaan atas Penguatan Ketahanan Pangan di Daerah (Studi tentang Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kawasan Bosowasi).” Karena penelitian tersebut dibiayai melalui BOPTN 2020, maka memiliki beberapa target luaran yang wajib dilaksanakan. Salah satunya, yaitu menerbitkannya dalam bentuk buku teks dengan ISBN, dan judulnya direkomendasikan supaya berbeda dengan judul penelitiannya karena format dan sistematikan penulisan keduanya juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut atas dorongan pemikiran bahwa pangan itu merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner, akan tetapi dalam upaya penguatan yang dilakukan belum melibatkan realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat sebagai dasar utama, padahal hal tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di daerah. Karena itu, pelibatan sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di daerah penting untuk dilakukan dengan alasan, yaitu: (1) penguatan ketahanan pangan rumah tangga harus dilakukan secara sosial keagamaan karena di Kawasan Bosowasi sangat kental nuansa sosial keagamaannya dalam melakukan suatu kegiatan, (2) pangan merupakan kebutuhan masyarakat banyak karena itu perlu pelibatan sosial keagamaan (3)

perlu perubahan main set masyarakat dari perilaku memberatas lingkungan pangan menjadi bersahabat dengan lingkungan.

Berdasar pada argumen di atas, buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah untuk menguatkan ketahanan pangan secara sosial keagamaan melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif. Buku ini berkaitan erat dengan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi lokal tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Lebih dari itu, buku ini juga merupakan referensi penetapan kebijakan pengembangan, sistem evaluasi, dan sistem kontrol ketahanan pangan rumah tangga di daerah.

Dengan penuh kesadaran, bahwa buku “Islam & Ketahanan Pangan” ini masih perlu disempurnakan lagi, sehingga saran dan kritik untuk penyajian serta isinya sangat diperlukan.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi atas bantuannya baik berupa materi maupun non-materi dalam penulisan dan penerbitan buku ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Watampone, 25 Juni 2021

Penulis,

Syaparuddin

Andi Nuzul

ORGANISASI BUKU

Dalam rangka memahami buku ini secara komprehensif, maka organisasinya dirancang ke dalam dua bagian dan sembilan bab, dimana bagian pertama terdiri dari tiga bab dan bagian kedua terdiri dari tujuh bab. Bagian Pertama menguraikan tentang studi konseptual, yang dituangkan ke dalam tiga bab, yaitu: Bab 1.1, Bab 2.1, dan Bab 3.1. Bab 1.1 membahas tentang pengenalan Islam. Islam sering disalahpahami, jika diidentikkan dengan muslim. Islam dan muslim adalah dua istilah yang berbeda. Islam adalah agama, sedangkan muslim adalah pemeluknya. Islam sering diidentikkan dengan perilaku kaum muslim. Padahal, perilaku seorang muslim belum tentu mencerminkan ajaran Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.

Bab 2.1 membahas tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan pada mulanya, berasal dari kegelisahan dan pertanyaan apakah dunia dapat memproduksi pangan yang cukup. Pertanyaan tersebut, kemudian berkembang dan dipertegas oleh International Food Policy Research Institute menjadi dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau oleh kelompok miskin. Setelah itu awal 1990-an, pertanyaan tersebut telah jauh lebih lengkap dan kompleks, yaitu: Dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau oleh kelompok miskin serta tidak merusak lingkungan hidup.

Sedangkan Bab 3.1 membahas tentang perspektif Islam. Islam memandang bahwa kebutuhan pangan masing-masing individu menjadi sangat vital dan bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Dengan kata lain, bukan sekadar meningkatkan taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, tetapi juga aspek distribusi menjadi sangatlah penting agar terjamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagian Kedua menguraikan tentang studi faktual yang dituangkan ke dalam tujuh Bab, yaitu: Bab 1.2, Bab 2.2, Bab 3.2, Bab 4.2, Bab 5.2, Bab 6.2, dan Bab 7.2. Bab 1.2 membahas tentang overview. Bab ini menguraikan bahwa ia merupakan studi pertama membahas pelibatan sosial keagamaan dalam penguatan ketahanan pangan dalam konteks lokal dengan unit analisis rumah tangga dan belum pernah ada studi sebelumnya yang melakukannya.

Bab 2.2 membahas tentang rujukan teori. Dalam menginterpretasi data yang telah dikumpulkan digunakan teori dan atau konsep yang relevan. Teori dan atau konsep yang digunakan, diangkat dengan berpedoman pada asumsi yang ditawarkan untuk dibuktikan. Teori dan atau konsep yang digunakan untuk menginterpretasi data yang telah dikumpulkan tersebut, yaitu: Konsep struktur sosial, teori konstruksi sosial, teori perubahan sosial, konsep falah dalam Islam. Sedangkan teori dan atau konsep yang digunakan untuk menyusun mengumpulkan data, yaitu: Konsep agama dan nilai kearifan lokal, teori Planned Behavior, dan konsep ketahanan pangan.

Bab 3.2 membahas tentang lokasi penjarangan data. Penjarangan data untuk studi ini dilakukan di Kawasan Bosowasi, yakni Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai. Hal ini perlu dideskripsikan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisinya di mana ketahanan pangan rumah tangga yang menjadi obyek studi ini, berada. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah tentang sejarahnya, keadaan geografi dan demografinya, karena hal ini sangat memengaruhi karakteristik rumah tangga yang ada di dalamnya.

Bab 4.2 membahas tentang realitas sosial keagamaan. Perilaku sosial keagamaan pada lima kecamatan untuk setiap kabupaten di Kawasan Bosowasi dapat digambarkan bahwa masyarakat kawasan Bosowasi berpandangan bahwa keislaman adalah identik dengan kebugisan. Pandangan ini mensyaratkan agar setiap orang Bugis yang sudah akil baliq, haruslah menjalankan ajaran pokok agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Ajaran pokok tersebut meliputi ibadah formal yang umum, yaitu shalat lima kali sehari semalam, berpuasa pada bulan suci Ramadhan, serta membayar zakat fitrah.

Bab 5.2 membahas tentang realitas ketahanan pangan. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan

bagi ketahanan pangan masyarakat, dan hal ini menjadi pilar bagi ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumahtangganya secara berkelanjutan.

Bab 6.2 membahas tentang kontribusi sosial keagamaan. Dalam mengetahui kontribusi Realitas Sosial Keagamaan terhadap Penguatan Ketahanan Pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi dan tanpa mediasi Norma Subjektif digunakan metode Partial Least Square (PLS). PLS merupakan metode analisis dengan Structural Equation Modelling (SEM) yang berbasis varian. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Alat bantu yang digunakan berupa program aplikasi statistik Smart-PLS Versi 3.3.2 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis varian.

Sedangkan Bab 7.2 membahas tentang model penguatan. Model penguatan ketahanan pangan yang berhasil dirumuskan, yaitu model penguatan secara kolektif dan model penguatan secara individu. Model penguatan kolektif, yaitu: Model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dilakukan secara kolektif dengan mediasi norma subjektif. Sedangkan model penguatan secara mandiri, yaitu: Model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dilakukan secara mandiri tanpa mediasi norma subjektif.

Berdasar pada uraian di atas, maka organisasi buku ini dapat diringkaskan seperti pada tabel di bawah ini:

BAGIAN/BAB	TOPIK PEMBAHASAN
BAGIAN I	STUDI KONSEPTUAL
Bab 1.1	Mengenal Islam
Bab 2.1	Ketahanan Pangan
Bab 3.1	Perspektif Islam
BAGIAN II	STUDI FAKTUAL
Bab 1.2	Overview
Bab 2.2	Rujukan Teori
Bab 3.2	Lokasi Penjaringan Data
Bab 4.2	Realitas Sosial Keagamaan
Bab 5.2	Realitas Ketahanan Pangan
Bab 6.2	Kontribusi Sosial Keagamaan
Bab 7.2	Model Penguatan

DAFTAR ISI

Motto, v
Kata Pengantar, vii
Organisasi Buku, ix
Daftar Isi, xiii
Daftar Tabel & Gambar, xvii

BAGIAN I: STUDI KONSEPTUAL, 1

BAB 1.1: Mengenal Islam, 5

A. Pengertian Islam, 5

1. Pengertian Secara Harfiah, 6
2. Pengertian Menurut Bahasa, 6

B. Inti Ajaran Islam, 9

C. Perilaku Sosial dalam Islam, 11

D. Rumah Tangga dalam Islam, 14

1. Berdasarkan Ajaran Islam, 15
2. Cinta dan Kasih Sayang, 16
3. Kewajiban Suami, 17
4. Kewajiban Istri, 18

E. Kesejahteraan Sosial dalam Islam, 19

BAB 2.1: Katahanan Pangan, 23

A. Pengertian Ketahanan Pangan, 25

B. Milestones Ketahanan Pangan, 26

1. Tahun 1930–1945, 26
2. Tahun 1945-1970, 27
3. Tahun 1970-1990, 28
4. Tahun 1990-Sekarang, 29

C. Pilar Ketahanan Pangan, 31

1. Ketersediaan Pangan, 31
2. Akses Pangan, 32
3. Pemanfaatan Pangan, 33
4. Stabilitas Pangan, 33

D. Kebijakan Ketahanan Pangan, 34

E. Ukuran Ketahanan Pangan, 37

BAB 3.1: Perspektif Islam, 41

A. Ayat dan Hadits Ketahanan Pangan, 43

1. Ayat Ketahanan Pangan, 43
2. Hadits Ketahanan Pangan, 47

B. Ketahanan Pangan Nabi Yusuf, 49

C. Fikih Ketahanan Pangan, 56

D. Pangan Halalan Tayyiban, 59

1. Pengertian Halalan Tayyiban, 59
2. Kriteria Pangan Halalan Tayyiban, 60
3. Manfaat Pangan Halalan Tayyiban, 61

BAGIAN II: STUDI FAKTUAL, 67

BAB 1.2: Overview, 69

A. Sumber Motivasi Studi, 71

B. Signifikansi Pelaksanaan Studi, 74

C. Orisinilitas Studi, 75

D. Kontribusi Hasil Studi, 79

BAB 2.2: Rujukan Teori, 81

A. Konsep Struktur Sosial, 83

1. Pengertian Struktur Sosial, 83
2. Unsur-unsur Struktur Sosial, 86
3. Ciri-ciri Struktur Sosial, 87
4. Fungsi Struktur Sosial, 89
5. Bentuk-bentuk Struktur Sosial, 90

B. Teori Konstruksi Sosial, 96

1. Eksternalisasi, 100
2. Objektivasi, 100
3. Internalisas, 100

C. Teori Perubahan Sosial, 101

D. Konsep Falah Dalam Islam, 105

1. Pengertian Falah, 105
2. Falah sebagai Tujuan Hidup, 106

E. Konsep Agama Dan Kearifan Lokal, 108

1. Agama, 109
2. Kearifan Lokal, 111
3. Korelasi Agama dengan Kearifan Lokal, 112

F. Teori Planned Behavior, 114

G. Konsep Ketahanan Pangan, 116

1. Ketersediaan Pangan, 117
2. Stabilitas Ketersediaan Pangan, 117
3. Akses Pangan, 118
4. Pemanfaatan Pangan, 118

BAB 3.2: Lokasi Penjaringan Data, 121

A. Kabupaten Bone, 123

1. Sejarah, 123
2. Geografi, 124
3. Demografi, 125

B. Kabupaten Soppeng, 125

1. Sejarah, 125
2. Geografi, 127
3. Demografi, 128

C. Kabupaten Wajo, 128

1. Sejarah, 128
2. Geografi, 129
3. Demografi, 129

D. Kabupaten Sinjai, 129

1. Sejarah, 129
2. Geografi, 130
3. Demografi, 131

BAB 4.2: Realitas Sosial Keagamaan, 133

A. Realitas Kehidupan Keagamaan, 135

1. Agama, 135
2. Tempat Peribadatan, 137
3. Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, 139
4. Lembaga Pemerintahan dalam Bidang Keagamaan, 141
5. Organisasi Kemasyarakatan Islam, 143

B. Toleransi Beragama, 144

C. Perilaku Sosial Keagamaan, 146

BAB 5.2: Realitas Ketahanan Pangan, 155

A. Permasalahan Dan Potensi Pangan, 157

B. Arah Kebijakan, 159

C. Strategi Umum, 160

D. Kebijakan Ketahanan Pangan, 160

BAB 6.2: Kontribusi Sosial Keagamaan, 171

A. Konstruksi Variabe, 173

B. Konstruksi Diagram Jalur, 174

1. Outer Model, 175

2. Inner Model, 176

C. Pengujian Model, 177

1. Pengujian Outer Model, 177

2. Pengujian Inner Model, 181

BAB 7.2: Model Penguatan, 187

A. Perumusan Model, 189

B. Hasil Interpretasi, 193

1. Rumah Tangga di Kawasan Bosowasi, 194

2. Penguatan Ketahanan Pangan, 198

3. Kolektif dan Individu, 200

4. Kesejahteraan Hidup, 202

REFERENSI, 207

TENTANG PENULIS, 215

DAFTAR TABEL & GAMBAR

DAFTAR TABEL:

- Tabel 6.2.1 : Hasil Uji Validitas, 179
Tabel 6.2.2 : Hasil Uji Reliabilitas, 180
Tabel 6.2.3 : Hasil Pengujian Inner Mode, 183

DAFTAR GAMBAR:

- Gambar 2.2.1. : Teori Planned Behavior, 116
Gambar 6.2.1. : Konstruksi Diagram Jalul, 174
Gambar 6.2.2. : Output Diagram Jalur Uji Validitas (1), 178
Gambar 6.2.3. : Output Diagram Jalur Uji Validitas (2), 178
Gambar 6.2.4. : Hasil Pengujian Inner Model, 182



STUDI KONSEPTUAL

Bagian Pertama Terdiri Dari Tiga Bab

- 1. Bab 1.1 :Menenal Islam**
- 2. Bab 2.1 :Ketahanan Pangan**
- 3. Bab 3.1 :Perspektif Islam**



BAB 1.1

MENGENAL ISLAM

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Pengertian Islam
- B. Inti Ajaran Islam
- C. Perilaku Sosial dalam Islam
- D. Rumah Tangga dalam Islam
- E. Kesejahteraan Sosial dalam Islam

BAB 1.1

MENGENAL ISLAM

A. Pengertian Islam

Islam sering disalahpahami, jika diidentikkan dengan muslim. Islam dan muslim adalah dua istilah yang berbeda. Islam adalah agama, sedangkan muslim adalah pemeluknya. Islam sering diidentikkan dengan perilaku kaum muslim. Padahal, perilaku seorang muslim belum tentu mencerminkan ajaran Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.

Islam (Arab: al-Islam, artinya berserah diri kepada Tuhan) adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Swt. Dalam al-Quran, Islam disebut juga Dinullah (agama Allah). Hal ini disebutkan pada Q.S. 3 (Ali Imran) Ayat 83:

أَفْغَيِّرْ دِينَ اللَّهِ يُبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

(Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan).

Din dalam Al-Qur'an artinya agama dan hal ini disebutkan dalam QS. 3 (Ali Imran) Ayat 83, selain itu juga bisa diartikan dengan ketaatan dan hal ini disebutkan dalam QS. 16 (An-Nahl) Ayat 52, dan dapat juga diartikan dengan ibadah dan hal ini disebutkan dalam QS. 40 (Ghafir) Ayat 65. Ulasan tentang pengertian Islam menurut bahasa dan istilah, dapat disajikan seperti berikut ini:

1. Pengertian Secara Harfiyah

Islam secara harfiyah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (Salama). Pengertian Islam secara bahasa ini, dapat dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam kehidupan setelah kematian). Selain itu, Islam juga merupakan agama yang mengajarkan pemeluknya (umat Islam) untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian (Tahkim, 2016).

2. Pengertian Menurut Bahasa

Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata aslama. Jika ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, yaitu:

a. Islam berasal dari kata ‘salm’.

As-Salmu berarti damai atau kedamaian. Hal ini disebutkan dalam Q.S. 8 (Al Anfal) Ayat 61, yaitu:

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم

(Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

Kata ‘salm’ pada ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yakni Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai atau senantiasa memperjuangkan perdamaian, bukan peperangan atau konflik dan kekacauan. Hal ini diungkapkan dalam QS. 49 (Al-Hujarat) Ayat 9, yaitu:

وإن طائفتان من المؤمنين لقاتلتوا فأصلحوا بينهما فإن
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا
إن الله يحب المقسطين

(Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil).

Jika demikian adanya, maka dapat dinyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian kecuali jika mereka diperangi terlebih dahulu. Allah Swt. tidak menigizinkan umat Islam berperang kecuali jika mereka diperangi oleh musuh-musuhnya, sebagaimana yang diungkapkan dalam QS. 22 (Al-Hajj) Ayat 39, yaitu:

أذن للمذين يقتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم
لقدير

(Telah diizinkan [berperang] bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu).

b. Islam berasal dari kata 'aslama'

Aslama artinya berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada aturan Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Swt. Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta

menjauhi segala larangan-Nya. Pada QS. 4 (An-Nisa) Ayat 125 disebutkan sebagai berikut:

ومن أحسن ديننا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ولتبع ملة
إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا

(Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya).

Maknanya, jika sudah menjadi seorang muslim, maka akan diminta Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepada-Nya. Hal ini diungkapkan dalam QS. 6 (Al-An'am) Ayat 162, yaitu:

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
(Katakanlah: Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam).

c. Islam berasal dari kata istaslama–mustaslimun

Istaslama–mustaslimun artinya penyerahan total kepada Allah Swt. Kata mustaslimun diungkapkan pada QS. 37 (As-Saffat) Ayat 26, yaitu:

بل هم لليوم مستسلمون

(Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri).

Maknanya, seorang muslim diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apa pun yang dimiliki hanya kepada Allah Swt., sebagaimana yang disebutkan dalam QS. 2 (Al-Baqarah) Ayat 208, yaitu:

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

(Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu).

B. Inti Ajaran Islam

Setidaknya ada lima inti ajaran Islam yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Kelima inti ajaran tersebut, dapat disajikan seperti di bawah ini:

Pertama, bekerja keras dan menjaga persatuan. Ajaran Islam memerintahkan kepada para penganutnya untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam berkarya. Sikap malas, berleha-leha dalam berkarya harus dihindari oleh setiap muslim. Rasulullah Saw. senantiasa berdo'a agar dijauhkan dari sifat malas, penakut dan lain-lain. Doanya seperti di bawah ini (HR. Bukhari no. 6367 dan Muslim no. 2706):

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم
والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا
والممات

(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepada-Mu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian).

Kedua, menjaga persatuan, dan persaudaraan. Sesungguhnya kehadiran Islam ke muka bumi ini adalah untuk mempersatukan umat dan memberi kedamaian kepada seluruh penghuni bumi, seperti yang diungkapkan dalam QS. 3 (Ali Imran) Ayat 103, yaitu:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

(Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai).

Ketiga, menutup aurat. Aurat manusia terbagi kepada dua, yaitu: Aurat lahiriah dan aurat batiniah. Aurat lahiriah adalah bagian dari tubuh seseorang yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan haknya. Sedangkan aurat batiniah adalah keaiban yang dimiliki oleh seseorang. Islam sangat menganjurkan untuk menutup kedua aurat tersebut. Namun demikian, harus diakui, kebanyakan

dari kita baru mampu menutup aurat lahir, namun senang mengumbar aurat batin. Salah satu buktinya adalah kesenangan melakukan ghibah. Padahal, ajaran Islam sangat mengutuk sekali perbuatan ghibah, karena ia merupakan perbuatan yang membuka aurat batin seseorang di hadapan umum. Allah menggambarkan ghibah sebagai perbuatan dosa yang sangat menjijikan. Hal ini disebutkan dalam QS. 49 (Al-Hujurat) Ayat 12, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجسسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَلَتَقْوُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ

(Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan purba-sangka [kecurigaan], karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang).

Selain itu, juga disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(Tidaklah seseorang menutupi aib (aurat batiniah) orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak).

Keempat, tiada Tuhan selain Allah. Orang yang benar-benar yakin kepada Allah, ia akan menyandarkan segala perbuatannya hanya karena Allah. Sukses dan gagalnya dalam melakukan suatu perbuatan diserahkan kepada Allah. Ia tidak akan sombong ketika sukses, dan tidak akan putus asa manakala kegagalan menyimpannya. Lebih dari itu, ia sangat meyakini bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Salah satu indikator dari keyakinan seorang muslim terhadap Allah adalah kehati-hatian dalam menjalani kehidupan ini.

Kelima, mengendalikan diri. Salah satu bentuk pengendalian diri adalah menjaga akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak terhadap sesama makhluk Allah lainnya. Salah satu wujud Islam yang rahmatan lil'alamin adalah akhlak mulia. Manusia yang sempurna dalam pandangan Islam adalah manusia yang berakhlak mulia. Salah satu faktor keberhasilan dakwah Rasulullah Saw. adalah kemampuannya dalam menonjolkan kemuliaan akhlaknya, baik di hadapan para sahabat maupun di hadapan orang-orang yang memusuhinya.

Ali bin Abi Thalib Ra. mengatakan bahwa Islam itu sangat mulia, tak akan ada satu ajaran pun yang mampu menandingi kemuliaannya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib untuk membuktikannya. Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan kelima inti ajaran Islam tersebut.

C. Perilaku Sosial dalam Islam

Dalam Islam, perilaku sosial merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam segi bathiniyah diciptakan dari berbagai macam naluri, di antaranya memiliki naluri baik dan jahat. Naluri baik manusia sebagai makhluk sosial itulah yang disebut fitrah, dan naluri jahat apabila tidak dituntun dengan fitrah serta agama akan menjadi naluri yang bersifat negatif. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai naluri manusia sebagai makhluk sosial dan tujuan dari penciptaan naluri tersebut dan hal ini disebutkan dalam QS. 43 (Az-Zukhruf) Ayat 32, yaitu:

أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

(Kami telah menentukan di antara mereka keadaan hidup mereka di dunia ini, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka daripada sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mengambil manfaat dari sebagian lain).

Sejatinya daya tahan naluri manusia terhadap hal-hal jahat (negatif), ditentukan oleh tingkat kedekatan seorang hamba kepada Allah Swt. Senada dengan apa yang dikemukakan Hasyim Muzadi, bahwasanya *hablumminallah* dan *hablumminannas* adalah cerminan dari tauhid ibadah dan perilaku sosial yang akan membentuk karakter islami yang spesifik. Karena setiap manusia secara alamiah telah diperlengkapi oleh Allah Swt. instrumen-instrumen kemanusiaan yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia itu. Akan tetapi, perilaku sosial tersebut belumlah sempurna sebelum ada sentuhan tauhid dan ibadah serta nilai-nilai sosial Islam. Hal ini disebabkan, karena manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, namun juga akan hidup dalam kehidupan selanjutnya yakni hidup dalam alam *barzakh* dan alam akhirat, ungapnya.

Di lain sisi, Rasulullah Saw. telah banyak memberikan contoh dan teladan yang universal tentang perilaku sosial dalam masyarakat. Seperti ketika beliau berkumpul bersama para sahabat, ketika itu para sahabat banyak yang datang dari golongan rendah (miskin). Misalnya, Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir, Suhaib Khabab bin al-Arat. Mereka berpakaian sederhana, kusut dan jubah bulu yang tradisional. Mereka adalah sahabat setia Rasulullah Saw. dalam memperjuangkan risalah dan dakwah Islam. Dalam majelis itu juga hadir para bangsawan. Mereka melihat para sahabat dengan tatapan kurang nyaman karena akan duduk berdekatan dengan rakyat miskin yang tidak lain merupakan sahabat Rasulullah Saw. Seraya berkata kepada Rasulullah Saw., Wahai Rasulullah, bisakah kami mendapatkan majelis khusus bagi kami dan tidak bersama dengan rakyat miskin ini. Masyarakat Arab tahu dan mengenal kemuliaan kami. Utusan-utusan dari berbagai Qabilah Arab akan datang dalam majelis ini. Kami sebagai bangsawan merasa malu apabila mereka

melihat kami duduk satu majelis dengan rakyat biasa. Buatlah majelis khusus bagi kami para bangsawan, sehingga kami tidak berkumpul bersama mereka. Buat juga majelis bagi mereka sehingga mereka tidak berkumpul bersama kami. Atas dasar hal ini, maka turunlah QS. 6 (Al-An'am) Ayat 52, yaitu:

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من
شيء فتطردهم فتكون من الظالمين

(Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka. Begitu pula mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim).

Kemudian Rasulullah Saw. dengan tenang meminta sahabatnya untuk duduk lebih berdekatan lagi, merapat dengan lututnya. Beliau lalu memulai majelis dengan ucapan "Assalamu'alaikum", seakan menjawab permintaan para bangsawan Quraisy tadi.

Karena peristiwa tersebut, maka Rasulullah Saw. selalu berkumpul bersama para sahabatnya. Mereka duduk dalam satu majelis dan berdekatan dengan tidak memandang golongan rendah ataupun bangsawan. Seringkali beliau mengucap "Alhamdulillah", terpuji Allah Swt. yang menjadikan di antara umatku kelompok yang aku diperintahkan bersabar bersama mereka. Bersama kalianlah hidup dan matiku. Gembirakanlah kaum fukara muslim dengan cahaya paripurna pada hari kiamat. Mereka mendahului masuk surga sebelum orang-orang kaya setengah hari, yang ukurannya lima ratus tahun. Mereka bersenang-senang di surga sementara orang-orang kaya tengah diperiksa amalannya. Hal ini diungkapkan dalam QS. 18 (Al-Kahfi) Ayat 28, yaitu:

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولتبع هواه وكان أمره فرطا

(Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas).

Pada kisah di atas, Rasulullah Saw. mengajarkan serta memberikan teladan kepada umat Islam mengenai perilaku sosial yang harus ada dalam jiwa mereka bahwa tidak ada perbedaaan antar golongan, juga tidak saling menjatuhkan dan saling mengunjing, karena sesungguhnya Allah Swt. tidak melihat rupa, harta dan derajat seseorang, akan tetapi Allah Swt. hanya melihat hati hamba-Nya yang bertakwa.

Di sinilah letaknya bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perilaku sosial antar umat manusia. Perilaku yang bersifat menindas serta merendahkan martabat manusia hanya untuk kepentingan sebelah pihak semata, dan hal ini sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Islam mengajarkan tasammuh yang lebih universal, tidak memandang dan berpihak hanya kepada golongan tertentu namun kepada umat manusia secara keseluruhan. Ini adalah perwujudan dari hablumminannas.

D. Rumah Tangga dalam Islam

Rumah tangga adalah suatu hubungan yang dilandasi oleh pernikahan dan menimbulkan kewajiban bagi suami istri. Dalam

Islam, sebuah rumah tangga harus dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam dan didasari dengan iman dan taqwa kepada Allah Swt. Islam adalah ajaran agama yang menyeluruh dan senantiasa mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan termasuk membangun rumah tangga yang harmonis dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Sebelum memulai kehidupan sebuah rumah tangga, seorang muslim diharuskan memilih calon pasangan dan menikah berdasarkan syarat dan rukun nikah yang berlaku dalam Islam. Allah Swt. melarang hamba-Nya hidup dengan melajang, karena itu umat Islam diperintahkan untuk menikah, sebagaimana yang diungkapkan dalam QS. 24 (An-Nur) Ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ غَيْرَ غَنِيِّكُمْ فَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمًا

(Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui).

Dalam membangun sebuah rumah tangga yang islami, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu:

1. Berdasarkan Ajaran Islam

Rumah tangga dalam Islam dibangun atas kemauan untuk menyempurnakan agama dan mengikuti perintah Allah Swt., seperti yang disebutkan dalam QS. 4 (An-Nisa) Ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu).

Kehidupan rumah tangga Rasulullah Saw. merupakan contoh rumah tangga ideal dalam Islam. Beliau adalah seorang suami bagi istri-istrinya dan beliau mampu menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dengan istri-istrinya tersebut. Sebagai suami, Beliau senantiasa berperilaku lembut kepada istri-istrinya dan tidak pernah berperilaku kasar kepadanya. Tidak hanya itu, Rasulullah Saw. selalu berusaha membantu tugas istrinya di rumah, hal ini berbeda dengan kondisi saat ini dimana banyak suami yang enggan membantu istrinya dalam pekerjaan rumah.

Akhlak dan perilaku Rasulullah Saw. yang santun dan sopan meski sedang marah kepada istrinya juga harus dapat dijadikan sebagai contoh. Jika suami mencontoh pribadi Rasulullah Saw. yang demikian, maka masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak akan dialami oleh para istri. Dalam kehidupan rumah tangga, memang tidak selalu berjalan dengan baik namun jika rumah tangga dibangun dengan dasar ajaran agama Islam maka rumah tangga tersebut akan lebih mudah bertahan dari segala hal yang bisa menggangukannya kapan saja dan tujuan memiliki keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dapat tercapai

2. Cinta dan Kasih Sayang

Sesungguhnya pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diantara kedua pasangan melainkan juga bernilai sebagai ibadah. Suami dan istri memiliki kewajiban satu sama lain. Kewajiban tersebut harus dipenuhi agar kehidupan rumah tangga berjalan lancar dan apabila salah satunya tidak memenuhi tugas dan

kewajibannya kepada yang lain maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah dan konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, untuk membangun rumah tangga atau keluarga harmonis, pernikahan harus dilakukan dengan didasari dengan cinta dan kasih sayang karena cinta dan kasih sayang tersebut akan membuat keduanya dapat bersikap lembut dan saling menyayangi serta bersabar jika terjadi masalah diantara keduanya.

3. Kewajiban Suami

Seorang suami dalam kehidupan rumah tangga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya baik kebutuhan moril maupun materiil (baca kewajiban suami terhadap istri). Seorang suami juga pemimpin bagi istrinya oleh sebab itu ia harus bisa memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang bisa mendidik istrinya. Jika sang istri berbuat salah maka suami wajib mengingatkan dan memberinya pelajaran.

Tugas seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam QS. 2 (Al-Baqarah) Ayat 233, yaitu:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس
إلا وسعها

(Dan kewajiban ayah [suami] memberi makan dan pakaian kepada para ibu [istri] dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya).

Kewajiban suami, juga diungkapkan dalam beberapa hadits Rasulullah Saw. Salah satu di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (Nomor Hadits 1218), yaitu:

فلتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن

فَرَشِكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا
غَيْرَ مَبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf).

4. Kewajiban Istri

Seorang istri berkewajiban untuk melayani dan menyiapkan segala kebutuhan suami dan keluarganya serta mentaati segala perintahnya. Ia harus senantiasa merawat suaminya dengan segenap hati dan menyediakan apa yang ia perlukan. Ketika suami mencari nafkah maka istri sebaiknya tinggal di rumah dan hanya pergi jika suaminya mengizinkan.

Tidak hanya itu seorang istri juga harus menghormati keluarga suaminya dan menjaga kehormatannya tatkala suami tidak berada di rumah. Istri shalehah akan senantiasa mendoakan suaminya dalam kebaikan dan juga mendukung segala amal shaleh dan ibadah yang dilakukan suaminya. Jika suami melakukan kesalahan maka sang istri juga berkewajiban untuk mengingatkan suaminya agar kembali kejalan yang benar. Hal ini disebutkan dalam QS. 4 (An-Nisa') Ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْمَغْيِبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا
عليهن سبيلا

(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya).

E. Kesejahteraan Sosial dalam Islam

Islam amat peduli dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dibuktikan melalui sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis normatif, maupun rasional filosofis. Penjelasannya dapat disajikan seperti di bawah ini:

Pertama, sejahtera sebagaimana yang dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia, artinya aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya (Fadilah, 2020). Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai (Wahidah, 2018). Dari pengertiannya ini dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam. Misi tersebut juga menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw., sebagaimana dinyatakan dalam QS. 21 (Al-Anbiya') Ayat 107, yaitu:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

(Dan tidalah kamu mengutus kamu, melainkan untuk [menjadi] rahmat bagi seluruh alam).

Kedua, jika dilihat dari segi kandungannya bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial (Kholis, 2015). Hubungan dengan Allah misalnya harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan ajuran melakukan amal salih yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ajaran Islam yang pokok, yakni rukun Islam, seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial (Tahkim, 2016). Orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat adalah orang yang berkomitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegangan pada pentunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan, jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya. Demikian pula ibadah shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama'ah) mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain (Suparman, 2015). Ucapan salam pada urutan terakhir dalam tahyat berupaya mewujudkan kedamaian. Ibadah puasa seseorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan (Mufaizin, 2018). Demikian pula dengan ibadah haji dan umrah, diharapkan agar ia memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya (Hajar, 2014). Kemudian dalam zakat, tampak jelas unsur kesejahteraan sosialnya lebih kuat lagi.

Ketiga, upaya perwujudan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan Nabi Adam a.s. (Hafid, 2019). Quraish Shihab mengatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum keduanya turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan

(Almahmudi, 2019). Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam QS. 20 (Thaha) Ayat 117-119, yaitu:

فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنت لا تظمأ فيها ولا تضحى


(Maka Kami berkata: Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya).

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Keempat, dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranata sosial dan berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun suatu hal yang perlu dicatat, adalah bahwa berbagai bentuk pranata ini belum merata dilakukan oleh umat Islam, dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. kebutuhan air bersih menjadi sangat penting, dan menjadi tolok ukur kesejahteraan, (Arsyam, 2020). Hal ini mungkin disebabkan belum munculnya kesadaran yang merata serta pengelolaannya yang baik. Untuk itulah saat ini pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberikan motivasi

sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana seharusnya mewujudkannya. Di era sosial media seperti sekarang ini dakwah menjadi salah satu kebutuhan kesejahteraan (Sainuddin, 2020). Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Dalam Pendidikan juga mempengaruhi kemampuan kesejahteraan sosial (Arsyam, 2020). Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw., melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbang seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain. Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain, atau kreatifitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Aktivitas dakwah mampu mempengaruhi dalam konsep kehidupan dan makna kesejahteraan (Sainuddin, 2020). Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya (Imran, 2003). Ketika seseorang datang kepada Nabi Saw. mengadukan kemiskinannya, Nabi Saw. tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu.



BAB 2.1

KETAHANAN PANGAN

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Pengertian Ketahanan Pangan
- B. Milestones Ketahanan Pangan
- C. Pilar Ketahanan Pangan
- D. Kebijakan Ketahanan Pangan
- E. Ukuran Ketahanan Pangan

BAB 2.1

KETAHANAN PANGAN

A. Pengertian Ketahanan Pangan

Pangan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai makanan. Makna makanan yaitu segala sesuatu yang boleh dimakan baik itu lauk pauk, hewani, kue, dan sebagainya. Definisi ketahanan pangan menurut PBB ialah *food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread crop failure or other disaster* (ketahanan pangan ialah ketersediaan untuk menghindari kekurangan pangan ketika gagal panen atau terjadi bencana). Ketahanan pangan mengalami perubahan dan perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture pada tahun 1943. Pemaknaan ketahanan pangan sangat bervariasi. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), yang dimaksud ketahanan pangan adalah semua orang setiap saat mempunyai akses dalam kebutuhan konsumsinya untuk selalu hidup sehat dan produktif.

Ketahanan pangan sebagaimana yang diilustrasikan oleh International Food Policy Research Institute yaitu ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi pangan dan kebutuhan pangan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat. Sedangkan pengertian ketahanan pangan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pengertian tersebut di atas mengillustrasikan bahwa ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi yakni berorientasi pada rumah tangga dan individu, dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial, berorientasi pada pemenuhan gizi, serta ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Sesungguhnya pada mulanya ketahanan pangan berasal dari kegelisahan dan pertanyaan akankah dunia dapat memproduksi pangan yang cukup. Pertanyaan tersebut, kemudian berkembang dan dipertegas oleh International Food Policy Research Institute menjadi dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau oleh kelompok miskin. Setelah itu awal 1990-an, pertanyaan tersebut telah jauh lebih lengkap dan kompleks yaitu dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau oleh kelompok miskin serta tidak merusak lingkungan hidup.

B. Milestones Ketahanan Pangan

Milestones perkembangan ketahanan pangan dapat dilihat dalam empat periode berdasarkan perkembangan kesadaran dunia akan pentingnya ketahanan pangan, yakni tahun 1930–1945, tahun 1945–1970, tahun 1970–1990, serta tahun 1990–saat ini. Penjelasannya dapat disajikan seperti berikut ini, yaitu:

1. Tahun 1930–1945

Tahun 1930–1945 ditandai dengan situasi pasca Perang Dunia Pertama dan peran Liga Bangsa-bangsa. Ketahanan pangan mulai menjadi perhatian dunia setelah sebuah hasil survei tingkat dunia dilaporkan pada tahun 1935. Hasil survei yang dikemas dalam laporan berjudul *Nutrition and Public Health* tersebut memperlihatkan terjadinya kekurangan pangan di negara-negara miskin.

Berdasarkan hasil laporan tersebut, Liga Bangsa-bangsa mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan gizi bagi berbagai negara. Keterlibatan Divisi Kesehatan dan para ahli gizi terhadap situasi kelaparan dan kekurangan gizi dunia menghasilkan penjelasan hubungan antara gizi dan ketahanan pangan. Dalam perkembangannya, Liga Bangsa-bangsa sepakat bahwa peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan membawa kemakmuran bagi pertanian yang juga berdampak pada industri.

2. Tahun 1945-1970

Tahun 1945–1970 ditandai dengan kemunculan Badan Pangan Dunia (FAO), situasi surplus pangan, dan bantuan pangan. Setelah Perang Dunia Kedua, suplai pangan masih menjadi persoalan di antara negara-negara berkembang. Badan Pangan Dunia (FAO) yang baru didirikan mengadakan Survei Pangan Dunia pada tahun 1946 dengan tujuan untuk mengetahui kecukupan pangan, terutama energi bagi setiap orang di dunia. Hasilnya, sepertiga populasi dunia pada tahun 1945 tidak mendapatkan energi (kalori) yang cukup.

Oleh karena itu, dirancang program peningkatan produksi pertanian dunia hingga kemudian terjadi surplus hasil pertanian yang mencapai lebih dari 50 persen dalam kurun waktu 1950–1960 di beberapa negara. Situasi tersebut telah mulai disadari oleh FAO sehingga pada tahun 1952 didirikan Komite Persoalan Komoditas (CCP) untuk mengelola surplus pertanian yang dihasilkan dari peningkatan produksi pertanian.

Langkah tersebut diikuti oleh Sidang Umum PBB tahun 1960 dengan mengeluarkan resolusi tentang ketentuan penyaluran surplus pangan kepada mereka yang kekurangan pangan melalui sistem yang dibangun PBB, yakni program pangan dunia (WFP).

Dalam pertemuan Internasional Dewan Gandum Dunia di Roma Tahun 1967, disepakati konvensi bantuan pangan (Food Aid Conventions) sebagai komitmen legal untuk menyediakan bantuan

pangan. Bantuan pangan kemudian menjadi salah satu sarana dalam membantu negara-negara berkembang tetapi belum sampai memunculkan pemahaman tentang ketahanan pangan.

3. Tahun 1970-1990

Tahun 1970–1990 ditandai dengan kesadaran pentingnya ketahanan pangan dunia. Pada awal tahun 1970-an, terjadi perubahan besar karena iklim yang memburuk di beberapa wilayah dunia sehingga beberapa negara perlu mengimpor pangan. Dalam Konferensi Pangan Dunia (WFC) di Roma tahun 1974, kesadaran akan ketahanan pangan terbentuk dengan munculnya beberapa rekomendasi.

Ketahanan pangan dipahami sebagai kemampuan ketercukupan suplai pangan sepanjang waktu. Oleh karena itu, muncul rekomendasi untuk meningkatkan produksi komoditas pangan untuk menjamin ketersediaan pangan. Selain itu, negara-negara dengan surplus pangan disarankan untuk membantu negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan pangan.

FAO mendirikan Skema Pendampingan Ketahanan Pangan pada tahun 1976 bagi negara berkembang untuk mencapai ketahanan pangan. Skema tersebut dijalankan dengan dukungan pangan dalam jangka waktu terbatas sambil menggenjot produksi pangan. Skema tersebut dilanjutkan dengan persetujuan Program Aksi Ketahanan Pangan pada tahun 1979.

Pada awal tahun 1980-an, muncul pemahaman baru dalam diskusi tentang kelaparan dan ketahanan pangan hasil dari pendapat Amartya Sen. Argumen yang muncul adalah persoalan dalam hal kelaparan selama ini tak semata diakibatkan oleh kurangnya makanan, tetapi lebih karena tiadanya akses orang miskin atas pangan.

Ketika diskusi dan program ketahanan pangan tahun 1970-an lebih banyak memberikan perhatian pangan tingkat dunia dan

nasional, pada tahun 1980-an berkembang menjadi perhatian terhadap ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan individu.

Tahun 1982, FAO mengadopsi hasil konferensi Ketahanan Pangan Dunia yang menyatakan bahwa tujuan utama ketahanan pangan dunia adalah memastikan bahwa semua orang kapan pun memiliki akses baik fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang mereka butuhkan. Hal ini diikuti konferensi FAO tahun 1984 yang mencetuskan dasar ketahanan pangan, yakni menjamin kecukupan ketersediaan pangan bagi umat manusia dan terjaminnya setiap individu untuk memperoleh pangan.

Pada tahun 1986, dengan dipengaruhi oleh hasil laporan dunia "Poverty and Hunger" muncul akan kesadaran distingsi antara ketidaktahanan pangan kronis dan sementara. Ketidaktahanan pangan kronis dihubungkan dengan persoalan kemiskinan struktural dan pendapatan rendah. Sedangkan ketidaktahanan pangan dan sementara dihubungkan dengan tekanan sementara karena bencana, kejatuhan ekonomi, maupun konflik.

Kesadaran ini memunculkan tambahan denisi bagi ketahanan pangan, yakni akses kepada setiap orang sepanjang waktu terhadap pangan yang mencukupi bagi hidup yang aktif dan sehat.

4. Tahun 1990-Sekarang

Tahun 1990 hingga sekarang ditandai dengan situasi masa keemasan ketahanan pangan dunia. Ketahanan pangan dipahami dengan spektrum yang luas, mulai dari tingkat individu hingga global. Denisi ketahanan pangan juga semakin luas dengan memasukkan unsur keseimbangan gizi dalam ketahanan pangan.

Periode ini diawali dengan kekeringan yang memicu krisis pangan di Afrika tahun 1992. Pada tahun yang sama, diadakan Konferensi Internasional tentang Gizi di Roma. Deklarasi konferensi tersebut menyetujui penghapusan kelaparan dan mengurangi segala bentuk kekurangan gizi. Akses terhadap gizi dan pangan yang cukup dan aman dianggap sebagai hak setiap manusia. Pangan dunia

dianggap cukup untuk semua orang, akan tetapi kesenjangan akses terhadap pangan menjadi persoalan.

Konferensi FAO Roma 1992 menyempurnakan definisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yakni kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Di sini, mulai menguat konsep kedaulatan pangan (food sovereignty) di tingkat rumah tangga dalam mencapai ketahanan pangan.

Perkembangan penting kesadaran ketahanan pangan terjadi pada tahun 1996 dalam KTT Pangan Dunia yang diadakan oleh FAO di Roma. Ketahanan pangan dipahami sebagai situasi ketika semua orang, kapan pun, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat.

Konferensi ini menampakkan kehendak kuat semua negara untuk menghapuskan kelaparan dan menyetujui hak setiap orang terhadap akses pangan yang bergizi dan aman. Hal ini memunculkan perhatian besar dunia terhadap pentingnya kedaulatan pangan (food sovereignty) dalam mencapai ketahanan pangan.

Penekanan pada sisi konsumsi dan isu akses terhadap pangan mengingatkan kembali terhadap diskusi yang dipantik oleh Amartya Sen pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, Amartya Sen memfokuskan ketahanan pangan di tingkat individu dan rumah tangga.

Langkah lain tampak dalam Millennium Development Goals (MGDs) yang dicanangkan PBB pada tahun 2000. Dalam MGDs disebutkan, tujuan pertama yang hendak dicapai adalah penghapusan kemiskinan dan kelaparan.

Dengan adanya krisis pangan 2005 di Nigeria serta krisis harga pangan dunia tahun 2008, muncul kesadaran tentang aspek ekonomi (akses) dari ketahanan pangan. Pangan tersedia, panen melimpah,

tetapi harga pangan terlalu tinggi untuk dapat diperoleh bagi kebanyakan populasi.

C. Pilar Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan sebagaimana yang rumuskan FAO (1997) memiliki empat pilar utama, yaitu: Ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas. Penjelsan keempat pilar ini dapat disajikan seperti berikut ini:

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; dan pemanenan. Produksi tanaman pertanian dapat dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan. Pemanfaatan lahan, air, dan energi untuk menumbuhkan bahan pangan sering kali berkompetisi dengan kebutuhan lain. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dapat berubah menjadi pemukiman atau hilang akibat desertifikasi, salinisasi, dan erosi tanah karena praktik pertanian yang tidak lestari.

Produksi tanaman pertanian bukanlah suatu kebutuhan yang mutlak bagi suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan. Jepang dan Singapura menjadi contoh bagaimana sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam untuk memproduksi bahan pangan namun mampu mencapai ketahanan pangan.

Distribusi pangan melibatkan penyimpanan, pemrosesan, transportasi, pengemasan, dan pemasaran bahan pangan. Infrastruktur rantai pasokan dan teknologi penyimpanan pangan juga dapat mempengaruhi jumlah bahan pangan yang hilang selama distribusi. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan harga hingga ke pasar global. Produksi

pangan per kapita dunia sudah melebihi konsumsi per kapita, namun di berbagai tempat masih ditemukan kerawanan pangan karena distribusi bahan pangan telah menjadi penghalang utama dalam mencapai ketahanan pangan.

2. Akses Pangan

Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga. PBB menyatakan bahwa penyebab kelaparan dan malgizi sering kali bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan. Kemiskinan membatasi akses terhadap bahan pangan dan juga meningkatkan kerentanan suatu individu atau rumah tangga terhadap peningkatan harga bahan pangan. Kemampuan akses bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga untuk membeli bahan pangan, atau kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri. Rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi ketidakstabilan panen dan kelangkaan pangan setempat serta mampu mempertahankan akses kepada bahan pangan.

Terdapat dua perbedaan mengenai akses kepada bahan pangan. (1) Akses langsung, yaitu rumah tangga memproduksi bahan pangan sendiri, (2) akses ekonomi, yaitu rumah tangga membeli bahan pangan yang diproduksi di tempat lain. Lokasi dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan dan jenis akses yang digunakan pada rumah tangga tersebut. Meski demikian, kemampuan akses kepada suatu bahan pangan tidak selalu menyebabkan seseorang membeli bahan pangan tersebut karena ada faktor selera dan budaya. Demografi dan tingkat edukasi suatu anggota rumah tangga juga gender menentukan keinginan memilih bahan pangan yang diinginkannya sehingga juga mempengaruhi jenis pangan yang akan dibeli. USDA menambahkan bahwa akses kepada

bahan pangan harus tersedia dengan cara yang dibenarkan oleh masyarakat sehingga makanan tidak didapatkan dengan cara memungut, mencuri, atau bahkan mengambil dari cadangan makanan darurat ketika tidak sedang dalam kondisi darurat.

3. Pemanfaatan Pangan

Ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu. Keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga. Akses kepada fasilitas kesehatan juga mempengaruhi pemanfaatan pangan karena kesehatan suatu individu mempengaruhi bagaimana suatu makanan dicerna. Misal keberadaan parasit di dalam usus dapat mengurangi kemampuan tubuh mendapatkan nutrisi tertentu sehingga mengurangi kualitas pemanfaatan pangan oleh individu. Kualitas sanitasi juga mempengaruhi keberadaan dan persebaran penyakit yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pangan sehingga edukasi mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan.

4. Stabilitas Pangan

Stabilitas pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis (permanen). Pada ketahanan pangan transisi, pangan kemungkinan tidak tersedia pada suatu periode waktu tertentu. Bencana alam dan kekeringan mampu menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan pada tingkat produksi. Konflik sipil juga dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan. Ketidakstabilan di pasar menyebabkan peningkatan harga

pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit. Musim tanam mempengaruhi stabilitas secara musiman karena bahan pangan hanya ada pada musim tertentu saja. Kerawanan pangan permanen atau kronis bersifat jangka panjang dan persisten.

Stabilitas pangan merupakan taraf tertinggi dari tingkatan kepemilikan atau penguasaan pangan. Urutan tingkatan yang dimaksud mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah pertama: ketahanan pangan, kedua: kemandirian pangan, dan ketiga: ketangguhan atau stabilitas pangan.

D. Kebijakan Ketahanan Pangan

Perkembangan ketahanan pangan di Indonesia dapat dilihat jejaknya dari kebijakan pangan sejak masa awal kemerdekaan hingga pemerintahan terkini. Namun perlu digaris bawahi bahwa strategi pencapaian ketahanan pangan di Indonesia sering disamakan dengan ketersediaan pangan, terutama ketersediaan beras dan swasembada beras, lebih daripada kepemilikan pangan.

Pada masa Orde Lama, kebijakan pangan di Indonesia difokuskan pada swasembada beras. Terdapat dua kebijakan besar untuk mendukung fokus tersebut, yakni Program Kesejahteraan Kasimo dan Program Sentra Padi. Program Kesejahteraan Kasimo turut didukung oleh pembentukan dan peran Yayasan Bahan Makanan (Bama) pada tahun 1950–1952 serta Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) tahun 1953–1956. Sedangkan Program Sentra Padi, antara lain didukung oleh peran Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) tahun 1956, Program Substitusi Jagung tahun 1963, serta pembentukan Bimas dan Panca Usaha Tani.

Pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru, selama tahun 1965–1967, beberapa kebijakan pangan pemerintah meliputi, antara lain pembentukan Komando Logistik Nasional (Kolognas) tahun 1966

serta pendirian Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menggantikan Kolognas tahun 1967. Bulog kemudian menjadi satu-satunya pembeli beras tunggal di Tanah Air.

Selama Orde Baru, ketahanan pangan dipahami dengan menggunakan tiga asumsi, yaitu: Pertama, kelangkaan pangan secara cepat direfleksikan oleh meningkatnya harga pangan. Kedua, harga (pangan) yang terjangkau cukup dapat menjamin akses semua orang untuk memperoleh pangan yang memadai. Ketiga, produksi pangan domestik yang cukup (swasembada) menjadi cara yang paling efektif untuk mencapai stabilitas harga pangan dalam negeri (dan pada gilirannya mencapai ketahanan pangan).

Dengan asumsi tersebut, kebijakan pangan selama Orde Baru dapat dikelompokkan menjadi tiga periode sesuai perhatian rencana pembangunan lima tahun (repelita), pertama swasembada beras (1969–1979), swasembada pangan (1979–1989), dan kembali lagi swasembada beras (1989–1998).

Beberapa program kegiatan selama periode kebijakan swasembada beras tahun 1969–1979, antara lain menambah tugas Bulog sebagai manajemen stok penyangga pangan nasional (1969), pengimpor gula dan gandum (1971), pengadaan daging untuk DKI Jakarta (1974), hingga mengontrol impor kacang kedelai (1977). Selain itu, muncul Serikat Tani Indonesia (1971), penetapan Revolusi Hijau untuk mencapai swasembada beras (1974), serta penetapan harga dasar jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau (1978).

Selama penerapan kebijakan swasembada pangan (1979–1989), terdapat beberapa program, antara lain mengembalikan tugas Bulog sebagai pengontrol harga gabah, beras, tepung, gandum, dan lain-lain dengan Keppres 39/1978. Pada tahun 1984, Indonesia mendapatkan medali dari FAO karena keberhasilan swasembada beras.

Pada periode 1989–1998, kebijakan ketahanan pangan Indonesia kembali fokus pada swasembada beras. Pada periode ini,

Bulog diubah fungsinya menjadi hanya mengontrol harga beras dan gula pasir (1997). Bahkan, pada 1998 Bulog hanya mengontrol harga beras saja.

Kebijakan swasembada beras kembali dilanjutkan selama pemerintah Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan tugas Bulog sebagai manajemen logistik beras, mulai dari penyediaan, distribusi, dan mengontrol harga. Pada masa Presiden Megawati, Bulog diprivatisasi (2003) serta swasembada beras ditegaskan sebagai strategi tunggal di bidang pangan (2004).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempuh kebijakan revitalisasi pertanian dan swasembada lima komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula, kedelai, dan daging sapi. Kebijakan ini disertai dengan komitmen untuk meningkatkan pendapatan petani demi menggenjot PDB, pembangunan agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja, serta swasembada beras, jagung, serta palawija.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan pangan juga diarahkan untuk swasembada pangan. Beberapa program yang muncul, antara lain Program Cetak Sawah, Korporasi Usaha Tani, dan Program Lumbung Pangan Masyarakat. Selain itu, konsep ketahanan pangan didukung dengan kebijakan kedaulatan pangan.

Di tingkat kebijakan, konsep kedaulatan pangan di Indonesia mulai muncul pada akhir pemerintahan SBY dalam UU 18/2012 tentang Pangan. Konsep tersebut dipertegas dan diperjelas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sesuai dengan pemikiran yang berkembang di tingkat global, yakni sebagai suatu kebijakan pangan yang lebih mendasar.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, konsep kedaulatan pangan muncul beberapa kali dalam dokumen pemerintah, antara lain dalam Nawacita, RPJM 2014–2019, Rencana Induk Pembangunan Pertanian 2015–2045, Rencanan Kerja

Kementerian Pertanian 2015–2019, Rencana Kerja Kementan 2014, serta Rencana Kerja Kementan 2016.

Pemahaman akan kedaulatan pangan di Indonesia, sesuai artikel “Kedaulatan Pangan Sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”, membentuk tiga pola penjelasan.

Pertama, kedaulatan pangan dianggap sejalan dengan ketahanan pangan. Dengan demikian, berdaulat secara pangan terwujud saat kebijakan pangan tidak dikendalikan oleh negara lain. Kedua, ketahanan pangan dipandang sebagai landasan untuk mencapai kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan terwujud pada tingkat komunitas. Ketiga, pemahaman kedaulatan pangan sesuai dengan pemahaman di tingkat dunia.

E. Ukuran Ketahanan Pangan

Perkembangan kebijakan ketahanan pangan berimbas pada perkembangan ukuran ketahanan pangan. Oleh karena itu, ukuran ketahanan pangan kemudian meliputi berbagai tingkatan, mulai dari cakupan global, nasional, regional, komunitas, rumah tangga hingga individu. Di tingkat wilayah yang meliputi global, nasional, dan regional, pengukuran ketahanan pangan dapat menggunakan berbagai indikator, antara lain: (1) tingkat produksi, ketersediaan, konsumsi dan perdagangan pangan, (2) rasio stok pangan dan konsumsi, (3) skor tingkat ketersediaan dan konsumsi, (4) kondisi keamanan pangan, (5) keadaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat, dan (6) kemampuan untuk melakukan stok pangan.

Di sisi lain, di tingkat rumah tangga dan individu, ketahanan pangan dapat dilihat dari sisi akses baik fisik maupun ekonomi terhadap pangan. Akses fisik ditentukan oleh ketersediaan dan distribusi pangan. Sedangkan akses ekonomi dipengaruhi oleh daya beli dan pendapatan. Pada tahun 1994, FAO mengembangkan ukuran ketahanan pangan rumah tangga dengan menggunakan indeks

ketahanan pangan rumah tangga atau average household food security.

Dimensi ketersediaan pangan diwakili dari sisi kecukupan pangan. Dimensi akses pangan diwakili dari keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan, dimensi pemanfaatan pangan diwakili oleh aspek kecukupan asupan serta aspek kualitas air. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menggambarkan rata-rata persentase dari ketiga dimensi di atas. Hasilnya, dibuat tiga kategori, daerah kurang tahan pangan, cukup tahan pangan, dan tahan pangan tinggi hingga level provinsi. Di level Kabupaten, Badan Ketahanan Pangan (BKP) memperluas cakupan IKP hingga tingkat kabupaten/kota.

Indonesia juga mengadopsi IKP di tingkat rumah tangga menjadi Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga (IKPRT) berdasarkan konsumsi energi dan protein. Selain berbagai ukuran yang menyatukan beberapa indikator dalam bentuk indeks di atas, ketahanan pangan juga dapat dilihat dari beberapa indikator terpisah, antara lain ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga pemanfaatan pangan. Di dalamnya terdapat indikator, seperti stabilitas harga pangan pokok, produksi pangan pokok, luas panen pangan pokok, akses distribusi pangan, peningkatan jumlah penduduk, hingga impor komoditas pangan pokok.

Di Indonesia, salah satu indikator pangan adalah beras. Data beras dapat dilihat salah satunya dari produksi, luas panen, dan produktivitas padi. Dari luas panen padi, selama 2014–2018 terdapat peningkatan yakni dari 13,8 juta hektar pada tahun 2014 menjadi 15,9 juta hektar pada tahun 2018. Dalam kurun waktu yang sama, produksi padi juga mengalami kenaikan, dari 70,9 juta ton pada tahun 2014 menjadi 83 juta ton pada tahun 2018. Sedangkan produktivitas padi juga meningkat, dari 51,4 kuintal per hektar pada tahun 2014 menjadi 51,9 kuintal per hektar pada tahun 2018.

Selama pandemi Covid-19, kestabilan ketahanan pangan di seluruh dunia dan Indonesia mengalami gejolak. Di Indonesia,

kementerian pertanian mengembangkan kebijakan yang disebut “4 Cara Bertindak” yang meliputi peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan dan sistem logistik, serta pengembangan pertanian modern. Selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan dan kemudahan akses pangan bagi masyarakat selama pandemi dengan menggelontorkan dana sebesar Rp. 25 triliun. Untuk bahan pangan beras, Bulog memastikan bahwa pasokan beras terjamin hingga akhir tahun 2020. Untuk mendukung janji tersebut, Bulog menjalankan fungsinya dengan menyerap beras dari petani. Hingga Juni 2020, Bulog telah menyerap 700 ribu ton beras dari petani, atau separuh dari target serapan beras 2020, yakni 1,4 juta ton.



PERSPEKTIF ISLAM

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Ayat dan Hadits Ketahanan Pangan
- B. Ketahanan Pangan Nabi Yusuf
- C. Fikih Ketahanan Pangan
- D. Pangan Halalan Tayyiban

BAB 3.1

PERSPEKTIF ISLAM

A. Ayat dan Hadits Ketahanan Pangan

1. Ayat Ketahanan Pangan

Secara eksplisit ada beberapa ayat al-Qur'an yang memuat pesan tentang ketahanan pangan, di antaranya, yaitu: QS. 12 (Yusuf) Ayat 47, QS. 16 (An-Nahl) Ayat 6 dan 14, QS. 6 (Al-An'am) Ayat 141-142, QS. 4 (An-Nisa') Ayat 29, QS. 9 (At-Taubah) Ayat 60, QS. 2 (Al-Baqarah) Ayat 267, QS. 7 (Al-A'raf) Ayat 31, dan QS. 2 (Al-Baqarah) ayat 168. Secara kontekstual, ayat-ayat tersebut mengindikasikan program peningkatan ketahanan pangan secara Qur'ani. Adapun yang menjadi titik perbedaan dengan konsep ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah dalam al-Qur'an memuat pesan halal sejak proses produksi hingga konsumsi, sehingga pangan yang dikonsumsi dapat bermanfaat bagi kebutuhan dan kecukupan manusia, bukan saja aspek jasmani material tetapi juga aspek rohani spiritual. Ayat-ayat tersebut di atas dapat disajikan seperti di bawah ini, yaitu:

a. QS. 12 (Yusuf) Ayat 47

قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله
إلا قليلاً مما تأكلون

(Yusuf berkata: Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan)

b. QS. 16 (An-Nahl) Ayat 6

ولكنم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

(Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan)

c. QS. 16 (An-Nahl) Ayat 14

وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من
فضله ولعلكم تشكرون

(Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur)

d. QS. 6 (Al-An'am) Ayat 141

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل
والزروع مختلفا أكلمه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا
إنه لا يحب المسرفين

(Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan)

e. QS. 6 (Al-An'am) Ayat 142

ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

(Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu)

f. QS. 4 (An-Nisa') Ayat 29

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله
كان بكم رحيمًا

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu)

g. QS. 9 (At-Taubah) Ayat 60

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم

(Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana)

h. QS. 2 (Al-Baqarah) Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تَنْفَقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

(Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji)

i. QS. 7 (Al-A'raf) Ayat 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

(Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan)

j. QS. 2 (Al-Baqarah) Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خَطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu)

2. Hadits Ketahanan Pangan

Selain ayat-ayat al-Qur'an, juga ditemukan beberapa hadits Rasulullah Saw. memuat pesan tentang ketahanan pangan, di antaranya, yaitu:

- a. Hadits riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Ra., dia bercerita bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة و ما سرق منه له صدقة و ما أكلت الطير فهو له صدقة و لا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة

(Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya)

- b. Hadits riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik Ra., Rasulullah Saw. bersabda:

ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعاً ف يأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

(Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya)

- c. Hadits riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Ra., dia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw. :

فلا يغرس المسلم غرساً ف يأكل منه إنسان و لا دابة و لا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة

(Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat)

d. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Ahmad, Rasulullah Saw. bersabda:

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى
يغرسها فليغرسها

(Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya maka tanamlah)

e. Hadits riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Rasulullah Saw. bersabda:

من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية فهو له صدقة
(Barangsiapa mengolah yang tanah mati (lahan gundul), dia mendapatkan pahala. Apapun yang dimakan oleh makhluk hidup bernilai sedekah baginya)

f. Hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah Saw. bersabda:

من قطع سدره صوب الله رأسه في النار
(Barang siapa menebang pohon bidara maka akan dituangkan di atas kepalanya air yang panas)

g. Hadits riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Saw. bersabda:

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله
داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده

(Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan, yang berasal dari hasil usaha tangannya (sendiri). Dan sungguh Nabi Dawud, As., makan dari hasil usaha tangannya (sendiri))

Hadits-hadits di atas merupakan dalil-dalil yang jelas dan tegas mengenai anjuran Rasulullah Saw. untuk bercocok tanam, karena di dalam bercocok tanam terdapat dua manfaat, yaitu: manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi, yaitu: menghasilkan bahan makanan yang manfaat untuk penanamnya, masyarakat dan memperbanyak kebaikan-kebaikan lainnya. Manfaat ukhrawi, yaitu: berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang ditanam apabila dimakan oleh manusia, binatang baik berupa burung ataupun yang lainnya meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya, sama saja apakah dia kehendaki ataupun tidak.

Mengutip pendapat Imam Al-Qurthubi, Imam Ibnu Hajar dalam Fathu Al-Bari menyatakan bahwa kegiatan menanam tersebut sebagai panggilan keagamaan yang bermanfaat untuk orang banyak. Islam memandang profesi petani sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Hal ini disebabkan karena Allah Swt. menciptakan bumi beserta isinya untuk kemudahan bagi manusia. Dalam kadar tertentu tanaman dan tumbuhan di muka bumi dapat tumbuh dengan mudah dan memproduksi sendiri. Allah Swt. telah menghamparkan bumi, mencurahkan air hujan, angin dan lain-lain untuk memudahkan manusia bercocok tanam. Allah, Swt., berfirman: “Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan?”

B. Ketahanan Pangan Nabi Yusuf

Allah Swt. mengisahkan dalam Al-Qur’an cerita Nabi Yusuf As. sebagai pelopor sekaligus konseptor dalam membuat strategi ketahanan pangan yang kuat. Pelajaran dari Nabi Yusuf ini tertuang dalam surah Yusuf ayat 46-49. Pelajaran penting yang dapat dipetik dari kisah Nabi Yusuf As. dalam menghadapi krisis pangan, bermula saat sang raja bermimpi yang berkaitan dengan masa depan negaranya, lalu tidak ada satu pun para penasihat dapat menakwilkan mimpi raja tersebut. Hingga akhirnya salah seorang pelayan memberi usul agar raja mengutusnyanya untuk menemui orang

yang pandai dalam menakwilkan mimpi, yaitu Yusuf. Hal ini disebutkan dalam surat Yusuf ayat 46, yaitu:

يوسف أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سَنَبِلَاتٍ خَضْرَاءُ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لِّعَلِّي أَرْجِعَ
إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

(Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui)

Suatu hari raja Mesir, Ar-Rayyan bin Al-Walid bermimpi tentang tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina kurus-kurus, dan tujuh bulir (gandum) hijau, serta tujuh bulir yang lain kering. Mimpi (ar-ru'ya) itu pun diceritakan kepada Al-Mala' supaya ditafsirkan. Al-Mala' justru menganggap mimpi itu adalah adgas ahlam.

Mimpi tersebut telah menimbulkan beban psikis berat bagi raja Ar-Rayyan bin Al-Walid. Tindakan raja meminta pendapat atau nasehat kepada para penasehat istana juga menunjukkan beban psikis yang dialaminya berat. Mimpi ini menjadi simbol realitas yang akan terjadi dengan masa depan negara yang dipimpinya. Oleh karena mimpi ini dialami oleh seorang raja, maka mimpi ini merupakan mimpi besar dan penting. Oleh sebab itu, mimpi ini sulit ditafsirkan dan membuat raja sangat gelisah, dan raja pun meminta nasehat kepada para penasehatnya untuk mena'wilkan mimpi tersebut. Karena tidak ada satupun penasehat kerajaan yang mampu memberikan jawaban atas mimpi raja dengan penjelasan yang memuaskan maka sang raja meminta bantuan kepada Yusuf untuk membantu menafsirkan mimpinya.

Tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk merupakan tanda yang diartikan Yusuf dengan bercocok tanam selama tujuh tahun seperti

biasa. Bercocok tanam selama tujuh tahun dilakukan supaya negara gemuk seakan seperti sapi betina yang gemuk dan memiliki cadangan pangan melimpah. Bercocok tanam selama tujuh tahun ini harus dilakukan terlebih dahulu, karena pada masa ini lahan masih dalam kondisi subur, sehingga tanaman dan bulir-bulir akan terlihat menghijau. Persiapan ini harus dilakukan, karena tujuh tahun kesuburan ini akan dimakan atau berganti tujuh tahun yang penuh kesulitan, seperti tujuh sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh sapi betina kurus-kurus. Saat masa paceklik inilah kesuburan tanah sirna akibat kekeringan, sehingga tanaman akan kering dan tidak dapat tumbuh, seperti tujuh bulir-bulir lain yang kering. Mimpi sang raja berhasil ditakwilkan Yusuf, bahwa akan datang tujuh tahun masa kemakmuran dengan hasil bumi yang melimpah, dan setelah itu akan datang tujuh tahun masa kesulitan pangan akibat kekeringan.

Persoalan menarik yang perlu dicermati dalam mimpi raja adalah penggunaan tanda sapi betina gemuk-gemuk, sapi betina kurus-kurus, bulir (gandum) hijau, dan bulir kering. Sapi merupakan simbol hewan ternak. Hal ini menunjukkan salah satu komoditi ekonomi masyarakat Mesir kala itu adalah industri peternakan. Bulir gandum merupakan simbol pertanian. Hal ini menunjukkan salah satu komoditi ekonomi yang lain adalah industri pertanian. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa mimpi raja berkaitan dengan persoalan kehidupan rakyat.

Yusuf menjelaskan arti mimpi raja berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Allah Swt. Mesir negara yang mengalami masa subur selama tujuh tahun akan berganti menghadapi masa paceklik selama tujuh tahun. Yusuf memberikan masukan kepada raja dengan perencanaan strategis untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, yaitu: produksi massal gandum dan manajemen stok pangan. Dalam menjelaskan takwil mimpi raja, Yusuf tidak hanya berhenti pada hakikat arti mimpi itu. Selain menunjukkan sebuah prediksi

kebenaran mimpi, Yusuf juga memberikan tawaran solusi untuk menghadapi krisis ekonomi (Q.S. 12 (Yusuf) Ayat 47 dan 48).

Dia (Yusuf) berkata, agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun-tahun sulit), kecuali sedikit apa (bibit gandum) yang kamu simpan.

Sang raja menerima tawaran solusi yang diberikan Yusuf untuk mengatasi krisis pangan dengan produksi massal gandum dan manajemen stok pangan. Ketika tiba masa paceklik yang melanda Mesir, warganya tetap tenang lantaran banyak cadangan makanan dalam lumbung. Bahkan makanan tersebut membantu Mesir dalam melewati masa-masa sulit selama paceklik. Bahkan, ketahanan pangan negara Sungai Nil saat itu menjadikannya sebagai pengekspor gandum untuk negeri-negeri perserikatan Mesir, seperti Mesopotamia, Suriah, dan Kan'an, ketika negeri-negeri tersebut mengalami musim kemarau yang sama.

Selain strategi peningkatan produktivitas tanam dan juga manajemen stok pangan, Nabi Yusuf juga memberlakukan strategi ketiga, yaitu membudayakan hidup hemat dalam mengonsumsi makanan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi frekuensi konsumsi makanan dan untuk mengatur keseimbangan pola konsumsi gandum dalam tiga fase pembagian musim, yaitu fase musim hujan, musim kemarau, dan fase musim hujan berikutnya. Tak heran bila Yusuf bersama raja Mesir serta seluruh rakyatnya hanya makan gandum satu kali dalam sehari. Oleh sebab itu, pada surat Yusuf ayat 49 menerangkan apabila semua masa-masa itu dapat dilalui sesuai dengan masukannya, maka masyarakat akan memperoleh masa-masa kemakmuran, yang digambarkan dalam

bentuk pemberian hujan yang cukup dan memeras sesuatu. Setelah itu akan datang tahun, saat itu manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).

Allah Swt. telah menurunkan hujan dengan curah yang cukup ketika musim kering melanda. Dan di masa itu mereka memeras anggur, suatu keadaan di suatu masa yang membuat mereka merasa damai dan mereka dapat memetik buah-buahan seperti zaitun, Qurtum dan lain sebagainya, dan jenis tumbuh-tumbuhan biji-bijian, dan tumbuhan yang mengandung air seperti tebu, kurma dan anggur. Maksud bahwa tahun ini tahun yang agung, tahun yang penuh kesuburan dan kemakmuran adalah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka.

Strategi ekonomi Nabi Yusuf As. pada hakikatnya adalah untuk menyelamatkan negara Mesir dalam melewati masa-masa paceklik selama tujuh tahun. Seperti yang sudah diprediksi Nabi Yusuf ketika mentakwilkan mimpi raja Mesir. Ketika masa paceklik menimpa suatu daerah atau negara dalam jangka waktu yang cukup lama, maka implikasinya adalah terjadi kemiskinan dan kelaparan menimpa masyarakat daerah atau negara tersebut.

Nabi Yusuf As. telah membuat strategi ekonomi dalam rangka mengantisipasi dampak kemiskinan dan kelaparan ketika masa paceklik melanda Mesir. Setelah sang raja menjalankan saran dari Nabi Yusuf A., Mesir dapat melewati masa-masa paceklik dengan selamat. Warganya merasa tenang, karena tidak ada istilah kemiskinan dan kelaparan menimpa mereka, kebutuhan mereka telah terpenuhi untuk jangka waktu yang panjang. Artinya, strategi Nabi Yusuf As. Bertujuan untuk menyelamatkan jiwa manusia dari kemiskinan dan kelaparan.

Dalam perspektif Teori Sinergi dan Integrasi Subsistem Utama Ketahanan Pangan bahwa ketahanan pangan model Nabi Yusuf dapat dilihat dalam uraian berikut, yaitu: Subsistem utama ketahanan pangan meliputi: Ketersediaan atau produksi pangan, aksesibilitas

atau distribusi pangan dan pemanfaatan atau konsumsi pangan. Ketika ketiga subsistem tersebut disinergikan dan diintegrasikan dengan baik, maka tujuan ketahanan pangan akan terwujud. Simpanan pangan akan melimpah, distribusi pangan akan merata sampai daerah-daerah terpencil sekalipun dan masyarakat akan terhindar dari sifat berfoya-foya atau hedonis karena momentum krisis dijadikan sebagai momentum untuk belajar menahan diri untuk berhemat pangan.

Dalam mencapai ketahanan pangan yang kuat, Nabi Yusuf As. juga menerapkan tiga strategi, yaitu: Pertama produksi masal pangan, kedua, penyimpanan sebagian besar hasil produksi pertanian dan ketiga, kebijakan hidup hemat yang harus dipatuhi oleh semua elemen negara. Ketiga strategi ini telah berhasil mengantarkan Mesir melawati masa-masa krisis dengan selamat dan membawa ketenangan serta kesejahteraan bagi rakyatnya.

Dalam mengimplementasikan strategi ketahanan pangan, ada tiga strategi yang diterapkan dalam kebijakan Nabi Yusuf As., yaitu: Pertama, peningkatan produksi pangan, kedua, penyimpanan sebagian besar hasil produksi pertanian, dan ketiga, kebijakan hidup hemat yang harus dipatuhi semua elemen Negara. Jika ketiga strategi Nabi Yusuf As. diterapkan ke dalam ketahanan pangan nasional, implikasinya antara lain, stok pangan dalam negeri akan tercukupi, sehingga kita tidak perlu impor bahan pangan dari Negara lain. Kemudian terjadi stabilisasi mata uang rupiah, karena kita memiliki cadangan devisa yang besar, yakni dari kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Dalam hal ini, akan dijelaskan lebih lanjut terkait kontribusi ketahanan pangan Nabi Yusuf As. bagi ketahanan pangan nasional, khususnya bagi stabilitas rupiah, karena di Indonesia, uang merupakan suatu komoditas.

Di dunia hari ini mata uang sudah identik dengan komoditas. Depresiasi rupiah yang terjadi karena demand dolar AS menjadi lebih tinggi dari supainya, sehingga harganya ketika dinilai dengan rupiah

menjadi tinggi. Lalu bagaimana cara terbaik untuk melakukan stabilisasi rupiah agar tidak berimplikasi pada krisis ekonomi. Dalam hal ini kita dapat belajar tentang filosofi menghadapi krisis dari inovator stabilisasi krisis ekonomi dalam sejarah peradaban manusia, yakni Nabi Yusuf As.

Prinsip-prinsip ekonomi Nabi Yusuf yang tertera dalam QS. 12 Ayat 46-49 tentang stabilisasi krisis tetap up to date untuk diimplementasikan hari ini, yaitu:

Prinsip pertama, yaitu: Sumber kekuatan dari serangan krisis adalah berasal dari kekuatan ekonomi riil yang dibangun suatu bangsa dalam keadaan ekonomi normal. Kita belajar dari Nabi Yusuf As. bagaimana mengatasi krisis pangan dunia, ia mengajarkan bahwa kekuatan Mesir saat itu dibangun dari kekuatan pangan domestiknya. Kekuatan itu dibangun dalam keadaan normal. Krisis identik dengan invasi musuh yang mendadak ke satu Negara. Hanya, musuhnya bukan berbentuk pasukan Negara lain, tapi guncangan ekonomi. Negara yang pasukannya berlatih serius membangun kekuatan dan kompetisi akan sulit dikalahkan. Apa yang dapat diadopsi dari prinsip Nabi Yusuf As. bagi stabilitas rupiah yang berkelanjutan dan tidak rawan guncangan. Kekuatan suplai valuta asing harus dari kekuatan ekonomi domestik. Hal ini selaras dengan kaidah ekonomi internasional modern yang mengatakan stabilitas mata uang suatu negara akan kokoh jika cadangan devisa nasional kuat dan besar. Cadangan devisa ini sebenarnya identik dengan kekayaan sumber daya alam suatu negara.

Prinsip kedua, yaitu: Kemampuan mengembangkan prinsip menahan kepentingan sesaat hari ini demi kepentingan bersama yang berkelanjutan pada masa mendatang. Kalau kita merujuk prinsip Nabi Yusuf As., melemahnya rupiah adalah momen untuk menahan kepentingan sesaat berupa kegandrungan kita terhadap impor yang sangat tinggi.

C. Fikih Ketahanan Pangan

Ada pepatah Arab mengatakan bahwa seorang petani adalah tuan dari sebuah negara dan pemilik wilayah yang sesungguhnya. Sesungguhnya bidang pertanian menjadi salah satu dari sekian lahan pekerjaan halal yang amat diutamakan dalam Islam, hal ini diungkapkan dalam QS. 36 (Yasin) Ayat 34-35, yaitu:

وجعلنا فيها جنت من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا
من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

(Kami menjadikan (di atas muka bumi ini tempat yang sesuai untuk dibuat) ladang-ladang kurma dan anggur. Kami pancarkan banyak mata air (di situ). Tujuannya supaya mereka boleh mendapat rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanam-tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah mereka berasa tidak perlu bersyukur?)

Sedangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Saw. bersabda:

ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له
صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له
صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة

(Tak ada seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu (yang dimakan) itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorangpun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya)

Dalam berbagai kitab fikih, sedari dini sudah dirumuskan berbagai hal menyangkut pertanian. Ini bisa kita lihat dalam perumusan soal zakat pertanian, akad muzara'ah, dan juga keutamaan bertani. Di masa kekhalifahan Islam pun kegiatan pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan amat

digalakkan. Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi apabila hasil industri ini turut menyumbang kepada hasil makanan negara selain merupakan sumber pendapatan petani. Tercatat dalam sejarah Islam, salah satu hal yang menonjol dalam revolusi pertanian kala itu adalah dikenalnya banyak jenis tanaman baru dan peralatan pertanian.

Dalam buku Teknologi dalam Sejarah Islam (1976) disebutkan beberapa jenis tanaman yang mulai dikenal masyarakat Arab, seperti padi, tebu, kapas, terong, bayam, semangka, dan berbagai sayuran serta buah-buahan lainnya. Pertanian merupakan warisan peradaban yang sudah ada sejak dahulu kala. Seiring waktu, ilmu, dan teknologi, pertanian terus berkembang kian moderen, sehingga ada produk pertanian organik dan sebagainya. Dalam hal ini, Al-Qur'an telah mengingatkan untuk selalu mengejar ilmu dan menyerahkan pada ahlinya, seperti yang disebutkan dalam QS. 21 (Al-Anbiya') Ayat 7, yaitu:

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون

(Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui)

Ini pertanda bahwa seorang muslim harus bersikap terbuka pada ilmu pengetahuan demi mengembangkan suatu produk peradaban yang salah satunya adalah pertanian. Asas Keadilan Pangan pada masa Nabi Muhammad Saw. membangun peradaban Madinah, merupakan urusan penting dan tidak lepas dari perhatiannya. Dalam Kitab I'anatuth Tholibin disebutkan tentang ketegasan Nabi Saw. terhadap potensi ketidakadilan pangan karena ulah penimbunan yang menyebabkan naiknya harga dan mengakibatkan rumah tangga miskin tidak mampu membeli makanan. Nabi Saw. menyebut para penimbun (muhtakir) itu sebagai dosa besar dan dikutuk oleh Allah.

Sesungguhnya perspektif mendasar fikih pangan adalah kepentingan utama penegakan keadilan pangan. Fikih pangan bukanlah sekadar terbatas pada fikih zat pangan berkenaan dengan kehalalan dan keharaman pangan semata, akan tetapi mencakup

pula berbagai macam urusan sosial, ekonomi, dan politik terkait dengan pangan. Dalam hal ini, bisa mengacu pada pandangan Imam Suyuthi bahwa perlu mendasarkan pada kaidah ad-dhararu yuzaal, yaitu: Segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan.

Berkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, Islam mewajibkan Negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang sekarang disebut dengan politik ekonomi. Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan pangan adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu dalam masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka. Dalam kaidah fikih dikatakan “Tasharruf al-imam ‘ala al-raiyah manutun bi al-maslahah,” yakni: Tugas seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah memberikan kemaslahatan.

Fikih pangan melihat bahwa kebutuhan masing-masing individu dalam soal pangan menjadi sangat vital dan bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Dengan kata lain, bukan sekadar meningkatkan taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, tetapi juga aspek distribusi menjadi sangatlah penting agar terjamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia adalah bagian bumi yang terhijau dengan kekayaan alamnya yang menghampar lagi memesonakan dari Sabang hingga Merauke. Semoga lewat fikih pangan akan tercipta semakin banyak kebijakan yang propertanian dan petani demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

D. Pangan Halalan Tayyiban

1. Pengertian Halalan Tayyiban

Kata halal secara etimologi berasal dari kata halla-yahullu-hallan wa halalan wa hulalan yang berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan membolehkan (Dahlan, 1997). Sedangkan secara terminologi dalam kitab Mu'jam Mufradat Alfadh al-Qur'an al-Karim, al-Raghib al-Isfahani mengatakan bahwa halal artinya boleh dan dapat dilakukan karena bebas, atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

Dalam Al-Qur'an, kata halal disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muamalah, kekeluargaan perkawinan, dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki (Nuryati, 2008). Namun demikian kata halal tersebut tidak banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman, dan rezeki. Kata halal dalam Al-Qur'an terkadang juga disifati dengan kata tayyib yang bermakna baik. Kedua kata tersebut disandingkan dan berkaitan antara satu dengan lainnya dalam masalah yang terkait aktivitas manusia secara umum dengan mengarah kepada aktivitas yang banyak dilakukan manusia yakni makanan.

Dalam Al-Qur'an kata halal dan tayyib memberikan isyarat bahwa halal saja tidak cukup namun harus disertai pula dengan adanya nilai kebaikan (tayyib). Ketetapan tentang haram dan halal segala sesuatu, termasuk urusan makanan, adalah hak absolut Allah dan Rasul-Nya (Mayasari, 2007). Sebagaimana yang disinggung di atas bahwa persyaratan halal ini terkait dengan standar syariat yang melegalisasinya, dalam arti boleh secara hukum. Adapun tayyib berkenaan dengan standar kelayakan, kebersihan, dan efek fungsional bagi manusia. Bisa jadi sesuatu itu halal tapi tidak tayyib atau sebaliknya, tayyib (baik) tapi tidak halal. Dua syarat ini mutlak harus terpenuhi (halalan tayyiban) dalam segala sesuatu perbuatan,

termasuk pada makanan atau minuman, atau yang berkaitan dengan sesuatu yang masuk ke tubuh sebagai energi.

Halalan tayyiban merupakan asumsi dasar etika Islam yang akan mempengaruhi perilaku seorang muslim. Sebagaimana makna dari halalan tayyiban yaitu sesuatu yang halal lagi baik. Secara harfiah, halal arti asalnya adalah lepas atau tidak terikat sedang tayyib berarti baik, bagus (al-hasan), sehat (al-mu'afa), dan lezat (al-ladzidz). Setiap yang baik dan sehat itu pasti halal, tetapi belum tentu semua dan setiap yang halal itu baik (Qardhawi, 1980).

Umat Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan tayyib. Tapi sayangnya tak sedikit masyarakat yang mengabaikan hal tersebut karena kekhilafahan mereka atau memang tak peduli dengan anjuran yang ada dalam agama. Halalan tayyiban terdiri dari dua kata yang memiliki arti yang berkaitan. Halalan merupakan bahasa Arab yang memiliki arti tidak terikat atau lepas. Maksudnya makanan yang dikonsumsi harus halalan (halal) yang dapat diartikan makanan yang lepas atau tidak terikat dengan hal hal yang membuat makanan dan minuman dilarang dikonsumsi.

Sementara kata tayyiban juga dari bahasa Arab yang memiliki arti utama, lezat, sehat, baik dan menentramkan. Dengan demikian halalan tayyiban memiliki arti makanan yang baik dan lezat untuk dikonsumsi serta tidak terikat dengan hal-hal yang menyebabkan makanan tersebut dilarang serta tentunya harus menyehatkan. Seperti yang disebutkan dalam QS. 2 (Al-Baqarah) Ayat 172, yaitu:

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

(Hai orang-orang yang beriman santaplah rejeki diantara yang baik-baik yang kami berikan untukmu)

2. Kriteria Pangan Halalan Tayyiban

Pada umumnya setiap jenis makanan dapat dikonsumsi oleh manusia, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

memilih makanan, di antaranya harus memilih makanan yang halal, yaitu: (1) Makanan dari daging hewan yaitu makanan berjenis hewani, (2) Makanan dari tumbuhan yang terdapat di muka bumi makanan nabati, (3) Makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan (Qardhawi, 1980).

Selain itu, kriteria makanan tayyiban dari aspek maknanya perlu juga diketahui. Tayyiban arti makan sehat dan bergizi. Jadi makanan sehat dan bergizi serta menyehatkan merupakan kriteria makanan tayyiban. Oleh karena itu makanan seperti daging babi, anjing, minum arak/khamar yang tidak menyehatkan bukan termasuk makanan tayyiban (Qardhawi, 1980).

3. Manfaat Pangan Halalan Tayyiban

Terkait dengan keberkahan hidup serta dalam hal terkabulnya doa, maka wajib mengkonsumsi makanan halalan tayyiban. Karena jika mengkonsumsi makanan halalan tayyiban dan didapatkan dengan cara yang halal, dapat membuat hidup menjadi lebih barakah dan Insya Allah doa juga akan terkabul. Demikian pula sebaliknya, makanan halalan tayyiban sekalipun jika didapat dengan cara yang tidak halal akan menjadi haram serta juga doa dapat tertahan di langit (Qardhawi, 1980). Makanan yang baik dan diperoleh dengan cara yang baik pula akan membawa sifat yang baik. Sedangkan, jika makanan yang diperoleh dari hal yang tidak baik akan membentuk sifat yang buruk. Hal ini berarti mengkonsumsi makanan halalan tayyiban wajib diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari karena sesuai perintah Al-Qur'an sekaligus untuk membentuk karakter manusia yang baik serta cerdas. Dalam QS. 16 (An-Nahl) Ayat 114 disebutkan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepadaNya sajalah kamu menyembah)

Dalam kehidupan keluarga muslim, menyediakan kebutuhan hidup dengan barang halal lagi baik merupakan sebuah keharusan. Sedari kecil telah diajarkan tentang etika atau adab seorang muslim dalam makan dan minum. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang begitu apik lagi rapi terencana.

Urusan makan dan minum saja, Islam mengatur dengan sangat detail. Misalnya, Islam mengajarkan untuk makan dengan tangan kanan dan melarang makan minum sambil berdiri. Selain itu juga ada larangan berlebih-lebihan dalam urusan makan dan minum, ada pula keharusan untuk memilih makanan dan minuman yang tidak hanya halal tetapi juga baik (tayyib).

Halalan tayyiban sudah seharusnya menjadi standar bagi kita. Bentuk implementasinya adalah mengajarkan sedini mungkin pada anak-anak kita tentang memilih makanan yang halal lagi tayyib. Standar kehalalan meski tampak remeh namun memiliki dampak yang besar terhadap diterimanya ibadah-ibadah kita serta doa-doa yang kita panjatkan. Dalam salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah Ra., disebutkan bahwa:

قال رسول الله: (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا)، وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك

(Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah

memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para Rasul-Nya dengan firman-Nya, Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah. Dan Dia berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabb. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?)

Halalan tayyiban juga menjadi salah satu bukti tentang integral dan holistiknya Islam dalam mengatur hal-hal yang baik bagi manusia dan kehidupannya. Islam juga menjadi sebuah tolak ukur bagaimana kita hanya memberi asupan yang terbaik lagi diridai oleh Allah Swt. Oleh karena itu, kita patut berbangga sebagai seorang muslim karena aturan-aturan yang berkenaan dengan pola makan, mutu makanan, kualitas makanan sangat ketat diatur dalam syariat Islam. Kebudayaan barat telah membuktikan bahwa negara-negara multipower seperti Amerika berjuang keras untuk menurunkan persentase obesitas. Bisa jadi, mereka dipengaruhi oleh budaya berlebih-lebihan (eksesif) dalam makan dan minum.

Persoalan standardisasi halalan tayyiban bukan hanya mengenai menjaga makanan atau minuman agar tidak terkandung bahan-bahan yang diharamkan. Akan tetapi juga telah menjadi etika muslim dalam menentukan standar kualitas dan mutu makanan yang baik, memenuhi standar kesehatan, serta standar bagi sistem pengemasan serta etika lingkungan produsen penghasil makanan.

Namun ironisnya di Indonesia, negeri yang memiliki umat muslim terbanyak di dunia, isu halal hanyalah menjadi topik segelintir orang. Kebutuhan akan standardisasi halalan tayyiban belum menjadi perhatian dari masyarakat sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen. Sebagai contoh, data dari Persatuan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) menyebutkan bahwa dari 744 perusahaan

kosmetik di seluruh Indonesia, baru 23 perusahaan yang memiliki sertifikasi halal atau hanya tiga persen saja. Sisanya, 97 persen kosmetik yang beredar di pasaran tidak jelas.

Sesungguhnya Indonesia harus menjadi leader dalam produk dan standardisasi halal. Sebab konsumen Muslim kita terbesar, sehingga produk-produk di Indonesia harus halal. Hal tersebut diungkapkan sebagai sebuah kritik yang menantang dunia usaha. Indonesia mungkin saat ini tengah menjadi role model bagi isu keberagaman agama, toleransi dan kerukunan umat beragama. Namun sejauh mana nilai-nilai agama itu dijalankan, masih menjadi pertanyaan.

Dalam hal kesadaran, tampaknya Malaysia tengah berada di depan saat ini terkait undang-undang mengenai standardisasi produk halal. Malaysia dipandang oleh ahli ekonomi sebagai sebuah negara yang dinamis dan mengalami masa keemasan. Bisnis dan perbankan syariahnya jauh lebih kuat dan besar dari pada Indonesia. Soal standardisasi halal, Malaysia tidak main-main. Di Negeri Jiran itu kini telah tersedia pendidikan master di bidang Halal Food Analysis. Mereka juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai departemen dalam mempromosikan serta mempermudah sertifikasi halal. Bahkan setiap tahunnya, telah diadakan pameran berskala internasional tentang potensi pasar halal global di Kuala Lumpur. Malaysia rupanya tengah bersiap untuk mengambil kesempatan ini dan bertindak tidak lagi sebagai konsumen, akan tetapi sebagai produsen. Malaysia tidak hanya bertindak sebagai penonton, akan tetapi sebagai pemain.

Pada level masyarakat dan keluarga di negara kita, produk yang halal dan tayyib belum menjadi perhatian, bahkan di tingkat kesadaran saja belum. Dengan penduduk Muslim mayoritas di dalam negeri, masyarakat seolah merasa diri aman dan tenteram asalkan tidak memakan daging babi dan daging anjing.

Masyarakat Muslim di pedesaan maupun perkotaan dalam wilayah-wilayah padat penduduk tanpa disadari banyak mengonsumsi makanan yang bisa jadi halal namun belum tentu tayyib. Standar tayyib sendiri sangat sulit diterapkan tanpa adanya kesadaran diri akan apa-apa yang baik maupun buruk bagi tubuh kita.

Sebagai contoh, seorang yang badannya fit dan berusia muda masih bisa makan Coto Makassar. Namun lain halnya dengan penderita jantung dan hipertensi. Mengonsumsi Coto Makassar dengan kuah kental dan daging jeroan bisa menjadi ancaman baginya. Inilah yang kemudian membuat makanan tersebut jatuh dalam hukum makruh hingga haram.

Contoh lain sebagai ilustrasi, pada bulan Ramadhan biasanya umat muslim sangat menggemari takjil. Misalnya, mereka akan beli lontong dengan bumbu kacang, ditambah dengan tahu berontak yang hangat dengan cabe rawit. Menu yang sudah sangat lumrah bagi kita. Namun kadang kita lupa bahwa Rasulullah Saw. telah membenarkan contoh cara berbuka yang baik. Menyunya sederhana saja, cukup air putih dan kurma sebagai pembuka. Sesungguhnya contoh yang datangnya dari Rasulullah Saw. adalah sebaik-baiknya contoh bagi setiap muslim di muka bumi ini.



BAGIAN II

STUDI FAKTUAL

Bagian Kedua Terdiri Dari Tujuh Bab

- 1. Bab 1.2 :Overview**
- 2. Bab 2.2 :Rujukan Teori**
- 3. Bab 3.2 :Lokasi Penjaringan Data**
- 4. Bab 4.2 :Realitas Sosial Keagamaan**
- 5. Bab 5.2 :Realitas Ketahanan Pangan**
- 6. Bab 6.2 :Kontribusi Sosial Keagamaan**
- 7. Bab 7.2 :Model Penguatan**



OVERVIEW

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Sumber Motivasi Studi
- B. Signifikansi Pelaksanaan Studi
- C. Orisinilitas Studi
- D. Kontribusi Hasil Studi

BAB 1.2

OVERVIEW

A. Sumber Motivasi Studi

Pangan merupakan salah satu isu strategi nasional yang diusulkan untuk dimantapkan di Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 (Bappenas, 2019). Argumennya adalah bahwa pangan itu merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner. Ketahanan pangan di daerah meliputi empat aspek, yaitu: Ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan (Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai, 2020). Keempat aspek ini telah mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah yang ada di Kawasan Bosowasi dan dianggap cukup berhasil dalam menguatkan ketahanan pangan di kawasan tersebut

Keberhasilan tersebut dapat dibuktikan melalui ketersediaan pangan di kawasan tersebut. Ketersediaan pangan di Kawasan Bosowasi dapat dipetakan sebagai berikut: (1) Padi Sawah dan Padi Ladang. Hasil produksi padi sawah di Sinjai 128.777 ton, padi ladang sebesar 0 ton. Di Bone, hasil produksi padi sawah 809.402 ton, padi ladang 3.374 ton. Di Soppeng, hasil produksi padi sawah 225.248 ton, padi ladang 1.186 ton. Di Wajo, hasil produksi padi sawah 619.693 ton, padi ladang 51.287 ton. (2) Jagung dan Kedelai. Hasil produksi jagung di Sinjai 13.340 ton, kedelai 0 ton. Di Bone, hasil produksi jagung 290.960 ton, kedelai 29.398 ton. Di Soppeng, hasil produksi jagung 41.128 ton, kedelai 4.947 ton. Di Wajo, hasil produksi jagung 133.369 ton, kedelai 11.517 ton. (3) Kacang Tanah dan Kacang Hijau. Hasil produk kacang tanah di Sinjai 1.331 ton, kacang hijau 0 ton. Di Bone, hasil produksi kacang tanah 6.665 ton, kacang hijau 1.302 ton. Di Soppeng, hasil produksi kacang tanah 406 ton, kacang hijau 329

ton. Di Wajo, hasil produksi kacang tanah 676 ton, kacang hijau 20.824 ton. (4) Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Hasil produksi ubi kayu di Sinjai 2.354 ton, ubi jalar 2.315 ton. Di Bone, hasil produksi ubi kayu 9.758 ton, ubi jalar 21.688 ton. Di Soppeng, hasil produksi ubi kayu 231 ton, ubi jalar 123 ton. Di Wajo, hasil produksi ubi kayu 10.711 ton, ubi jalar 3.295 ton (BPS Sulawesi Selatan, 2020).

Keberhasilan pemerintah daerah di Kawasan Bosowasi dalam menguatkan ketahanan pangan di kawasan tersebut, dilakukan melalui berbagai program dan strategi. Akan tetapi, dalam melaksanakan program dan strategi tersebut, ternyata aspek sosial keagamaan belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam menguatkan ketahanan pangan, padahal realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Kawasan Bosowasi merupakan pondasi dalam melakukan berbagai program yang berorientasi untuk menyejahterakan masyarakat. Karena itu, jika setiap program dan strategi penguatan ketahanan pangan di daerah tanpa melibatkan realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat akan sulit dilakukan secara berkesinambungan.

Demikian juga dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan seperti yang dipaparkan di atas, pemerintah daerah di Kawasan Bosowasi hanya mengacu pada kemampuan masyarakat di kawasan tersebut untuk mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Sementara kerawanan pangan yang dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis belum mendapatkan perhatian secara serius, terutama dari aspek sosial keagamaan dalam upaya melakukan stabilisasi ketersediaan pangan di Kawasan Bosowasi. Aspek sosial keagamaan merupakan sumber vital dalam membentuk modal sosial guna melakukan stabilisasi terhadap ketersediaan pangan di Daerah.

Sejauh ini studi tentang stabilisasi ketersediaan pangan dari aspek kerawanan pangan dengan pendekatan sosial keagamaan belum menjadi perhatian yang cukup dari para ahli. Beberapa studi

yang telah ada cenderung hanya memerhatikan hal-hal berikut ini, yaitu: Ketersediaan pangan (Darwanto, 2005, Haryadi, 2010, dan Purwantini dkk, 2016), stabilitas ketersediaan pangan (Purwaningsih, 2008, Suryana, 2014, dan Simatupang, 2016), keterjangkauan (akses) pangan (Swantika, 2011 dan Prawoto, 2012), dan pemanfaatan pangan (YP, 2008, Hidayah, 2011, dan Budiyanto, 2012). Sedangkan studi tentang stabilitas ketersediaan pangan yang ada hanya mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Namun terkait dengan masalah kerawanan pangan yang dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis nyaris belum tersentuh dan belum ada studi yang membahas tentang pelibatan sosial keagamaan dalam mengembangkan penguatan ketahanan pangan. Karena itu, studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan merupakan studi yang pertama membahas pelibatan sosial keagamaan dalam penguatan ketahanan pangan dalam konteks lokal dengan unit analisis rumah tangga.

Dalam merangkai pelibatan sosial keagamaan tersebut untuk penguatan ketahanan pangan rumah tangga di daerah dengan kasus di Kawasan Bosowasi, digunakan mediasi norma subjektif dengan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance*. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Alat bantu yang digunakan berupa program aplikasi statistik *Smart-PLS* Versi 3.3.2 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis *variance*. Pelibatan sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di daerah penting untuk dilakukan karena (1) penguatan ketahanan pangan rumah tangga harus dilakukan secara sosial keagamaan karena di Kawasan Bosowasi sangat kental nuansa sosial keagamaannya dalam melakukan suatu kegiatan, (2) pangan merupakan kebutuhan

masyarakat banyak karena itu perlu pelibatan sosial keagamaan (3) perlu perubahan main set masyarakat dari perilaku memberatas lingkungan pangan menjadi bersahabat dengan lingkungan pangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, studi ini mengasumsikan bahwa: (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat di daerah dapat dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan rumah tangga, (2) Penguatan ketahanan pangan yang berorientasi kepada realitas kehidupan sosial keagamaan di daerah melalui mediasi norma subjektif akan lebih mudah dilakukan, dan (3) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi akan lebih mudah dikembangkan jika dilakukan secara sosial keagamaan melalui mediasi norma subjektif.

B. Signifikansi Pelaksanaan Studi

Studi ini dilakukan atas dasar empat alasan utama, dan di sinilah letak signifikansi studi ini dilakukan. Keempat alasan utama tersebut, yaitu:

Pertama, Mengembangkan hasil-hasil studi sebelumnya tentang penguatan ketahanan pangan pada lingkup studi (*setting*) yang baru dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga di daerah yang dilakukan secara sosial keagamaan yang difokuskan pada ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi.

Kedua, Mengarahkan perilaku ketahanan pangan rumah tangga pada level sosial keagamaan, termasuk intervensi di dalam struktur untuk membangun prilaku, nilai, dan sikap baru melalui perubahan pada struktur dan proses penguatan ketahanan pangan rumah tangga di daerah khususnya di Kawasan Bosowasi.

Ketiga, Membantu para penentu kebijakan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga secara sosial keagamaan. Sesungguhnya masyarakat di daerah memiliki pengetahuan dan pengalaman secara sosial keagamaan dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya sendiri. Hanya saja

mereka tidak pernah diberikan pemahaman dan kesadaran untuk membangkitkan potensinya tersebut. Karena itu, studi ini merupakan salah satu sumber rujukan yang dapat membangkitkan potensi masyarakat tersebut.

Keempat, Membantu para mahasiswa untuk mengembangkan konsep, penulisan, dan pengorganisasian konsep yang terkait dengan penguatan ketahanan pangan dalam konteks rumah tangga di daerah secara sosial keagamaan melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif.

C. Orisinilitas Studi

Ketahanan pangan memiliki empat pilar utama (FAO, 1997), yaitu: Ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, keterjangkauan (akses) pangan, dan pemanfaatan pangan. Empat pilar ini dijadikan sebagai acuan untuk memetakan secara tematik hasil-hasil studi terdahulu yang membahas tentang ketahanan pangan dalam rangka untuk menegaskan orisinilitas studi yang akan dilakukan ini. Hasil penelurusan terhadap hasil-hasil studi terdahulu tersebut dapat disajikan seperti berikut ini:

Hasil studi yang membahas tentang ketersediaan pangan, antara lain dilakukan oleh Darwanto (2005), Haryadi (2010), dan Purwantini dkk. (2016). Darwanto (2005) dalam artikelnya mengatakan bahwa untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional, terutama beras sekaligus peningkatan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek diperlukan kebijakan perlindungan petani dengan pembatasan impor, sedangkan untuk jangka panjang kebijakan pembatasan impor tersebut dapat dikurangi secara bertahap namun kebijakan peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai dengan upaya diverifikasi konsumsi atau pangan. Dari aspek penggunaan teknologi, Haryadi (2010) dalam artikelnya mengatakan

bahwa teknologi pangan mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan kemandirian pangan, yaitu sistem ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Khususnya, melalui pengembangan industri penghasil nilai tambah, dalam hal ini industri aneka ragam pangan, berbasis potensi lokal. Dari aspek pemanfaatan lahan, Purwantini dkk (2016) dalam artikelnya mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan peran lahan pekarangan terutama sebagai penyedia pangan dan gizi rumahtangga dan sumber pendapatan tambahan rumahtangga petani serta dalam menjaga keberlanjutan usaha di lahan pekarangan, perlu dilakukan rancangan pemanfaatan pekarangan yang lebih komprehensif.

Hasil studi yang membahas tentang stabilitas ketersediaan pangan, antara lain dilakukan oleh Purwaningsih (2008), Suryana (2014), dan Simatupang (2016). Purwaningsih (2008) dalam artikelnya mengatakan bahwa dalam rangka memupuk cadangan pangan masyarakat, maka perlu untuk menumbuhkan lumbung desa atau meningkatkan fungsi lumbung desa yang telah ada, apalagi bila dilakukan pada desa mandiri pangan yang telah dirintis oleh pemerintah. Keberadaan lumbung pangan diarahkan menuju lumbung desa sebagai sarana untuk pemupukan cadangan pangan masyarakat yang fungsinya adalah mewujudkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Dari aspek menghadapi krisis pangan, Suryana (2014) dalam artikelnya mengatakan bahwa upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan sangat diperlukan mengingat ancaman krisis pangan global masih tetap ada dan dapat secara tiba-tiba menjadi kenyataan. Dengan membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, memanfaatkan teknologi unggul untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan secara efisien dan berdayasaing, dan membangun kekokohandan kelenturan respons masyarakat menghadapi ancaman krisis pangan, Indonesia akan mampu mengatasi ancaman krisis pangan global

ataupun domestik. Dari aspek swasembada pangan, Simatupang (2016) dalam artikelnya mengatakan bahwa strategi swasembada pangan didasarkan pada paradigma ketersediaan pangan terbukti tidak dapat menjamin akses pangan bagi semua keluarga atau individu yang merupakan inti dari ketahanan pangan. Paradigma yang dipandang lebih tepat ialah perolehan pangan yang mencakup dimensi ketersediaan, akses dan penggunaan. Dengan paradigma ini, swasembada pangan berguna untuk ketahanan ketersediaan pangan, namun tidak merupakan keharusan untuk ketahanan pangan sehingga tidak dianjurkan untuk dijadikan sebagai sasaran mutlak kebijakan.

Hasil studi yang membahas tentang pemanfaatan pangan, antara lain dilakukan oleh YP (2008), Hidayah (2011), dan Budiyanto (2012). YP dalam artikelnya mengatakan bahwa (1) Pola diverifikasi konsumsi pangan pokok, yaitu: Beras dan pangan pengganti beras seperti jagung yang dikonsumsi dengan mengikuti pola beras – jagung, beras – ketela pohon, dan beras – jagung – ketela pohon. Pola ini dapat mengurangi ketergantungan pada beras, (2) Konsumsi pangan pokok rumah tangga berbeda antar rumah tangga tergantung dari tinggi rendahnya tingkat pendapatannya, (3) Faktor-faktor yang memengaruhi pola diversifikasi konsumsi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga pedesaan adalah pendapatan rumah tangga, harga pangan, dan jumlah anggota keluarga. Dari aspek diverifikasi pangan, Hidayah (2011) dalam artikelnya mengatakan bahwa masyarakat perkotaan disarankan untuk belajar menerapkan diversifikasi pangan pokok secara bertahap, karena secara tidak langsung dapat membantu terwujudnya ketahanan pangan. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan efikasi diri pangan, yaitu kemampuan yang diperoleh untuk melakukan perubahan pola makan. Masyarakat pedesaan disarankan untuk menambah variasi pengolahan pangan non beras yang selama ini sudah dikonsumsi sehingga tidak timbul kebosanan. Pemerintah

daerah disarankan untuk menyampaikan sosialisasi pentingnya manfaat diversifikasi kepada masyarakat, sehingga motivasi penerapan diversifikasi yang selama ini sudah dilakukan berubah dari ekstrinsik menjadi intrinsik. Dari aspek pemanfaatan pangan alternatif. Budiyanto (2012) dalam artikelnya mengatakan bahwa perlunya melakukan penyempurnaan draft model pengembangan ketahanan pangan berbasis pisang melalui revitalisasi nilai kearifan lokal dan penguatan kelembagaan kelompok tani. yang dilanjutkan dengan evaluasi, revisi, dan review pakar, sehingga model pengembangan ketahanan pangan berbasis pisang melalui revitalisasi nilai kearifan lokal dan penguatan kelembagaan kelompok tani bersifat applicable.

Hasil studi yang membahas tentang akses pangan, antara lain dilakukan oleh Swantika (2011) dan Prawoto (2012). Swantika (2011) dalam artikenya mengatakan bahwa penerapan program ketahanan pangan yang masih bergantung pada pangan impor belum berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya sehingga mereka belum mampu keluar dari perangkap kemiskinan. Karena itu, strategi alternatif yang prospektif adalah membangun kemandirian dan kedaulatan pangan, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ditopang oleh industri berbasis pertanian, skim kredit lunak, dan pembangunan infrastruktur di perdesaan. Kehadiran industri pertanian di perdesaan akan menciptakan pasar bagi produk pertanian primer dan lapangan kerja baru di perdesaan. Dari aspek pemberdayaan masyarakat, Prawoto (2012) dalam artikelnya mengatakan bahwa program pengembangan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan dan pemberdayaan masyarakat terasing berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat, yaitu identifikasi permasalahan ekonomi yang dihadapi, prospek pengembangan dan kendala yang dihadapi pada tiap unit usaha

dapat dirumuskan program pengembangan potensi ekonomi atau produk unggulan masyarakat di pedesaan.

Ternyata hasil-hasil studi terdahulu cenderung membahas tiga hal, yaitu: Ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan dan pemanfaatan pangan. Terfokus pada hasil studi yang membahas tentang stabilitas ketersediaan pangan, antara lain dilakukan oleh Purwaningsih (2008), Suryana (2014), dan Simatupang (2016). Ketiga hasil studi ini hanya membahas aspek cadangan pangan, aspek menghadapi krisis pangan, dan aspek swasembada pangan. Tiga aspek ini hanya mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Namun terkait dengan kerawanan pangan yang dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis dengan melibatkan aspek pelibatan sosial keagamaan belum dibahas sama sekali, Hasil studi yang ada belum ada yang membahas tentang pelibatan sosial keagamaan dalam penguatan ketahanan pangan. Karena itu, studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan merupakan studi yang pertama membahas pelibatan sosial keagamaan dalam penguatan ketahanan pangan dalam konteks lokal dan di sinilah letak orisinalitas studi yang dilakukan ini.

D. Kontribusi Hasil Studi

Studi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah untuk menguatkan ketahanan pangan secara sosial keagamaan melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif. Studi ini berkaitan erat dengan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi lokal tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Lebih dari itu, studi ini juga merupakan referensi penetapan kebijakan pengembangan, sistem evaluasi, dan sistem kontrol ketahanan pangan rumah tangga di daerah.

Studi ini akan bermanfaat dalam merumuskan model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di daerah secara sosial keagamaan melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga untuk kemajuan masyarakat di daerah.



RUJUKAN TEORI

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Konsep Struktur Sosial
- B. Teori Konstruksi Sosial
- C. Teori Perubahan Sosial
- D. Konsep Falah Dalam Islam
- E. Konsep Agama Dan Kearifan Lokal
- F. Teori Planned Behavior
- G. Konsep Ketahanan Pangan

BAB 2.2

RUJUKAN TEORI

Dalam menginterpretasi data yang telah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan angket digunakan teori dan atau konsep yang relevan. Teori dan atau konsep yang digunakan, diangkat dengan berpedoman pada asumsi yang ditawarkan untuk dibuktikan sebagaimana yang dituangkan pada Bab sebelumnya (Bab 2.1: Overview). Teori dan atau konsep yang digunakan untuk menginterpretasi data yang telah dikumpulkan tersebut, yaitu: Konsep struktur sosial, teori konstruksi sosial, teori perubahan sosial, konsep falah dalam Islam. Sedangkan teori dan atau konsep yang digunakan untuk menyusun angket dalam mengumpulkan data, yaitu: Konsep agama dan nilai kearifan lokal, teori Planned Behavior, dan konsep ketahanan pangan.

A. Konsep Struktur Sosial

Struktur sosial merupakan salah satu konsep kunci dalam ilmu sosial. Alasan menggunakan konsep ini bahwa rumah tangga (dibatasi hanya pada keluarga) sebagai unit analisis dalam membahas ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi merupakan lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat sehingga masyarakat sulit untuk meninggalkan lembaga yang dibangunnya sendiri tanpa ada perubahan sosial yang terjadi pada mereka sehingga memaksa mereka untuk meninggalkannya. Karena itu, konsep struktur sosial digunakan untuk membahas hal tersebut dan didukung dengan beberapa teori, juga diuraikan dalam Bab ini. Konsep struktur sosial dapat disajikan uraiannya seperti di bawah ini:

1. Pengertian Struktur Sosial

Istilah struktur berasal dari kata Latin *structum* yang artinya menyusun (Abercrombie, 2011). Sekilas dapat dipahami bahwa

struktur sosial adalah susunan masyarakat. Kata susunan artinya tatanan yang sistematis, dapat berbentuk vertikal atau horizontal atau kombinasi keduanya. Jika yang dipikirkan adalah struktur organisasi, maka akan ditemukan beberapa posisi dan peran yang beragam dalam sebuah struktur. Struktur masyarakat juga menggambarkan adanya beragam peran sosial yang dimainkan oleh tiap individu sebagai bagian dari kesatuan masyarakat. Dalam memainkan perannya, individu tersebut menganut nilai-nilai yang menjadi orientasinya (Johnson, 1986).

Struktur sosial menurut para ahli, antara lain dikemukakan oleh Soemardjan (1974). Menurut Soemardjan (1974) bahwa struktur sosial itu merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Soekanto (1983), menurutnya bahwa struktur sosial itu merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial pokok, yang meliputi: Kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan kekuasaan dan wewenang. Sedangkan Kornblum (2000) mengemukakan bahwa struktur sosial adalah susunan yang dapat terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku individu. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Parson (1939), ia mengatakan bahwa struktur sosial adalah suatu proses sosial yang melibatkan hubungan antara manusia yang membentuk suatu tingkatan. Hubungan ini terjadi secara terus-menerus sehingga masyarakat terstruktur layaknya suatu organisasi.

Dari pengertian-pengetian yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial adalah suatu fenomena sosial yang merupakan susunan lembaga-lembaga sosial, lembaga yang dibentuk secara sengaja oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keteraturan sosial dengan mengatur hubungan-hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi berbagai macam

kebutuhan hidup mereka. Keteraturan sosial ini juga merujuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk atau cara yang sama.

Oleh karena itu, struktur sosial dapat dipergunakan untuk menggambarkan keteraturan sosial, merujuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk atau cara yang sama, karena diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. Interaksi dalam sistem sosial dirumuskan secara lebih terperinci dengan menjabarkan manusia yang menempati posisi-posisi dan melaksanakan peranannya.

Soemardjan (1974) mengatakan bahwa struktur sosial itu meliputi: (1) relasi sosial antar individu, dan (2) perbedaan individu serta kelas sosial menurut peranan sosial mereka. Sedangkan cara-cara tentang bagaimana mekanisme hubungan-hubungan itu dalam mengatur hidup segenap individu persekutuan hidup dan sifat-sifat persekutuan hidup di atas adalah merupakan fungsi sosial mereka. Konsep struktur dan fungsi itu sangat penting, karena itu suatu aktivitas akan jelas apabila dibuktikan memiliki fungsi guna memelihara struktur sosial.

Selain hal tersebut, struktur sosial suatu masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto (1983) juga memiliki berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga didalamnya dimana banyak orang ikut mengambil bagian, lembaga dimaksudkan sebagai hubungan-hubungan tertentu yang timbul dari aktifitas orang-perorangan atau kelompok yang hendak mencapai tujuan bersama. Struktur sosial baik menyangkut kelompok maupun lembaga berdiri pada dasar yang definitif. Pada kehidupan masyarakat yang relatif masih sederhana seperti gender, usia, kekerabat, dan kesatuan atas dasar kedaerahan dianggap merupakan dasar-dasar yang paling pokok dari suatu struktur sosial. Namun dalam masyarakat yang lebih modern, orientasi manusia dalam mengisi kehidupannya adalah mereka cenderung untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupannya.

Mekanisme yang menunjukkan kecenderungan itu adalah dengan lebih memberdayakan segenap potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian struktur sosial itu adalah aspek sosial yang relatif statis daripada aspek prosedural atau fungsional dari sistem tersebut. Dari semua keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya struktur sosial itu merupakan suatu jaringan dari unsur-unsur sosial pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur pokok tersebut menurut Soekanto (1983), mencakup: (1) kelompok sosial, (2) lembaga sosial, (3) stratifikasi sosial, (4) mobilitas sosial, dan (5) kebudayaan.

2. Unsur-Unsur Struktur Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat yang tertata dalam suatu struktur yang cenderung bersifat tetap. Struktur sosial dalam kehidupan masyarakat itu diharapkan dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan tercipta suatu keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Struktur sosial tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Unsur-unsur struktur sosial menurut Loomis (1967), yaitu: (1) adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat, (2) adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat, (3) adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat, (3) adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku, (4) adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat, (6) adanya kekuasaan, berupa kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan, sehingga sistem sosial dapat berlanjut, (7) adanya tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat, (8) adanya sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman dalam

sistem sosial, sehingga norma tetap terpelihara, (9) adanya sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial, seperti pranata sosial dan lembaga, dan (10) adanya sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga masyarakat.

3. Ciri-Ciri Struktur Sosial

Segala sesuatu pasti memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan dengan sesuatu yang lain. Misalnya masyarakat desa mempunyai ciri-ciri unik, seperti gotong royong, kebersamaan, tidak ada spesialisasi dalam pembagian kerja, dan lain-lain yang membedakan dengan masyarakat perkotaan yang cenderung individualistis dan adanya pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian. Begitupun juga dalam struktur sosial.

Ciri-ciri struktur sosial menurut Syani (1995) antara lain: (1) Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang kemungkinan besar dilakukan secara organisatoris, (2) Struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu. Artinya segala bentuk pola interaksi sosial dalam masyarakat telah tercakup dalam suatu struktur sosial, (3) Struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat. Artinya semua karya, cipta, dan rasa manusia sebagai anggota masyarakat merupakan aspek dari struktur sosial. Misalnya komputer, alat-alat pertanian modern, mobil, pesawat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, (4) Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis, sehingga dapat dilihat sebagai kerangka tatanan dari berbagai bagian tubuh yang membentuk struktur. Misalnya dalam sebuah organisasi terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang kesemuanya membentuk suatu struktur, dan (5) Struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian; Pertama, di dalam struktur sosial

terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan. Kedua, dalam setiap perubahan dan perkembangan tersebut terdapat tahap perhentian, di mana terjadi stabilitas, keteraturan, dan integrasi sosial yang berkesinambungan sebelum kemudian terancam oleh proses ketidakpuasan dalam tubuh masyarakat.

Selain ciri-ciri tersebut, Syani (1995) juga mengungkapkan beberapa sifat dari struktur sosial, antara lain: (1) muncul pada kelompok masyarakat. Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam suatu sebuah kelompok atau masyarakat. Pada setiap sistem sosial terdapat macam-macam status dan peran individu. Status yang berbeda-beda itu merupakan pencerminan hak dan kewajiban yang berbeda pula, (2) berkaitan erat dengan kebudayaan. Kelompok masyarakat lama kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Indonesia mempunyai banyak daerah dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan beraneka ragam struktur sosial yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sementara hal-hal yang dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Syani (1995), yaitu: (1) Keadaan geografis. Kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Masyarakatnya kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lain, (2) Mata pencaharian. Masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian yang beragam, antara lain sebagai petani, nelayan, ataupun sektor industri, (3) Pembangunan. Pembangunan dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia. Misalnya pembangunan yang tidak merata antara daerah dapat menciptakan kelompok masyarakat kaya dan miskin, dan (4) Dapat berubah dan berkembang. Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan

individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karenanya, struktur yang dibentuk oleh mereka pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Fungsi Struktur Sosial

Selain ciri-ciri yang disebutkan di atas, struktur sosial juga memiliki fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi struktur sosial menurut Koentjaraningrat (1988), terdiri dari tiga, yaitu: Fungsi identitas, kontrol, dan pembelajaran. Penjelasan ketiga fungsi tersebut, dapat disajikan seperti dibawah ini:

4.1. Fungsi Identitas

Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya.

4.2. Fungsi Kontrol

Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar aturan. Pelanggaran aturan akan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang pahit.

4.3. Fungsi Pembelajaran

Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan dan kedisiplinan.

5. Bentuk-Bentuk Struktur Sosial

Selain fungsi-fungsi struktur sosial yang disebutkan di atas, Struktur sosial juga memiliki bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk tersebut, antara lain:

5.1. Kelompok Sosial

Kelompok sosial menurut Smelser (1981) adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relative kecil yang hidup secara guyub. Ada juga beberapa kelompok sosial yang dibentuk secara formal dan memiliki aturan-aturan yang jelas. Berdasarkan struktur kelompok dan proses sosialnya, maka kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa karakter yang penting. Ada empat kelompok sosial yang dapat dibagi berdasarkan struktur masing-masing kelompok menurut Smelser (1981), yaitu:

Pertama, Kelompok Formal-sekunder. Kelompok sosial yang umumnya bersifat sekunder, formal, memiliki aturan dan struktur yang tegas, serta dibentuk berdasarkan tujuan-tujuan yang jelas pula. Kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Adanya kesadaran anggota bahwa ia adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan, (2) Setiap anggota memiliki hubungan timbal balik dengan anggota lainnya dan bersedia melakukan hubungan-hubungan fungsional diantara mereka, (3) Setiap anggota kelompok menyadari memiliki faktor-faktor kebersamaan diantara mereka, di mana kebersamaan ini mendorong kohesifitas kelompok itu sendiri, (4) Kelompok sosial ini memiliki struktur yang jelas dan tegas, termasuk juga prosedur suksesi dan kaderisasi, (5) Memiliki aturan formal yang mengikat setiap anggota kelompok dalam struktur yang ada termasuk juga mengatur mekanisme struktur dan sebagainya, (6) Anggota dalam kelompok formal-sekunder memiliki pola dan pedoman perilaku sebagaimana diatur oleh kelompok secara umum, (7) Kelompok sosial ini memiliki sistem kerja yang berpola, berstruktur, dan berproses dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok, (8) Kelompok

sosial formal-sekunder memiliki kekuatan mempertahankan diri, mengubah diri (adaptasi), rehabilitasi diri, serta kemampuan menyerang kelompok lain, (9) Kelompok sosial formal-sekunder memiliki masa (umur) hidup yang dikendalikan oleh faktor-faktor internal dan eksternal,

Kedua, Kelompok formal-primer. Kelompok sosial yang umumnya bersifat formal namun keberadaannya bersifat primer. Kelompok ini tidak memiliki aturan yang jelas, walaupun tidak dijalankan secara tegas. Begitu juga kelompok sosial ini memiliki struktur yang tegas walaupun fungsi-fungsi struktur ini diimplementasikan secara guyub. Terbentuknya kelompok ini didasarkan oleh tujuan-tujuan yang jelas ataupun tujuan yang abstrak. Contoh dari kelompok formal primer adalah keluarga inti, kelompok kekerabatan dan kelompok-kelompok primordial,

Ketiga, Kelompok Informal-Sekunder. Kelompok sosial yang umumnya informal namun keberadaannya bersifat sekunder. Kelompok ini bersifat tidak mengikat, tidak memiliki aturan dan struktur yang tegas serta dibentuk berdasarkan sesaat dan tidak mengikat bahkan bisa terbentuk walaupun memiliki tujuan-tujuan yang kurang jelas. Contoh kelompok ini adalah klik, kelompok persahabatan, kelompok anak muda (geng), kelompok percintaan (pacaran), dan semacamnya,

Keempat, Kelompok Informal-Primer. Kelompok sosial yang terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial formal-primer atau disebabkan karena pembentukan sifat-sifat di luar kelompok formal-primer yang tidak dapat ditampung oleh kelompok formal-primer. Kelompok ini juga merupakan bentuk lain dari kelompok informal-sekunder terutama menonjol di hubungan-hubungan mereka yang sangat pribadi dan mendalam.

Smelser (1981) lebih lanjut menjelaskan bahwa selain empat tipe kelompok sosial di atas, tipe lain dari kelompok sosial dapat pula didasarkan atas jumlah (besar kecilnya jumlah anggota), wilayah

(desa, kota, negara), kepentingan (tetap atau permanen atau sementara), derajat interaksi (erat atau kurang eratnya hubungan) atau kombinasi dari ukuran yang ada. Pada umumnya kelompok sosial di atas adalah kelompok sosial yang teratur, artinya mudah diamati dan memiliki struktur yang relatif jelas.

Ada pula kelompok sosial yang tidak teratur, artinya sulit diamati strukturnya dan sifatnya sementara seperti kerumunan dan publik. Kerumunan merupakan kelompok manusia yang terbentuk secara kebetulan, tiba-tiba dalam suatu tempat dan waktu yang sama karena kebetulan memiliki pusat perhatian yang sama. Pada kerumunan, umumnya tidak ada interaksi sosial di antara orang-orang, begitu juga di antara mereka tidak ada ikatan sosial yang mendalam walaupun mungkin memiliki perasaan yang sama dengan orang lain yang berada di tempat yang sama itu (Smelser, 1981).

Sebagaimana kenyataannya, Smelser (1981) mengatakan bahwa manusia pada awalnya lahir dalam kelompok formal-primer yaitu keluarga, di mana kelompok ini disebut sebagai salah satu dari jenis kelompok-kelompok kecil yang paling berkesan bagi setiap individu. Isolasi kehidupan individu dalam keluarga tak bertahan lama, karena seiring dengan perkembangan fisik, intelektual, pengalaman dan kesempatan, individu mulai melepas hubungan-hubungan keluarga dan memasuki dan menyebar untuk menjalankan berbagai kegiatannya dan bertemu dengan manusia lain yang memiliki kesamaan tujuan, kepentingan, dan berbagai aspirasi lainnya. Dalam proses pelepasan tersebut, membentuk kelompok lainnya individu, lalu beradaptasi. Di dalam kelompok, masing-masing anggota berkomunikasi, saling berinteraksi, saling pengaruh memengaruhi satu dengan lainnya.

Pergaulan dalam kelompok tersebut memengaruhi dan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang melembaga bagi setiap anggota kelompok, kebiasaan itu menciptakan pola perilaku yang dilakukan terus-menerus. Perilaku yang sudah berpola-pola itu akan

membentuk sikap setiap anggota kelompok. Kebiasaan yang melembaga, perilaku, dan sikap tersebut berjalan secara simultan di antara individu dan kelompok. Berger dan Lukmann (1966) mengatakan bahwa proses konstruksi sosial yang terjadi secara simultan dalam tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Sehingga pada tahap berikutnya individu akan menginternalisasikan semua sikap dan perilaku yang diperoleh dari kelompoknya dalam kehidupan pribadinya.

5.2. Lembaga Sosial

Lembaga sosial menurut Sanderson (2000), adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat. Lembaga sosial memungkinkan setiap struktur dan fungsi serta harapan-harapan setiap anggota dalam masyarakat dapat berjalan, dan memenuhi harapan sebagaimana yang disepakati bersama. Dengan kata lain lembaga sosial digunakan untuk menciptakan ketertiban.

Wujud konkret dari lembaga sosial yang dikemukakan Sanderson (2000), adalah aturan, norma, adat istiadat dan semacamnya yang mengatur kebutuhan masyarakat dan telah terinternalisasi dalam kehidupan manusia, dengan kata lain lembaga sosial adalah sistem norma yang telah melembaga atau menjadi kelembagaan di suatu masyarakat. Misalnya, kebutuhan orang terhadap penyembuhan penyakit, menghasilkan kedokteran, perdukunan, penyembuhan alternatif. Sanderson (2000) lebih lanjut menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap pendidikan bagi anggota keluarganya, melahirkan pesantren, taman pendidikan bagi anggota keluarganya, melahirkan pesantren, taman kanak-kanak, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan lainnya. Kebutuhan akan mata pencaharian, menimbulkan sistem mata pencaharian pertanian, peternakan, koperasi, industri. Kebutuhan manusia terhadap perkawinan, melahirkan sistem perkawinan dan keluarga. Kebutuhan akan keindahan, menimbulkan kesusastraan, kesenian. Kebutuhan

kesehatan jasmani, menimbulkan lembaga pemeliharaan kesehatan, kedokteran kecantikan, dan lainnya.

5.3. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial menurut Soekanto (2002), adalah struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Lapisan sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Secara fungsional, lahirnya strata sosial ini karena kebutuhan masyarakat terhadap sistem produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di setiap strata, di mana sistem produksi itu mendukung secara fungsional masing-masing strata.

Lebih lanjut Soekanto (2002) menjelaskan dengan mengutip dari Pitirim Sorokin bahwa stratifikasi sosial itu adalah perbedaan penduduk dan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat, yaitu kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah. Setiap masyarakat selalu mempunyai lapisan, mulai yang sederhana sampai yang rumit, tergantung dari teknologi yang dikuasai masyarakat tersebut. Dalam masyarakat yang kompleks, maka perbedaan kedudukan dan peranan juga bersifat kompleks.

Secara umum, strata sosial di masyarakat menurut Soekanto (2002), melahirkan kelas-kelas sosial yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu atas (*upper class*), menengah (*middle class*), dan bawah (*lower class*). Kelas atas mewakili kelompok elite di masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas. Kelas menengah mewakili kelompok profesional, kelompok pekerja, wiraswastawan, pedagang, dan kelompok fungsional lainnya. Sedangkan kelas bawah mewakili kelompok pekerja kasar, buruh harian, buruh lepas, dan semacamnya. Secara khusus, kelas sosial ini terjadi pada lingkungan-lingkungan khusus pada bidang tertentu sehingga content varian strata sosial sangat spesifik berlaku pada lingkungan itu. *Content varian* lebih banyak menyangkut varian strata dalam satu lingkungan yang membedakannya dengan strata pada lingkungan lainnya. Jadi, apabila kelas sosial di suatu lingkungan sosial menempati struktur

strata yang paling tinggi belum tentu kelas yang sama terjadi pada strata sosial lainnya di tempat lain pula.

Kelas sosial dengan strata sosial tertentu adakalanya terbentuk dengan sendirinya, ada pula yang dibentuk berdasarkan hukumnya. Strata kelas sosial yang terbentuk dengan sendirinya adalah berdasarkan pada kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat, harta dalam batas-batas tertentu. Sedangkan strata kelas sosial yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu adalah seperti pemimpin dan yang dipimpin, yang memiliki kekayaan dan yang tidak, dan yang memiliki kekuasaan atau yang rakyat biasa. Dasar pembentukan kelas sosial menurut Soekanto (2002), yaitu: (1) ukuran kekayaan, (2) ukuran kepercayaan, (3) besaran kekuasaan, (4) ukuran keselamatan, dan (5) ukuran ilmu pengetahuan dan pendidikan.

5.4. Mobilitas Sosial

Narwoko dan Uyanto (2004) mengutip dari Horton dan Hunt bahwa mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke kelas sosial lainnya. Mobilitas bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan biasanya termasuk pula segi penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok.

Dengan demikian, secara umum ada tiga jenis mobilitas sosial, yaitu gerak sosial yang meningkat (*social climbing*), gerak sosial menurun (*social sinking*), dan gerak sosial horizontal. Ketiga jenis mobilitas sosial ini dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja sesuai dengan bagaimana seseorang mengekspresikan lingkungan sosial dan bagaimana lingkungan sosial mengekspresikan seseorang secara timbal balik.

5.5. Kebudayaan

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1988), adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian,

maka kebudayaan adalah hasil nyata dari sebuah proses sosial yang dijalankan oleh manusia bersama masyarakatnya.

Pernyataan di atas sejalan dengan Soemardjan (1974) bahwa kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya, yakni masyarakat menghasilkan *material culture* seperti teknologi dan karya-karya kebendaan atau budaya materi (fisik) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai dan menundukan alam sekitarnya, sehingga budaya yang bersifat fisik ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Soemardjan (1974) lebih lanjut menjelaskan bahwa rasa merupakan *spirial culture* (nonfisik) yang meliputi unsur mental dan kejiwaan manusia. Rasa menghasilkan kaidah-kaidah, nilai-nilai sosial, hukum, dan norma sosial atau yang disebut dengan pranata sosial. Apa yang dihasilkan rasa digunakan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Misalnya agama, kesenian, ideologi, kebatinan, dan sebagainya. Sementara itu, cipta merupakan *immaterial culture* yang menghasilkan pranata sosial, namun cipta yang menghasilkan gagasan, berbagai teori, wawasan dan semacamnya yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan karsa menurut Soemardjan (1974), merupakan kemampuan untuk menempatkan karya, rasa, dan cipta, pada tempatnya agar sesuai dengan kegunaan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian karsa adalah kecerdasan dalam menggunakan karya, rasa dan cipta secara fungsional sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lebih bagi manusia dan masyarakat secara luas.

B. Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial atas realitas (*Social Construction of Reality*) menurut Berger dan Luckmann (1966), adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial

yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer, dicetuskan oleh Berger dan Luckmann (1966). Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (penalaran teoritis yang sistematis), bukan merupakan suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Pemikiran Berger dan Luckmann dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi lain, seperti Schutzian tentang fenomenologi, Weberian tentang makna-makna subjektif, Durkhemian – Parsonian tentang struktur, pemikiran Marxian tentang dialektika, serta pemikiran Herbert Mead tentang interaksi simbolik.

Asal usul konstruksi sosial menurut Suparno (1997), yaitu dari filsafat konstruktivisme, yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, dan Plato menemukan akal budi. Gagasan tersebut semakin konkret setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dapat dibuktikan kebenarannya, serta kunci pengetahuan adalah fakta. Suparno (1997) mengutip ungkapan Aristoteles: *Cogito ergo sum*, yang artinya saya berfikir karena itu saya ada, menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini.

Lebih lanjut Suparno (1997) menjelaskan bahwa seorang epistemolog dari Italia bernama Giambattista Vico, yang merupakan pencetus gagasan-gagasan pokok Konstruktivisme, dalam *De Antiquissima Italorum Sapientia*, mengungkapkan filsafatnya bahwa

Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Menurutnya, hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya Ia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa Ia membuatnya, sementara itu orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya.

Suparno (1997) mengemukakan bahwa ada tiga macam Konstruktivisme, yaitu: (1) Konstruktivisme radikal, hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita, dan bentuknya tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologism obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif, (2) Realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki, dan (3) Konstruktivisme biasa, mengambil semua konsekuensi konstruktivisme, serta memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas obyektif dalam dirinya sendiri.

Dari ketiga macam konstruktivisme terdapat kesamaan, dimana konstruktivisme dilihat sebagai proses kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Kemudian Individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihatnya berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang disebut dengan konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann (1966).

Berger dan Luckman (1966) berpendapat bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, walaupun masyarakat dan institusi sosial

terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semua dibentuk dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas dapat terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain, yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidup menyeluruh yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial, serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Berger dan Luckman (1966) mengemukakan bahwa realitas sosial memiliki tiga bentuk, yaitu: (1) Realitas sosial objektif, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) gejala-gejala sosial, seperti tindakan dan tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta, (2) Realitas sosial simbolik, merupakan ekspresi bentuk-bentuk simbolik dari realitas objektif, yang umumnya diketahui oleh khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi serta berita-berita di media, dan (3) Realitas sosial subjektif, merupakan realitas sosial pada individu, yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial.

Setiap peristiwa merupakan realitas sosial objektif dan merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Realitas sosial objektif ini diterima dan diinterpretasikan sebagai realitas sosial subjektif dalam diri pekerja media dan individu yang menyaksikan peristiwa tersebut. Pekerja media mengkonstruksi realitas subjektif yang sesuai dengan seleksi dan preferensi individu menjadi realitas objektif yang ditampilkan melalui media dengan menggunakan simbol-simbol. Tampilan realitas di media inilah yang disebut realitas sosial simbolik

dan diterima pemirsa sebagai realitas sosial objektif karena media dianggap merefleksikan realitas sebagaimana adanya.

Menurut Berger dan Luckmann (1966) bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat yang telah membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat. Manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis yang simultan, yaitu:

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*Society is a human product*),

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai (baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia), berupa realitas objektif yang mungkin akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*) atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*Man is a social product*).

Eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi adalah dialektika yang berjalan simultan, artinya ada proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian terdapat proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif. Pemahaman akan realitas yang dianggap objektif pun terbentuk, melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi, individu dibentuk sebagai produk sosial. Sehingga dapat dikatakan, setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya.

C. Teori Perubahan Sosial

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu menurut Sihabudin (2011), ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat pendukungnya. Gerak perubahan yang sedemikian itu disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat sederhana ke dalam masyarakat modern. Proses gerak perubahan tersebut ada dalam satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern. Berangkat dari pemikiran teori evolusi Comte tentang perubahan sosial. Sihabudin (2011) mengutip dari Martindale, menyebutkan bahwa titik tolak pemikiran Comte adalah pandangannya tentang masyarakat dengan memanfaatkan konsep-konsep biologi, yakni: (1) Masyarakat berkembang secara linier (searah), yakni dari primitif ke arah masyarakat yang lebih maju, (2) Proses evolusi yang dialami masyarakat mengakibatkan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap perubahan nilai-nilai dan berbagai anggapan yang dianut masyarakat, (3) Pandangan subjektif tentang nilai dibaurkan dengan tujuan akhir perubahan sosial. Hal ini terjadi karena masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan memiliki label yang baik dan lebih sempurna, seperti kemajuan, kemanusiaan, dan sivilisasi, dan (4)

Perubahan sosial yang terjadi dari masyarakat sederhana ke arah masyarakat modern berlangsung lambat, tanpa menghancurkan fondasi yang membangun masyarakat, sehingga memerlukan, sehingga memerlukan waktu yang panjang.

Berkaitan hal di atas, Sihabuddin (2011) menjelaskan bahwa perubahan sosial sudah diperkenalkan oleh beberapa ahli teoritis sosiologi klasik, antara lain: Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, dan George Simmel. Keempatnya membahas masalah kemunculan dari pengaruh modernitas. Menurut Marx, bahwa modernitas ditentukan oleh ekonomi kapitalis, ia mengakui kemajuan yang ditimbulkan oleh transisi masyarakat sebelumnya ke masyarakat kapitalisme. Namun dalam karya-karyanya, sebagian besar perhatiannya ditujukan untuk mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan kecacatannya berkaitan alienasi dan eksploitasi. Menurut Weber, masalah kehidupan modern yang paling menentukan adalah perkembangan rasionalitas formal. Rasional formal yang dimaksudkan Weber, meliputi proses berfikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Dalam hal ini pilihan dibuat dengan merujuk pada kebiasaan, peraturan, dan hukum yang diterapkan secara universal. Ketiganya berasal dari berbagai struktur berskala besar, terutama struktur birokrasi dan ekonomi. Keadaan rasionalitas inilah mengakibatkan munculnya kerangkeng-besi rasionalitas. Manusia semakin terpenjara dalam kerangkeng-besi ini dan akibatnya semakin tak mampu mengungkapkan beberapa ciri kemanusiaan mereka yang paling mendasar

Menurut Ogburn (1922) perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Kebudayaan materil adalah sumber utama kemajuan. Aspek kebudayaan non-materil harus menyesuaikan diri dengan perkembangan kebudayaan materil, dan jurang pemisah antara

keduanya akan menjadi masalah sosial. Menurut Ogburn (1922) bahwa teknologi adalah mekanisme yang mendorong perubahan, manusia selamanya berupaya memelihara dan menyesuaikan diri dengan alam yang senantiasa diperbaharui oleh teknologi. Ogburn (1922) memusatkan perhatian pada perkembangan teknologi dan ia menjadi terkenal karena mengembangkan ide mengenai ketertinggalan budaya dan penyesuaian tak terelakkan dari faktor-faktor kebudayaan terhadap teknologi.

Teori Materialis yang disampaikan oleh Ogburn (1922) pada intinya mengemukakan bahwa: (1) Penyebab dari perubahan adalah adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa yang mempengaruhi pribadi mereka, (2) Meskipun unsur-unsur sosial satu sama lain terdapat hubungan yang berkesinambungan, namun dalam perubahan ternyata masih ada sebagian yang mengalami perubahan tetapi sebagian yang lain masih dalam keadaan tetap (statis). Hal ini juga disebut dengan istilah *cultural lag*, ketertinggalan menjadikan kesenjangan antar unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan yang berubah lambat. Kesenjangan ini akan menyebabkan kejutan sosial pada masyarakat. Ketertinggalan budaya menggambarkan bagaimana beberapa unsur kebudayaan tertinggal di belakang perubahan yang bersumber pada penciptaan, penemuan dan difusi. Teknologi, menurut Ogburn, berubah terlebih dahulu, sedangkan kebudayaan berubah paling akhir. Dengan kata lain kita berusaha mengejar teknologi yang terus menerus berubah dengan mengadaptasi adat dan cara hidup kita untuk memenuhi kebutuhan teknologi. Teknologi menyebabkan terjadinya perubahan sosial cepat yang sekarang melanda dunia. Perubahan teknologi akan lebih cepat dibanding dengan perubahan pada perubahan budaya, pemikiran, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma yang menjadi alat untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu, perubahan seringkali menghasilkan kejutan sosial yang

yang pada gilirannya akan memunculkan pola-pola perilaku baru, meskipun terjadi konflik dengan nilai-nilai tradisional.

Ogburn (1922) mengusulkan suatu pandangan mengenai perubahan sosial yang didasarkan pada teknologi. Menurutnya teknologi mengubah masyarakat melalui lima proses, yaitu: (1) Penciptaan. Ogburn (1922) mendefinisikan penciptaan sebagai suatu kombinasi unsur dan bahan yang ada untuk membentuk unsur dan bahan yang baru. Kita biasanya hanya memikirkan penciptaan sebagai suatu yang bersifat materiil seperti komputer, namun ada juga yang disebut dengan penciptaan sosial, contoh kapitalisme, birokrasi, korporasi, dan lain-lain, (2) Penemuan. Ogburn (1922) mengidentifikasi penemuan sebagai suatu cara baru melihat kenyataan, sebagai suatu proses perubahan kedua. Kenyataannya sendiri sudah ada, tetapi orang baru melihatnya tetapi orang baru melihatnya untuk pertama kali. Salah satu contohnya adalah penemuan Amerika Utara oleh Columbus, yang membawa konsekuensi besar sehingga mengubah perjalanan sejarah manusia, (3) Difusi. Ogburn (1922) menekankan bahwa difusi penyebaran suatu penciptaan dan penemuan dari suatu wilayah ke wilayah lain, dapat berakibat besar pada kehidupan orang. Contohnya, ketika para misionaris memperkenalkan kapak baja kepada orang Aborigin di Australia, (4) Akumulasi. Ogburn (1922) menyatakan bahwa akumulasi dihasilkan dari lebih banyaknya unsur baru yang ditambahkan kepada satu kebudayaan dibanding dengan unsur-unsur lama yang lenyap dari kebudayaan bersangkutan, dan (5) Penyesuaian. Ogburn (1922) menjelaskan bahwa penyesuaian mengacu pada masalah yang timbul dari saling ketergantungan seluruh aspek kebudayaan. Sebagai contoh, penemuan di bidang ekonomi tanpa terelakkan akan mempengaruhi pemerintah menurut cara tertentu, pemerintah terpaksa menyesuaikan diri terhadap situasi yang dihadapkan oleh perubahan ekonomi atau teknologi baru akan mempunyai dampak terhadap keluarga, memaksa keluarga

menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, meskipun penemuan teknologi berkaitan langsung dengan keluarga.

D. Konsep Falah dalam Islam

1. Pengertian Falah

Apa itu falah? Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu kesejahteraan. Karena kesejahteraan dan falah adalah dua hal yang sangat erat kaitannya satu sama lain. Pengertian kesejahteraan dalam Islam didasarkan pada pandangan yang komperhensif tentang kehidupan ini, dan mencakup dua hal (Misanam, 2014: 4-5), yaitu:

Pertama, Kesejahteraan holistik dan seimbang. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas dua unsur, yaitu: fisik dan jiwa, dan kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual dan sosial. Manusia akan merasa bahagia apabila terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungannya.

Kedua, Kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat. Jika kondisi idel ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai jika dibandingkan dengan kehidupan dunia.

Pengertian kedua di atas, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat, sangat erat kaitannya dengan falah. Kembali ke pertanyaan awal, apa itu falah? Falah menurut bahasa, berasal dari bahasa arab yang artinya kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan, yaitu kemenangan dan kemuliaan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata al-Quran (misalnya, menggunakan kata

muflihun dalam QS. Ali 'Imran [3] ayat 104, dll., dengan kata aflahah dalam QS. al-Mu'minin [23] ayat 1, dll.) yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material saja namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Jika demikian adanya, maka falah merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.

Meskipun dalam konteks duniawi, falah merupakan konsep yang multi dimensi, namun setidaknya falah di dunia mencakup tiga pengertian, yaitu: kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan serta kekuatan dan kehormatan. Sementara itu untuk kehidupan akhirat falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan.

Namun, falah ini hanya dapat dicapai dengan suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan thayyibah*). Sementara kehidupan ini hanya dapat dicapai dengan implementasi ajaran Islam secara *kaffah* serta menerapkan nilai-nilai dalam seluruh aspek kehidupan yang dibingkai dengan syariat Islam.

2. Falah sebagai Tujuan Hidup

Falah merupakan tujuan hidup bagi setiap manusia yang dibawa oleh Islam yang mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini meliputi spiritual dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan: (1) Pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit, (2) Faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan, dan (3) Faktor sosial, adanya persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis. Sedangkan dalam aspek makro kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan yang higienis, manajemen lingkungan hidup dan lain-lain.

Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi, memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan dunia. Kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian atau kemusnahan, sedangkan kehidupan akhirat bersifat abadi atau kekal. Kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat dan kebahagiaan dunia. Jika demikian adanya, maka falah mengandung makna kondisi maksimum dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan atau akan berpengaruh kepada kehidupannya di akhirat kelak nanti. Dalam praktiknya, upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya di dunia ini sering kali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain, kelestarian lingkungan hidup manusia jangka panjang. Ketidak kemampuan manusia dalam menyeimbangkan kegiatan dunia dan kegiatan akhirat bisa berakibat pada kegagalan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu, dalam ekonomi Islam ditekankan mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Misanam, 2014: 3-4).

Manusia dapat mencapai falah tergantung pada perilaku dan keadaannya di dunia. Secara umum, manusia menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidupnya karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai falah, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, yakni mengapa kita tercipta di dunia ini. Sesungguhnya manusia tercipta karena kehendak yang menciptakannya, ia mengikuti petunjuk pencipta. Perilaku manusia semacam inilah yang dalam agama Islam disebut ibadah, yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan, maupun, tindakan mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (muamalah)

ataupun manusia dengan penciptanya (ibadah mahdhab). Di sinilah agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntun setiap aspek kehidupan manusia agar berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai falah.

E. Konsep Agama dan Kearifan Lokal

Rangkaian hidup manusia dan lingkungan, tidak terlepas dari nalar serta insting perilakunya. Perilaku yang seseorang mungkin dilakukan akan menjadi unsur-unsur keberadaan budaya di lingkungan. Sehingga dari situlah leluhur menanamkan nilai-nilai aliran kepercayaan dengan konteks lokalitas pada suatu daerah. Masyarakat dan lingkungan tidak bisa terlepas satu sama lainnya, mereka saling kait mengait terhadap adanya pembangunan peradaban religi (Abdullah, dkk., 2008).

Daya dukung dari banyaknya konsumtifme berbagai kejiwaan hidup menjadikan faktor dominan warga lingkungan, dan apabila unsur-unsur dari keyakinan tersebut dilanggar maka ditakutkan terkena bencana. Namun realita yang ada bahwasanya kehidupan masyarakat telah diwarnai berbagai pandangan terkait perilaku beragama dan kehidupan lokal. Apalagi warga pendatang di suatu daerah, yang sejatinya telah membawa pandangannya sendiri dari daerah asal.

Lingkungan masyarakat merupakan lahan berprosesnya manusia dan alam untuk mencari jati dirinya. Banyak berbagai hal peristiwa yang terjadi dalam lingkungan telah membuktikan keberadaan manusia memiliki peran utama diberbagai sektor. Masyarakat dengan peran pentingnya membangun peradaban, serta berpacu dengan waktu dan ruang akhirnya dapat memberikan sumbangsinya membangun peradaban dengan santunnya.

Agama menjadi dasar berpijak manusia dalam mengarungi proses kehidupan di lingkungan. Dasar kehidupan yang baik akan

melahirkan kemampuan manusia membangun kehidupan yang terbaik. Akulturasi yang menjadi bagian hidup manusia di suatu daerah telah memberikan simbolisasi hidup penuh makna. Kearifan lokal sifat dan karakter asli dari kehidupan manusia pada suatu lingkungan. Hakikatnya lingkungan sendiri yang membentuk karakternya adalah manusia dengan akal serta pikirannya (Abdullah, 2008).

Setiap daerah memiliki tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang berbeda, meskipun ada pula yang sama. Warga dalam lingkungan desa-desa, memberikan warna-warna hidup yang unik untuk dipelajari dan dikaji. Landasan berpikir dan bekerjasama dalam membangun ketoleransian bermasyarakat, beragama, dan berbudaya. Kehidupan masyarakat pada dasarnya memiliki ketoleransian yang dapat menempatkan kebersamaan dalam hidup bertetangga.

1. Agama

Atas nama dasar keyakinan dalam jiwa-jiwa manusia adalah adanya kehadiran kepercayaan semakin kuat. Apalagi dilandasi dengan sepenuh hati dan dilaksanakan perintah yang baik-baik. Dengan tujuan yang mulia, manusia hidup dengan beragam, sesuai dengan keyakinannya. Pada hakikatnya agama adalah pegangan hidup manusia yang berakal, beriman, dan dilandasi dengan sepenuh jiwa untuk menjalankan perintah agamanya (Abdullah, dkk., 2008).

Kehidupan manusia di desa-desa sangat menekankan sifat agamisnya, saling memberikan warna kehidupan agamanya dengan berarti. Terutama dalam proses kehidupan yang lebih baik secara pribadi maupun bermasyarakat. Memahami dengan sifat religi, merupakan wujud penerapan nilai-nilai agama. Hal itu dapat dijadikan pedoman dalam membina keanekaragaman tradisi perilaku agama dan lingkungan masyarakat. Manusia dan agama tidak terlepas dari adanya pegangan hidup untuk menjalani kehidupan, baik secara individu maupun berjama'ah (Abdullah, dkk., 2008).

Agama memberikan nilai-nilai prosesi kehidupan yang agung pada setiap manusia yang mampu memahami, mengerti, dan menerapkan dalam kehidupan setiap hari. Akar rumput religi dan kearifan lokal dalam kehidupan dianutnya adalah memahami agama sebagai kebutuhan dasar pada jiwa-jiwa mulia yang terdapat pada manusia berakal dan beriman. Dia Sang Pencipta Alam telah memberikan anugerah pada seluruh makhluk, begitu pula dengan manusia (Abdullah, dkk., 2008).

Manusia dalam membangun peradabannya tidak terlepas dari adanya agama sebagai pondasi terbentuknya peradaban lokal yang santun dan beradab. Hiruk pikuk perjalanan manusia seiring dengan tersedianya tingkat pemahaman terkait nilai-nilai agama. Inilah yang biasa disebut dengan tindakan normatif dalam diri manusia. Sehingga manusia tanpa adanya agama, seperti kehidupan mengarungi lautan luas tanpa ada nahkoda, terombang ambing dengan gelombang laut yang begitu dahsyatnya. Namun apabila manusia memiliki pegangan agama, senantiasa kehidupannya menjadi tenang dan mampu menempatkan diri dimanapun (Abdullah, dkk., 2008).

Akal dan hati adalah bagian utama dalam menempatkan unsur-unsur proses kehidupan. Manusia menjalani proses kehidupan dengan berbagai karakter dan sifat humanisme, sehingga terlahirlah ragam bentuk karakter manusia di desa-desa. Karakter manusia yang sudah terakulturasi dengan sistem nilai-nilai agama, mampu dengan mudahnya menempatkan diri pada unsur-unsur kearifan lokal di lingkungannya (Abdullah, dkk., 2008).

Memiliki iman dalam beragama, manusia dapat memiliki pemikiran yang baik serta tunduk pada aturan Tuhannya. Kebahagiaan hidup yang ada di diri manusia tidak terlepas dari adanya agama sebagai pondasi mengakulturasi dengan nilai-nilai lokal. Mayoritas untuk memecahkan permasalahan di masyarakat, agamalah memiliki peran penting.

2. Kearifan Lokal

Nilai merupakan faktor kabstrakan terhadap simbolisasi terkait dengan kehidupan. Keberadaan nilai hanya sebatas penyamatan pujian atau penggunjingan sekelompok atau individu. Nilai sebatas penyamatan terhadap suatu proses dan hasil, mengukur penilaian berdasarkan asumsi subjektivitas, atau simpulan dari adanya objek yang dinilai. Seperti adanya agama dan nilai lokal, yang di maksud nilai lokal disini adalah bentuk kearifan lokal yang sudah mengakar kuat terdapat di lingkungan masyarakat, warisan leluhur (Abdullah, dkk., 2008).

Nilai lokal juga tidak terlepas dari sisi kemanusiaan maupun proses kehidupan manusia. Sifat adab santun yang berlaku dalam hidup manusia memang tidak terlepas dari agama. Kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok. Berbagai pengaruh dari adanya agama dan nilai lokal di lingkungan manusia akan menjadi faktor pendukung proses kehidupan (Abdullah, dkk., 2008).

Setiap manusia dalam suatu lingkungan memiliki beranekaragam tradisi, agama, dan nilai-nilai kearifan lokalitas. Sehingga manusia sendiri sudah sepatutnya untuk menghadirkan nilai-nilai agama pada kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Kehidupan manusia di desa-desa telah membuktikan adanya sifat religi dan nilai kearifan lokalitas yang humanisme. Keberadaan manusia, lingkungan, dan nilai agama memang menjadi kesatuan rangkaian yang terdapat pada diri makhluk yang bernama manusia (Abdullah, dkk., 2008).

Hidup secara toleransi yang terdapat di desa-desa, telah menyuguhkan proses kehidupan yang baik. Sehingga secara tidak langsung adanya peradaban di desa-desa telah memberikan suatu gambaran kehidupan masyarakatnya antara agama dan nilai kearifan lokal. Manusia dan lingkungan merupakan tempat berproses hidup

untuk memenuhi hasrat sebagai makhluk Tuhan (Abdullah, dkk., 2008).

Lingkungan adalah hasil cipta, karya, dan karsa manusia menjalani kehidupan. Keunikan manusia secara humanisme memang patut untuk dikaji dan didokumentasikan dengan baik. Mengingat kehidupan manusia pada suatu kawasan dapat memberikan pelajaran hidup. Disinilah letak leluhur, manusia dahulu yang sudah membangun peradabannya dengan santun kehidupan. Sinergitas hidup memang sangat dibutuhkan, mengingat rangkaian hidup saling mendukung dan memberikan nilai kearifan lokal (Abdullah, dkk., 2008).

Sartono Kartodirdjo (1993: 99) mengatakan bahwa dalam masyarakat tradisional pola kehidupan diatur oleh kaidah-kaidah dari nenek moyang yang dianggap berlaku terus. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat sangat mapan sehingga memperkuat keseimbangan hubungan-hubungan sosial dalam bermasyarakat, yang kesemuanya itu menimbulkan rasa aman, dan tentram dengan kepastian yang dihadapi. Oleh karena itu tradisi dihargai sebagai nilai tersendiri yang tinggi, maka perlu dipertahankan.

3. Korelasi Agama dengan Kearifan Lokal

Budaya itu merekat diwaktu kita lahir dan sampai kini, itu sebuah identitas dan pemahaman, jadi tinggal bagaimana memaknai budaya dengan berbagai perspektif, karena pesan yang disajikan tidak 'telanjang'. Hari baik dan hari buruk, semata-mata mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas, kita dituntut untuk lebih waspada. Agama sebagai pegangan dan pedoman hidup agar menjadi terarah, sebagai pribadi yang memiliki nilai-nilai ajaran ketuhanan. Budaya mengajak kita melihat proses kehidupan dengan sederhana dari mata angin yang berbeda, tanpa bermaksud menge-sampingkan agama.

Korelasinya antara agama dengan kearifan lokal, dimana budaya juga turut berperan membentuk garis-garis etika mampu

mengatur tatanan hidup masyarakat, mengandung pesan moral yang kuat, ajakan berlaku baik demi menjauhkan kita dari resiko besar, meskipun kadang dihubungkan pada peristiwa ghaib dan kadangkala kita tidak bisa menalar-kannya dengan akal. Tapi pada garis besarnya, kearifan lokal bermaksud mengharmonikan hidup manusia dengan alam, saling menjaga, dan ada rasa penghormatan atas makhluk-makhluk yang ada di bumi selain manusia. Suharto (2010) mengatakan bahwa agama itu dogma, sesuatu yang harus dilaksanakan, karena merupakan perintah dari Tuhan, dan budaya itu berperan dalam pembentukan karakter.

Saat Islam datang, masyarakat nusantara telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Ajaran Islam dan budaya nusantara saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Budaya lama tetap hidup, tetapi diisi dengan nilai-nilai keislaman.

Perpaduan Islam dengan kearifan lokal yang telah dilakukan oleh para penyebar agama Islam di nusantara pada masa lampau ternyata memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan budaya nusantara. Budaya nusantara semakin diperkaya nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi sumber inspirasi dan pedoman kehidupan bagi masyarakat.

Koentjaraningrat (1974: 12-13) mengatkan bahwa kearifan lokal terbentuk dengan unsur-unsur, yaitu: Manusia, gagasan yang bernilai baik, kebenaran yang telah mentradisi, dan diakui oleh masyarakat. Keempat unsur tersebut dapat dipahami bahwa dalam kearifan lokal nilai agama tidak dapat terpisahkan. Gagasan yang bernilai baik kemudian menjadi kebenaran yang mentradisi dan diakui merupakan prinsip dasar dari semua agama khususnya agama Islam.

F. Teori Planned Behaviour

Teori *Planned Behavior* adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun dengan menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Teori *Planned Behavior* merupakan perluasan dari teori *Reasoned Action*. Dalam teori *Reasoned Action* dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu: *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam teori *Planned Behavior* ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Ajzen (1991) mengatakan bahwa faktor tersebut bertujuan untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukannya.

Lebih lanjut Ajzen (2001) menjelaskan bahwa faktor-faktor teori *Planned Behaviour* terdiri dari sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku. Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya dapat menerima apa yang akan dilakukannya. Sehingga, *normative beliefs* menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau Norma Subyektif.

Dalam berperilaku seorang individu menurut Ajzen (2005), tidak dapat mengontrol sepenuhnya perilakunya dibawah kendali

individu tersebut atau dalam suatu kondisi dapat sebaliknya dimana seorang individu dapat mengontrol perilakunya dibawah kendali individu tersebut. Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu tersebut seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang ada disekeliling individu tersebut. Persepsi terhadap kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya.

Untuk lebih detailnya, komponen teori *Planned Behavior* Ajzen (1991, 2001 dan 2005) mengemukakan sebagai berikut: Pertama, Kepercayaan perilaku yang memengaruhi sikap terhadap perilaku. Keyakinan perilaku adalah hal-hal yang mendorong individu untuk bertindak. Sedangkan sikap terhadap perilaku yaitu sikap individu terhadap perilaku yang diperoleh dari keyakinan yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut.

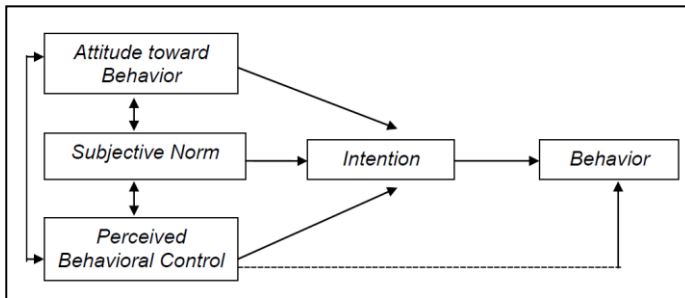
Kedua, Keyakinan normatif yang mempengaruhi norma subjektif. Kepercayaan normatif adalah norma yang digunakan orang orang yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan norma-norma subyektif menjadi sebagai individu persepsi terhadap sosialisasi yang ada untuk menunjukkan atau tidak perilaku. Norma-norma subyektif ini identik dengan keyakinan dari seseorang tentang perbuatan atau orang lain atau orang lain yang perlu, harus, atau tidak boleh melakukan perilaku, dan memotivasi orang untuk mengetahui orang lain tersebut.

Ketiga, Kontrol keyakinan yang memengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan. Pengendalian keyakinan adalah pengalaman pribadi, atau orang-orang yang akan mempengaruhi hasil individu. Kontrol perilaku yang dirasakan adalah keyakinan bahwa individu pernah melakukan atau tidak pernah melaksanakan perilaku

tertentu. Kontrol perilaku cerdas dan diartikan persepsi individu yang berhubungan dengan tingkah laku tertentu.

Agar hubungan ketiga komponen tersebut mudah dipahami, Ajzen (1991, 2001 dan 2005) menyajikannya dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 2.2.1.

Gambar 2.2.1.
Teori *Planned Behavior*



Sumber: Ajzen, 1991

Teori *Planned Behavior* menurut Ajzen (1991, 2001 dan 2005), dapat diterapkan untuk mengestimasi berbagai macam perilaku, seperti perilaku sehat, misalnya pencegahan perilaku merokok. Uraianya dapat dijelaskan sebagai berikut: Komponen *attitude toward behavior* dari pencegahan perilaku merokok adalah membuat perokok percaya akan hal positif dan negatif dari merokok sehingga ia memiliki kecenderungan untuk sadar akan konsekuensi merokok. Komponen *subjective norms* adalah orang-orang disekitar perokok yang diminta atau dibuat untuk mendukung perokok berhenti merokok, dan perokok juga distimulasi agar menginternalisasi bahwa ia harus berhenti merokok. Lalu, komponen *perceived behavioral control* adalah penggalan pengalaman buruk akibat merokok serta mendukung perokok agar mengontrol perilaku merokoknya.

G. Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya (FAO, 1997). Sebuah

rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan (Japan Times, 2011). Ketahanan pangan menurut FAO (1997) memiliki empat pilar utama, yaitu: Ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, keterjangkauan (akses) pangan, dan pemanfaatan pangan. Penjelasannya dapat disajikan seperti berikut:

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran (Gregory, 2005). Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; dan pemanenan (FAO, 1997). Produksi tanaman pertanian dapat dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan (Gregory, 2005). Pemanfaatan lahan, air, dan energi untuk menumbuhkan bahan pangan seringkali berkompetisi dengan kebutuhan lain (Godfray, 2010).

Distribusi pangan melibatkan penyimpanan, pemrosesan, transportasi, pengemasan, dan pemasaran bahan pangan (FAO, 1997). Infrastruktur rantai pasokan dan teknologi penyimpanan pangan juga dapat mempengaruhi jumlah bahan pangan yang hilang selama distribusi (Godfray, 2010). Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan harga hingga ke pasar global (Godfray, 2010). Produksi pangan per kapita dunia sudah melebihi konsumsi per kapita, namun di berbagai tempat masih ditemukan kerawanan pangan karena distribusi bahan pangan telah menjadi penghalang utama dalam mencapai ketahanan pangan.

2. Stabilitas Ketersediaan Pangan

Stabilitas ketersediaan pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis (FAO, 1997). Pada ketahanan pangan

transisi, pangan kemungkinan tidak tersedia pada suatu periode waktu tertentu (Ecker, 2012). Bencana alam dan kekeringan mampu menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan pada tingkat produksi (FAO, 1997, Ecker, 2012).

Ketidakstabilan ketersediaan pangan di pasar menyebabkan peningkatan harga pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit. Musim tanam mempengaruhi stabilitas secara musiman karena bahan pangan hanya ada pada musim tertentu saja (FAO, 1997). Kerawanan pangan permanen atau kronis bersifat jangka panjang dan persisten (Ecker, 2012).

3. Akses Pangan

Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga (Gregory, 2005). Kemiskinan membatasi akses terhadap bahan pangan dan juga meningkatkan kerentanan suatu individu atau rumah tangga terhadap peningkatan harga bahan pangan (Ecker, 2012). Kemampuan akses bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga untuk membeli bahan pangan, atau kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri (Garrett, 1999). Rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi ketidakstabilan panen dan kelangkaan pangan setempat serta mampu mempertahankan akses kepada bahan pangan.

4. Pemanfaatan Pangan

Ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu (Ecker, 2012). Keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan

memasak di suatu komunitas atau rumah tangga (FAO, 1997, Godfray, 2010). Akses kepada fasilitas kesehatan juga mempengaruhi pemanfaatan pangan karena kesehatan suatu individu mempengaruhi bagaimana suatu makanan dicerna (FAO, 1997). Kualitas sanitasi juga mempengaruhi keberadaan dan persebaran penyakit yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pangan (FAO, 1997) sehingga edukasi mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan.



LOKASI PENJARINGAN DATA

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Kabupaten Bone
- B. Kabupaten Soppeng
- C. Kabupaten Wajo
- D. Kabupaten Sinjai

BAB 3.2

LOKASI PENJARINGAN DATA

Penjaringan data untuk studi ini dilaksanakan di Kawasan Bosowasi, yakni Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai. Lokasinya perlu dideskripsikan terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisinya di mana ketahanan pangan rumah tangga yang menjadi obyek studi ini, berada. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah tentang sejarahnya, keadaan geografi dan demografinya. Situasi dan kondisi tersebut sangat memengaruhi karakteristik rumah tangga yang ada di dalamnya.

A. Kabupaten Bone

1. Sejarah

Di masa dahulu, Bone merupakan sebuah kerajaan besar di Nusantara. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone pertama, yaitu: Manurunge ri Matajang pada tahun 1330 M. dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta Arung Palakka pada pertengahan abad ke-17 M. Belajar hikmah dari sejarah kerajaan Bone tersebut, paling tidak ada tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik (Pemda Kab. Bone, 2020).

Ketiga hal yang dimaksud, yaitu: Pertama, Bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “Ade Pitue”, yaitu tujuh orang pejabat adat

yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade' Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan (Pemda Kab. Bone, 2020).

Kedua, Kerjasama dan pendekatan. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone di masa lalu. Sebagai bentuk monumental dari pandangan ini dikenal perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan perjanjian "Tellumpocoe" atau "Lamumpatue Ri Timurung", adalah sebagai upaya mempererat tali persaudaraan ketiga kerajaan hendak memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar (Pemda Kab. Bone, 2020).

Ketiga, Pesan-pesan kemanusiaan. Pesan-pesan ini digunakan orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya, sehingga Bone kemudian berkembang dan menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang luas. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 menyatakan bahwa Bone berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemda Kab. Bone, 2020).

2. Geografi

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, dan ibu kotanya adalah Watampone. Sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan, Kabputen Bone memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administrative terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian lahan sebagai berikut: (1) Persawahan: 88.449 Ha, (2) Tegalan/Ladang: 120.524 Ha, (3) Tambak/Empang: 11.148 Ha, (4) Perkebunan Negara/Swasta:

43.052,97 Ha, (5) Hutan: 145.073 Ha, dan (5) Padang rumput dan lainnya: 10.503,48 Ha (BPS Kab. Bone, 2020).

3. Demografi

Penduduk Kabupaten Bone adalah 758.589 jiwa, terdiri atas 358.889 laki-laki dan 392.137 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² dan rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km². Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk per km² adalah 165 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal terpusat di ibu kota kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 2.214 jiwa per km². Penduduk Kabupaten Bone didominasi oleh penduduk muda dan usia produktif. Penduduk usia produktif memiliki jumlah terbesar yaitu 64,50 persen dari keseluruhan populasi dengan rasio ketergantungan sebesar 55,03 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 55 hingga 56 penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal lain yang menarik pada penduduk Kabupaten Bone adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih kecil dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kelahiran penduduk pada beberapa tahun ini (BPS Kab. Bone, 2020).

B. Kabupaten Soppeng

1. Sejarah

Soppeng adalah sebuah kota kecil di mana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja. Satu hal menarik dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan

Soppeng, telah ada kekuasaan yg mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat, tetapi saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Arung, Sulewatang dan Paddanreng serta Pabbicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri (Pemda Kab. Soppeng, 2020).

Setelah kerajaan Soppeng terbentuk maka dikoordinir oleh Lili-lili yang kemudian disebut distrik di zaman pemerintahan Belanda. Literatur yang ditulis tentang sejarah Soppeng masih sangat sedikit. Sebagaimana tentang daerah-daerah di Limae Ajattappareng, juga Mandar dan Toraja, Soppeng hanyalah daerah “kecil” dan mungkin “kurang signifikan” untuk diperebutkan oleh dominasi dua kekuatan di Sulawesi Selatan yakni Luwu dan Siang sebelum abad ke-16. Namun, seperti disebutkan oleh sebuah kronik Soppeng, dulunya Soppeng bersama Wajo, sangat bergantung kepada kerajaan Luwu. Seiring menguatnya kekuatan persekutuan Goa-Tallo di Makassar; untuk mengimbangnya, Bone sempat mengajak Wajo dan Soppeng membentuk persekutuan Tellumpoccoe pada perjanjian Timurung tahun 1582. Akan tetapi, masuknya Islam di Sulawesi Selatan di paruh akhir abad ke-16, ditandai dengan masuknya Karaeng Tallo I Mallingkang yang lebih dikenal sebagai Karaeng Matoaya serta penguasa Goa I Manga’rangi yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, telah mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, kekuatan Bugis Makassar menjadi satu kekuatan baru untuk melawan orang kafir ketika Soppeng dan Sidenreng memeluk Islam tahun 1609, Wajo 1610 dan akhirnya Bone pada tahun 1611 M (Pemda Kab. Soppeng, 2020).

Perkembangan berikutnya sepanjang abad ke-17, menempatkan Soppeng pada beberapa perubahan keputusan politik ketika persaingan Bone dan Goa semakin menguat. Jauh sebelum

perjanjian Timurung yang melahirkan persekutuan Tellumpocco, sebenarnya Soppeng sudah berada di pihak kerajaan Goa dan terikat dengan perjanjian Lamogo antara Goa dan Soppeng. Persekutuan Tellumpocco sendiri lahir atas “restu” Goa. Namun, ketika terjadi gejolak politik antara Bugis dan Makassar disebabkan oleh gerakan yang dipelopori oleh Arung Palakka dari Bone, Soppeng sempat terpecah dua ketika Datu Soppeng, Arung Mampu, dan Arung Bila bersekutu dengan Bone pada tahun 1660 sementara sebagian besar bangsawan Soppeng yang lain menolak perjanjian di atas rakit di Atappang itu (Pemda Kab. Soppeng, 2020).

2. Geografi

Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan ± 700 km² serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Luas daerah perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km² dan berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibu kota Kabupaten Soppeng, Watansoppeng berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe. Gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut: (1) Gunung Nene Conang 1.463 m, (2) Gunung Laposo 1000 m, (3) Gunung Sewo 860 m, (4) Gunung Lapancu 850 m, (6) Gunung Bulu Dua 800 m, (7) Gunung Paowengeng 760 m. Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa permandian air panas alami yang bernama "Lejja", permandian mata air "Ompo" dan permandian alam "Citta". Lejja berjarak ± 40 kilometer dari pusat kota, terletak di desa Batu-batu, Kecamatan Marioriawa (BPS Kab. Soppeng, 2020).

3. Demografi

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Watansoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500,00 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 226.990 jiwa. Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 kecamatan, 21 kelurahan dan 49 desa. Pada tahun 2020, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.557,00 km² dan jumlah penduduk sebesar 226.990 jiwa dengan sebaran penduduk 160 jiwa/km² (BPS Kab. Soppeng, 2020).

C. Kabupaten Wajo

1. Sejarah

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo. Versi lain tentang terbentuknya Wajo, yaitu kisah We Tadampali, seorang putri dari Kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Dia dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut Majauleng, berasal dari kata maja (jelek/sakit) oli' (kulit). Konon kabarnya dia dijilati kerbau belang di tempat yang kemudian dikenal sebagai Sakkoli (sakke' = pulih, oli = kulit) sehingga dia sembuh. Saat dia sembuh, beserta pengikutnya yang setia ia membangun masyarakat baru, hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone (ada juga yang mengatakan Soppeng) yang beristirahat di dekat perkampungan We Tadampali. Singkat kata mereka kemudian menikah dan menurunkan raja-raja Wajo. Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem to manurung sebagaimana

kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe Kerajaan Wajo bukanlah feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas (Pemda Kab. Wajo, 2020).

2. Geografi

Secara geografis, Kabupaten Wajo terletak pada 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' - 120°27' Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah hingga dataran rendah bergelombang dengan ketinggian wilayah 0-520 Mdpl. Hanya sebagian kecil yang berupa perbukitan di bagian utara. Bagian timur berupa dataran rendah dan pesisir Teluk Bone, termasuk pulau-pulau pasir di perairan Teluk Bone. Sedangkan bagian barat merupakan dataran aluvial Danau Tempe-Danau Sidenreng (BPS Kab. Wajo, 2020).

3. Demografi

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.056,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 397.814 jiwa. Kabupaten Wajo dulunya terdiri dari 10 kecamatan, akan tetapi sejak tahun 2000 terjadi pemekaran hingga saat ini terdapat 14 kecamatan (BPS Kab. Wajo, 2020).

D. Kabupaten Sinjai

1. Sejarah

Kabupaten Sinjai mempunyai nilai sejarah tersendiri, yang membedakannya dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini diawali dengan terbentuknya persekutuan kerajaan tellu limpo'e: Tondong, Bulo-Bulo, Lamatti, dan persekutuan kerajaan Pitu Riwawo Bulu. Sekalipun dulunya Kabupaten Sinjai berupa kerajaan, namun watak dan karakter warganya tetap tercermin dari adanya sistem pemerintahan

demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik melalui landasan tatanan kesopanan, "Sipakatau" (Saling Menghormati) dan menjunjung nilai-nilai dari konsep "Sirui Menre', Tesirui No' (saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah). Sekalipun dari ketiga tersebut tergabung ke dalam persekutuan Kerajaan Tellu Limppo'e, namun pelaksanaan roda pemerintahan tetap berjalan pada wilayahnya masing-masing tanpa adanya pertentangan dan peperangan yang terjadi di antara mereka. Persekutuan Kerajaan Tellu Limppo'e kemudian membangun sebuah benteng pertahanan, yang diberi nama Benteng Balangnipa pada tahun 1557 M, guna mengantisipasi serangan dari luar (Pemda Kab. Sinjai, 2020).

2. Geografi

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak pada titik 5° 2' 56" - 5° 21' 16" Lintang Selatan dan 119° 56' 30" - 120° 25' 33" Bujur Timur. Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya berdasarkan data yang ada sekitar 819,96 km² (81.996 ha). Kabupaten Sinjai secara geografis terdiri atas wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 0 - 2.871 meter diatas permukaan air laut (mdpl). Wilayahnya termasuk 9 pulau-pulau kecil di Teluk bone yang masuk ke wilayah kecamatan Pulau Sembilan. Pesisir di Kabupaten Sinjai berada di sepanjang batas sebelah timur dan tergolong sempit meliputi Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Utara dan kecamatan Tellu Limpo'e. Daerah dataran tinggi yang merupakan lereng timur Gunung Lompobattang dan Gunung Bawakaraeng meliputi kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Sedangkan dataran tinggi pegunungan Bohonglangi meliputi sebagian wilayah kecamatan Bulupoddo (BPS Kab. Sinjai, 2020).

3. Demografi

Kabupaten Sinjai adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya adalah Sinjai yang berjarak sekitar ± 220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $819,96 \text{ km}^2$ dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 265.930 jiwa. Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah $798,96 \text{ km}^2$ dan jumlah penduduk sebesar 255.853 jiwa dengan sebaran penduduk 320 jiwa/km^2 . Kecamatan Sinjai Utara merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 1.471 jiwa/km^2 , sedangkan kecamatan Bulupoddo merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 158 jiwa/km^2 . Sebanyak 99% penduduk Kabupaten Sinjai memeluk agama Islam. Pertanian yang menonjol dari kabupaten Sinjai adalah lada dan coklat. Lada tumbuh hampir di semua kecamatan kecuali di kecamatan Pulau Sembilan. Luas areal tanamnya mencapai 3.249 hektar dengan jumlah produksi 2.380 per tahun. Sedangkan coklat tumbuh hampir di semua kecamatan dengan luas area tanam 4.178 hektare dan hasil panen per tahun mencapai 2.129 ton (BPS Kab. Sinjai, 2020).



REALITAS SOSIAL KEAGAMAAN

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Realitas Kehidupan Keagamaan
- B. Toleransi Beragama
- C. Perilaku Sosial Keagamaan

BAB 4.2

REALITAS SOSIAL KEAGAMAAN

A. Realitas Kehidupan Keagamaan

Deskripsi realitas kehidupan keagamaan di Kawasan Bosowasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat di Bosowasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Kabupaten Bone

Ada lima agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Bone, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Adapun penduduk Kabupaten Bone yang beragama Islam sebanyak 753.614 jiwa, Protestan sebanyak 3.119 jiwa, Katolik sebesar 694 jiwa, Hindu sebanyak 598, dan Budha sebanyak 564 jiwa (BPS Kab. Bone, 2020: 100). Penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Bone dan dapat dijumpai di semua kecamatan (27 Kecamatan). Sedangkan agama-agama lain, yaitu (BPS Kab. Bone, 2020: 100): (1) Protestan dapat dijumpai di 9 kecamatan, yakni: Salomekko 1 orang, Libureng 52 orang, Mare 33 orang, Cina 76 orang, Bengo 29 orang, Palakka 21 orang, Tanete Riattang Barat 1.711 orang, Tanete Riattang 1.096 orang, dan Tanete Riattang Timur 100 orang, (2) Katolik dapat dijumpai di 8 kecamatan, yakni: Tonra 8 orang, Libureng 32 orang, Cina 47 orang, Lappariaja, 15 orang, Lamuru 8 orang, Ajangale 28 orang, Tanete Riattang Barat 428 orang, dan Tanete Riattang 131 orang, (3) Hindu dapat dijumpai di 4 kecamatan, yakni: Lamuru 1 orang, Tanete Riattang Barat 450 orang, Tanete Riattang 140 orang, dan Tanete Riattang Timur 7 orang, dan (4) Budha dapat dijumpai di 2 kecamatan, yakni: Tanete Riattang Barat 425 orang dan Tanete Riattang 112 orang.

b. Kabupaten Soppeng

Sama halnya di Kabupaten Bone, di Kabupaten Soppeng juga terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Adapun penduduk Kabupaten Soppeng yang beragama Islam sebanyak 233.962 jiwa, Protestan sebanyak 117 jiwa, Katolik sebesar 701 jiwa, Hindu sebanyak 9, dan Budha sebanyak 9 jiwa (BPS Kab. Soppeng, 2020: 161). Penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Soppeng dan dapat dijumpai di semua kecamatan (8 Kecamatan). Sedangkan agama-agama lain, yaitu (BPS Kab. Soppeng, 2020: 161): (1) Protestan dapat dijumpai di tujuh kecamatan, yakni: Mariowawo 1 orang, Lalabata 74 orang, Liliriaja 38 orang, Ganra 1 orang, Lilirilau 1 orang, Donri-donri 1 orang, dan Marioriawa 1 orang, (2) Katolik Protestan dapat dijumpai di tujuh kecamatan, yakni: Mariowawo 137 orang, Lalabata 478 orang, Liliriaja 55 orang, Ganra 11 orang, Lilirilau 4 orang, Donri-donri 12 orang, dan Marioriawa 4 orang, (3) Hindu dapat dijumpai pada dua kecamatan, yakni: Mariowawo 1 orang dan Lalabata 8 orang, (4) Budha dapat dijumpai pada tiga kecamatan, yakni: Mariowawo 1 orang, Lalabata 5 orang, dan Marioriawa 1 orang.

c. Kabupaten Wajo

Demikian juga di Kabupaten Wajo, terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Adapun penduduk Kabupaten Wajo yang beragama Islam sebanyak 417.685 jiwa, Protestan sebanyak 681 jiwa, Katolik sebesar 527 jiwa, Hindu sebanyak 3.547, dan Budha sebanyak 47 jiwa (BPS Kab. Wajo, 2019: 145). Penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Wajo dan dapat dijumpai di semua kecamatan (14 Kecamatan). Sedangkan agama-agama lain, yaitu (BPS Kab. Wajo, 2019: 145): (1) Protestan dapat dijumpai di 3 kecamatan, yakni: Tempe 617 orang, Pammana 26 orang, Majauleng 38 orang, (2) Katolik Protestan dapat dijumpai di 4 kecamatan, yakni:

Tempe 170 orang, Penrang 7 orang, Keera 5 orang, dan Pitumpanua 345 orang, (3) Hindu dapat dijumpai pada 2 kecamatan, yakni: Maniangpajo 1.671 orang dan Keera 1.684 orang, (4) Budha dapat dijumpai pada 1 kecamatan, yakni: Tempe 47 orang.

d. Kabupaten Sinjai

Di Kabupaten Sinjai, terdapat enam agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Agama lainnya. Adapun penduduk Kabupaten Sinjai yang beragama Islam sebanyak 258.374 jiwa, Protestan sebanyak 109 jiwa, Katolik sebesar 44 jiwa, Hindu sebanyak 2, Budha sebanyak 12 jiwa dan agama lainnya sebanyak 3 jiwa (BPS Kab. Sinjai, 2020: 83). Penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Sinjai dan dapat dijumpai di semua kecamatan (9 Kecamatan). Sedangkan agama-agama lain, yaitu (BPS Kab. Sinjai, 2020: 83): (1) Protestan dapat dijumpai di 7 kecamatan, yakni: Sinjai Barat 7 orang, Sijai Borong 3 orang, Sinjai Selatan 8 orang, Sinjai Timur 84 orang, Sinjai Tengah 2 orang, Sijai Utara 1 orang, Bulupoddon 4 orang (2) Katolik Protestan dapat dijumpai di 3 kecamatan, yakni: Sijai Selatan 1 orang, Sinjai Timur 36 orang, dan Bulopoddo 7 orang, (3) Hindu dapat dijumpai pada 2 kecamatan, yakni: Tellulimpoe 1 orang dan Sinjai Timur 1 orang, (4) Budha dapat dijumpai pada 1 kecamatan, yakni: Sinjai Timur 12 orang, dan agama lainnya dapat dijumpai di 3 kecamatan, yakni: Sinjai Barat 1 orang, Tellulimpoe 1 orang, dan Sinjai Timur 1 orang.

2. Tempat Peribadatan

Tempat peribadatan bagi masyarakat Bosowasi yang mengunut agama-agama sebagaimana yang dipaparkan di atas, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Kabupaten Bone

Tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Bone, yaitu: Mesjid, Musallah, Gereja Protestan, Gereja Katolik dan Vihara.

Mesjid sebanyak 1.447 buah dan Musallah sebanyak 1.584 buah. Masjid dan Musallah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa kabupaten Bone. Gereja Protestan sebanyak 4 buah dapat ditemukan di 2 kecamatan, yaitu: Bengo 1 gereja dan Tanete Riattang Barat 3 gereja. Gereja Katolik hanya 1 buah berada di Kecamatan Tanete Riattang, dan Vihara juga hanya 1 buah berada di Kecamatan Tanete Riattang (BPS Kab. Bone, 2020: 101).

b. Kabupaten Soppeng

Tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Soppeng, yaitu: Masjid, Musallah, Gereja Protestan, dan Gereja Katolik. Masjid sebanyak 433 buah dan Musallah sebanyak 110 buah. Masjid dan Musallah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Soppeng. Gereja Protestan sebanyak 6 buah dapat ditemukan di 2 kecamatan, yaitu: Marioriwawo 1 gereja dan Lalabata 5 gereja. Gereja Katolik hanya 1 buah berada di Kecamatan Lalabata (BPS Kab. Soppeng, 2020: 162).

c. Kabupaten Wajo

Tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu: Masjid, Musallah, dan Gereja Protestan. Masjid sebanyak 664 buah dan Musallah sebanyak 54 buah. Masjid dan Musallah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Wajo. Gereja Protestan sebanyak 8 buah dapat ditemukan di 2 kecamatan, yaitu: Tempe 4 gereja, Majauleng 1 gereja, dan Pitumpanua 3 gereja (BPS Kab. Wajo, 2019: 146).

d. Kabupaten Sinjai

Tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Sinjai hanya Masjid dan Musallah. Sedangkan Gereja Protestan, Gereja Katolik, Pura dan Vihara tidak ada. Masjid sebanyak 675 buah dan Musallah sebanyak 122 buah. Masjid dan Musallah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Sinjai (BPS Kab. Sinjai, 2020: 84).

3. Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang dapat ditemukan di Bosowasi dapat disajikan deskripsinya sebagai berikut:

a. Kabupaten Bone

Lembaga pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari: (1) Raudatul Athfal memiliki sekolah sebanyak 63 buah, guru sebanyak 207 orang dan murid sebanyak 1.484 orang (BPS Kab. Bone, 2020: 71). (2) Madrasah Ibtidaiyah memiliki sekolah sebanyak 90 buah, guru sebanyak 905 orang dan murid sebanyak 8.376 orang (BPS Kab. Bone, 2020: 75), (3) Madrasah Tsanawiyah memiliki sekolah sebanyak 98 buah, guru sebanyak 1.258 orang dan murid sebanyak 13.325 orang (BPS Kab. Bone, 2020: 79), (4) Madrasah Aliyah memiliki sekolah sebanyak 48 buah, guru sebanyak 644 orang dan murid sebanyak 6.728 orang (BPS Kab. Bone, 2020: 84-86), (5) Peguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Bone, yaitu: IAIN Bone, STKIP Muhammadiyah Bone dan STAI Al-Ghazali Bone (Hasil Observasi, 2020), dan (6) Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Bone, yaitu: Pondok Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar, Pondok Pesantren Darul Huadh, Pondok Pesantren al-Mubarak, Pondok Pesantren Ma'had Hadists Biru, Pondok Pesantren Nurul Aeyn As'adiyah, Pondok Pesantren al-Ikhlash, Pondok Pesantren al-Kahyah, Pondok Pesantren Pembangunan Yapit, Pondok Pesantren Darud Taqwa, dan Pondok Pesantren al-Amir Fil Jannah (Hasil Observasi, 2020).

b. Kabupaten Soppeng

Lembaga pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari: (1) Raudatul Athfal memiliki sekolah sebanyak 52 buah, guru sebanyak 171 orang dan murid sebanyak 1.604 orang (BPS Kab. Soppeng, 2020: 100), (2) Madrasah Ibtidaiyah memiliki sekolah sebanyak 20 buah, guru sebanyak 180

orang dan murid sebanyak 1.138 orang (BPS Kab. Soppeng, 2020: 104-106), (3) Madrasah Tsanawiyah memiliki sekolah sebanyak 33 buah, guru sebanyak 467 orang dan murid sebanyak 3.676 orang (BPS Kab. Soppeng, 2020: 110-112), (4) Madrasah Aliyah memiliki sekolah sebanyak 9 buah, guru sebanyak 445 orang dan murid sebanyak 1.487 orang (BPS Kab. Soppeng, 2020: 119-121).), (5) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Soppeng, yaitu: STAI Al-Ghazali Soppeng (Hasil Observasi, 2020), dan (6) Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Soppeng, yaitu: Ponpes Yasrib Lapajung, Ponpes DDI Pattojo, Ponpes Pergis Ganra, Ponpes Darunnaim Pesse, Ponpes Darusshalihin, Ponpes Siratal Mustakim, Ponpes NU Sering, Ponpes Nurussa'adah, dan PPTQ Imam Hafsh (Hasil Observasi, 2020).

c. Kabupaten Wajo

Lembaga pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari: (1) Raudatul Athfal memiliki sekolah sebanyak 39 buah, guru sebanyak 133 orang dan murid sebanyak 1.849 orang (BPS Kab. Wajo, 2020: 67). (2) Madrasah Ibtidaiyah memiliki sekolah sebanyak 40 buah, guru sebanyak 346 orang dan murid sebanyak 4.239 orang (BPS Kab. Wajo, 2020: 71), (3) Madrasah Tsanawiyah memiliki sekolah sebanyak 35 buah, guru sebanyak 537 orang dan murid sebanyak 6.993 orang (BPS Kab. Wajo, 2020: 75), (4) Madrasah Aliyah memiliki sekolah sebanyak 15 buah, guru sebanyak 238 orang dan murid sebanyak 2.959 orang (BPS Kab. Wajo, 2020: 82), (5) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu: Institut Agama Islam As'adiyah (Hasil Observasi, 2020), dan (6) Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu: Pondok Pesantren As'adiyah Putra Sengkang, Pondok Pesantren As'adiyah Putri, Pondok Pesantren Nurul As'adiyah Calaccu, Pondok Pesantren Mujahidin As'Adiyah Kampir, Pondok Pesantren As'adiyah Atapange, Pondok Pesantren Masyitha, Pondok Pesantren Ibnu Rahman Sengkang, Pondok

Pesantren al-Muhlisin DDI, Pondok Pesantren Darul As'Adiyah, Pondok Pesantren Raodhatutthalibin, Pondok Pesantren al-Mu'minin, Pondok Pesantren al-Mujahidin Muhammadiyah, Pondok Pesantren al-Mubarak DDI Tobarakka, (Hasil Observasi, 2020).

d. Kabupaten Sinjai

Lembaga pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang ada di Kabupaten Sinjai terdiri dari: (1) Raudatul Athfal memiliki sekolah sebanyak 31 buah, guru sebanyak 118 orang dan murid sebanyak 950 orang (BPS Kab. Sinjai, 2020: 54). (2) Madrasah Ibtidaiyah memiliki sekolah sebanyak 30 buah, guru sebanyak 414 orang dan murid sebanyak 2.431 (BPS Kab. Sinjai, 2020: 58), (3) Madrasah Tsanawiyah memiliki sekolah sebanyak 40 buah, guru sebanyak 788 orang dan murid sebanyak 3.841 (BPS Kab. Sinjai, 2020: 62), (4) Madrasah Aliyah memiliki sekolah sebanyak 28 buah, guru sebanyak 464 orang dan murid sebanyak 3.233 orang (BPS Kab. Sinjai, 2020: 67-69), (5) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Sinjai, yaitu: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai (Hasil Observasi, 2020), (6) yang ada di Kabupaten Sinjai, yaitu: Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pucee, Pondok Pesantren Darul Hikmah Lenggolenggo, Pondok Pesantren Darul Istiqomah Biroro, Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren Syiar Islam, Pondok Pesantren Darul Istiqamah Sinjai Utara, Pondok Pesantren Ibadurrahman, Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappae, dan Pondok Pesantren Darul Muttaqin (Hasil Observasi, 2020).

4. Lembaga Pemerintahan dalam Bidang Keagamaan

Lembaga Pemerintahan dalam bidang Keagamaan yang ada di Bosowasi, yaitu: (1) Kementerian Agama Kabupaten Bone dan 27 KUA yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone, (2) Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dan 6 KUA yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Soppeng, (3) Kementerian Agama Kabupaten Wajo dan 14 KUA yang tersebar di 14 kecamatan di

Kabupaten Wajo, dan (4) Kementerian Agama Kabupaten Sinjai dan 9 KUA yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai (Hasil Observasi, 2020).

Tugas pokok kantor-kantor Kementerian Agama tersebut di atas adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut disebutkan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 (Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama). Sedangkan pada pasal 8 disebutkan tentang fungsi-fungsi yang harus diselenggarakan. Fungsi-fungsi tersebut, yaitu: (1) perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota, (2) pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah, (3) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, (4) pembinaan kerukunan umat beragama, (5) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, (6) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, (7) dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

Sedangkan tugas pokok KUA tersebut di atas adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016. Tugas dan fungsinya, yaitu: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, (3) pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan, (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah, (5) pelayanan

bimbingan kemasjidan, (6) pelayanan bimbingan hisab ruykat dan pembinaan Syariah, (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan (9) pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

5. Organisasi Kemasyarakatan Islam

Ada beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yang populer dan bersosialisasi dengan masyarakat di Kawasan Bosowasi. Di antara Ormas-ormas Islam tersebut, yaitu: MUI, NU, Muhammadiyah, LDI, Jama'ah Tabliq, Wahdah Islamiyah, HMI, dan PMII (Hasil Observasi, 2020).

Tujuan utama Ormas Islam tersebut di atas disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuannya, yaitu untuk: (1) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, (2) memberikan pelayanan kepada masyarakat, (3) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (4) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, (6) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (7) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, dan (9) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan h. mewujudkan tujuan Negara.

Sedangkan fungsinya yang disebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, yaitu: (1) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, (2) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, (3) penyalur aspirasi masyarakat, (4) pemberdayaan masyarakat, (5) pemenuhan pelayanan social, (6) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan (7) pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Toleransi Beragama

Hasil obsevasi (2020) yang dilakukan tentang toleransi beragama pada lima kecamatan untuk setiap kabupaten di Kawasan Bosowasi dapat digambarkan bahwa masyarakat di Kawasan Bosowasi secara umum merupakan pemeluk agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai dengan keadaan yang yang religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam. Sekalipun demikian, di Kawasan Bosowasi juga ditemukan tempat-tempat peribadatan agama-agama lain. Para pemeluk agama lain di kawasan tersebut cukup bebas untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinannya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan di Kawasan Bosowasi karena mereka saling hormat menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Di samping itu peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.

Ormas Islam di Boswasi seperti NU dan Muhammadiyah selama ini gencar mempromosikan keberagaman moderat. NU dikenal dengan gagasan "Islam Nusantara", yakni corak keislaman yang adaptif pada tradisi dan kultur lokal-tradisional. Sementara Muhammadiyah dikenal dengan agenda "Islam Berkemajuan", yakni Islam yang selaras dengan spirit modernitas dan kemanusiaan universal. NU dan Muhammadiyah merupakan dua ormas Islam paling otoritatif terbukti mampu menjadi inisiator penggerak program kerukunan beragama di Kawasan Bosowasi. Tidak hanya itu, dengan jaringan dan modal sosial yang dimilikinya, NU dan Muhammadiyah selama ini juga menjadi benteng umat Islam di Kawasan Bosowasi dalam melawan derasnya gelombang konservatisme keagamaan.

Di sisi lain, kementerian agama di Kawasan Bosowasi cukup serius memerhatikan sejumlah aspek yang penting bagi terwujudnya

kerukunan dan moderasi beragama. Aspek-aspek tersebut antara lain, yaitu: (1) mendorong agenda moderasi keberagamaan dalam konteks Islam dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi cara pandang keagamaan yang konservatif, eksklusif, dan intoleran yang dilakukan oleh para penceramah agama melalui media sosial di Kawasan Bosowasi, (2) Kedua, menghidupkan kembali dialog antaragama yang dilandasi spirit mencari titik temu untuk menciptakan relasi sosial yang damai dan egaliter di Kawasan Bosowasi. Hal ini bertujuan untuk mencari konsensus bersama ihwal hidup damai berdampingan, dan (3) Ketiga, mewujudkan keadilan dan kesetaraan hak bagi seluruh kelompok agama yang ada di Kawasan Bosowasi.

Kantor Kementerian Agama beserta Pemerintah dan para pemuka agama di Kawasan Bosowasi senantiasa membangun karakter untuk saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, memelihara keharmonisan dan kerja sama sosial dalam bermasyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pemeluk agama. Sehingga terwujud kenyamanan dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan ekonomi dan kestabilan politik.

MUI juga demikian adanya, misalnya membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dilakukannya bersama dengan instansi yang terkait dan pemerintah daerah di Kawasan Bosowasi. Dalam rangka menjaga kedamaian antar umat beragama, MUI di Kawasan Bosowasi mengadakan pertemuan dengan pemuka agama yang ada di kawasan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan kebangsaan, memberi pemahaman tentang pentingnya kerukunan dan memberi pemahaman cara mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini pada pribadi Nabi Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah dimana beliau telah memberi teladan bagaimana cara hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Slaah satunya

adalah toleransi antar umat beragama. Ini semua adalah sunatullah atau hukum alam, dimana manusia hidup dalam heterogenitas dari berbagai jenis suku, bangsa dan agama.

Dalam rangka mewujudkan kerukunan, MUI di Kawasan Bosowasi berusaha memberikan pemahaman dan mengamalkan ajaran agama supaya tidak terjadi intoleran dalam hidup beragama. Kelihatannya pemahaman agama yang dangkal menurut MUI di Kawasan Bosowasi akan menimbulkan radikalisme dan menganggap diri paling benar sedangkan orang lain salah semua. Masih dalam pespektif MUI di Kawasan Bosowasi bahwa orang yang tidak memahami dan mengamalkan ajaran agama juga cenderung menjadi pribadi yang liberalis. Dimana mereka lebih memprioritaskan hak azazi manusia meskipun bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga pribadinya tidak lagi merujuk kepada nilai-nilai agama melainkan hanya untuk kepentingan dan kepuasan pribadi semata. Oleh karenanya, dalam pandangan MUI di Kawasan tersebut bahwa memahami agama bukan saja secara tekstual namun juga secara kontekstual, meyakini bahwa agama adalah rahmatan lil 'alamiin, yang menjadi rahmat bagi diri serta alam dan lingkungan sekitar.

C. Perilaku Sosial Keagamaan

Perilaku sosial keagamaan adalah perbuatan melaksanakan ajaran agama yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati serta diimplementasikan di wilayah sosial masyarakat. Kontekstualisasinya dengan ajaran Islam, perbuatan itu merupakan bentuk penghayatan terhadap ajaran Islam yang dipelajari dan diamalkannya. Bukan hanya sekadar melaksanakan rutinitas ibadah sehari-hari melainkan lebih dari itu, yakni aktivitas itu memiliki motif kuat dalam menjalankan ajaran agama yang dimaknainya sebagai ibadah ke dalam bentuk keputusan tindakan sosial yang konkret dan bermakna bagi sesama dan lingkungannya. Ada sinergitas antara pelaksanaan ajaran agama dan tindakan sosial.

Hal ini banyak sekali yang diwujudkan di Kawasan Bosowasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hidup damai, tenteram, saling menjalin kasih sayang, dan tolong-menolong di antara sesama dan lain-lain. Karena Kawasan Bosowasi kental dengan nuansa suku bugisnya, ajaran-ajaran agama diakulturasikan dengan budaya mereka.

Hasil obsevasi (2020) yang dilakukan tentang perilaku sosial keagamaan pada lima kecamatan untuk setiap kabupaten di Kawasan Bosowasi dapat digambarkan bahwa masyarakat kawasan Bosowasi berpandangan, keislaman adalah identik dengan kebugisan. Pandangan ini mensyaratkan agar setiap orang Bugis yang sudah akil baliq, yakni sekitar usia 12 tahun, haruslah menjalankan ajaran pokok agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Ajaran pokok tersebut meliputi ibadah formal yang umum, yaitu shalat lima kali sehari semalam, berpuasa pada bulan suci Ramadhan, serta membayar zakat fitrah.

Pandangan di atas tidaklah mengherankan jika muncul kesan di kalangan masyarakat awam bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang dianut oleh orang-orang Bugis yang ada di Kawasan Bosowasi. Namun karena proses keislaman di kalangan warga di Kawasan Bosowasi tidak merata maka secara umum dilihat dari segi tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam dua kelompok masyarakat, yakni mereka yang tergolong memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dikategorikan baik yang di kalangan masyarakat Bosowasi dikenal sebagai topagama, dan mereka yang tergolong sebagai muslim nominal lantaran lahir sebagai orang Bugis dan mewarisi agama Islam dari orang tua mereka, namun tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari relatif sangat rendah yang di kalangan masyarakat Bosowasi dikenal sebagai muslim sossorang. Kedua kelompok ini mengembangkan pola pemahaman dan pengamalan

agama yang berbedada antara satu kelompok dengan yang lainnya. Perbedaan ini, sesungguhnya, berpotensi menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya jarak sosial antarkomunitas di kalangan masyarakat di Kawasan Bosowasi. Perbedaan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ini mempengaruhi proses integrasi sosial antarkomunitas muslim Bugis di Kawasan Bosowasi merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam untuk mengetahui hubungan perbedaan kecenderungan pemahaman keagamaan tersebut dengan ikatan sosial yang telah terbina begitu kuat di kalangan masyarakat Bugis di Kawasan Bosowasi.

Mereka yang digolongkan sebagai orang-orang pagama, umumnya, memiliki tingkat kehidupan ekonomi, pendidikan dan sosial yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kelompok sossorang. Meskipun tidak semua orang pagama tergolong beruntung menjalani kehidupan ekonomi yang lebih baik berdasarkan kenyataan masih terdapat sejumlah diantaranya yang secara ekonomi tergolong miskin, kelompok ini umumnya dapat dikategorikan memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi yang lebih baik. Mereka pada umumnya memiliki penghasilan yang tetap, baik sebagai petani pemilik lahan pertanian atau perkebunan, pedagang, pegawai negeri atau swasta serta pengusaha. Kehidupan ekonomi yang terbilang baik tersebut memungkinkan mereka untuk memberikan perhatian memadai kepada pemenuhan kebutuhann spiritual dengan jalan berusaha menunaikan kewajiban agama yang membutuhkan kemampuan ekonomi memadai, misalnya, membayar zakat, memberi infaq atau sadaqah, termasuk berusaha menunaikan ibadah haji yang hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang memungkinkan yang bersangkutan menunaikannya. Dilihat dari sisi pendidikan, umumnya, kelompok pagama memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dari kelompok sossorang. Pada umumnya, orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan relatif baik memiliki kesadaran

beragama yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menganut agama atas dasar pengetahuan yang diperoleh baik dengan cara belajar sendiri ataupun dengan cara menempuh pendidikan agama secara formal.

Jika dilihat dari perspektif kehidupan sosial, kelompok muslim pagama, umumnya, terdiri atas orang-orang yang berada pada lapisan sosial menengah ke atas. Hal ini merupakan konsekuensi dari proses keislaman yang bermula dari kalangan bangsawan kerajaan-kerajaan Bugis di Kawasan Bosowasi. Atas jasa merekalah, Islam kemudian berkembang di kalangan lapisan masyarakat umum. Tidak sedikit dari keluarga kerajaan tergolong orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi penganjur Islam di tengah-tengah masyarakat Bugis.

Hal tersebut menunjukkan proses keislaman dijalankan secara struktural dengan menggunakan otoritas politik secara top-down yang dimulai dari keluarga kerajaan. Peranan yang dimainkan oleh penguasa dalam mendukung proses keislaman di kalangan masyarakat Bugis di Kawasan Bosowasi memberi dorongan yang kuat bagi kalangan bangsawan Bugis-Bugis untuk menjadikan diri mereka sebagai teladan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Selain itu, adanya penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang baik mendorong para penguasa serta pemuka masyarakat untuk berusaha memahami dan menjalankan ajaran Islam secara baik. Karena itulah maka identitas keislaman sangat kuat di kalangan kaum bangsawan Bugis di Kawasan Bosowasi.

Perbedaan kecenderungan pemahaman keagamaan berpotensi menjadi sumber kecemburuan sosial yang pada gilirannya dapat menyulut terjadinya konflik sosial yang berpotensi merusak hubungan antar komunitas di dalam masyarakat di Kawasan Bosowasi. Terjadinya konflik, umumnya, merupakan akibat langsung

dari perbedaan dan pertentangan kepentingan, pendapat, ide dan paham. Dilihat dari sudut perbedaan kepentingan bahwa perpecahan dapat terjadi karena kelangkaan posisi dan sumber-sumber yang diperebutkan. Makin sedikit posisi yang diperoleh, makin tajam pula konflik dan persaingan di antara peserta konflik. Disebabkan karena perbedaan kepentingan, faham dan ide merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat, maka sudah pasti konflik menjadi sesuatu yang selalu hadir sepanjang perjalanan kehidupan masyarakat tersebut. Karena itu maka tidak bisa dihindarkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Namun dalam melihat konflik yang terjadi di dalam masyarakat perlu dibedakan antara konflik dengan kekerasan, dengan konflik yang tidak menggunakan kekerasan.

Meskipun hubungan antarkomunitas di kalangan masyarakat muslim Bugis di Kawasan Bosowasi tidak sepenuhnya bebas dari konflik antarindividu maupun antarkelompok, namun hal tersebut sangat jarang terjadi. Adanya kesadaran untuk saling memahami dan menerima keadaan masing-masing individu ataupun kelompok menjadi faktor utama dalam menjalin hubungan anatarindividu maupun antarkelompok di kalangan masyarakat Bugis. Kesadaran ini tumbuh di atas nilai-nilai Islam yang berakulturasi dengan budaya mereka. Nilai-nilai akulturasi tersebut, yaitu: *Sipakatau*, *Sipakainge'*, *Sipakalebbi*, dan *Sipatokkong*. *Sipakatau*, adalah sifat yang tidak saling membeda-bedakan, semua manusia sama, tidak ada perbedaan derajat, kekayaan, kecantikan, dsb. Dalam kehidupan, kita tidak selayaknya membedakan orang-orang. Kita harus saling menghargai dan menghormati sesama. *Sipakalebbi*, adalah sifat saling menghargai sesama manusia. Kita sesama manusia, harus saling menghargai. Semua manusia ingin diperlakukan dengan baik. Dengan *sipakalebbi* diharapkan akan membawa manusia ke jalan yang benar. Jadi intinya adalah, apabila kita ingin diperlakukan dengan baik maka perlakukan pula orang lain

dengan baik pula. Sipakinge, adalah sifat di mana kita saling mengingatkan. Apabila ada di antara kita yang melakukan kesalahan tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Tujuan saling mengingatkan agar dapat mengubah dan menghindari sifat-sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah swt. Sipatokkong, adalah sifat saling bekerja sama. Sipatokkong berarti berdiri bersama-sama. Contoh kecilnya, orang Bugis dalam melakukan suatu pekerjaan biasanya dilakukan bersama-sama. Pekerjaan yang berat apabila dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Dalam arti lain, sipatokkong juga bisa diartikan saling membantu. Saling membantu kepada saudara-saudara kita yang sedang susah maupun yang sedang membutuhkan bantuan.

Kesadaran untuk menjalin hubungan yang harmonis di kalangan sesama warga Bugis di Kawasan Bosowasi tumbuh di atas keinginan untuk saling menerima keadaan, pandangan dan tindakan dalam satu tatanan kehidupan bersama yang diliputi semangat saling menghargai sebagai manusia yang dalam istilah Bugis disebut sipakatau. Sepanjang semangat sipakatau ini dijadikan rujukan utama di dalam berhubungan dengan orang lain maka bisa dipastikan terjadinya hubungan yang saling menghargai antarsesama manusia tanpa mempedulikan perbedaan yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan cara pandang terhadap kehidupan termasuk perbedaan paham dan kecenderungan pengamalan keagamaan.

Untuk membangun kehidupan sosial yang didasarkan atas semangat saling menghargai itulah diperukan kesadaran untuk menjadikan norma-norma sosial dan budaya yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai kekuatan pengikat dalam menjalin berbagai aktivitas sosial baik antara individu satu dengan individu lainnya dalam satu komunitas yang sama maupun antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya di dalam masyarakat. Proses terjadinya integrasi sosial berawal dari munculnya kesempatan untuk mengadakan interaksi dengan orang-

orang lain yang kemudian melahirkan komunikasi dalam bentuk kontak sosial antar individu maupun antara kelompok yang terlibat dalam kontak sosial tersebut. Jika proses interaksi ini terjadi berulang-ulang maka masing-masing individu maupun kelompok yang terlibat di dalamnya secara bersama-sama akan melahirkan norma-norma yang akan dijadikan penuntun bagi masing-masing anggota dari masing-masing kelompok dalam melakukan tindakan sosial. Konsensus yang lahir dari kebutuhan untuk membina kehidupan bersama akan berfungsi secara baik selama para anggota dari masing-masing kelompok yang berbeda merasakan manfaatnya secara fungsional dalam membina tata hubungan sosial. Dengan demikian maka untuk memelihara dan membina proses interaksi sosial yang diinginkan bersama diperlukan adanya kesamaan persepsi di samping kesamaan sikap terhadap norma-norma yang telah disepakati tersebut. Tanpa adanya norma yang disepakati sulit diharapkan terciptanya proses interaksi sosial yang dapat menjamin terjadinya tatanan kehidupan sosial yang diharapkan.

Pola integrasi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat muslim Bugis di Kawasan Bosowasi, terdiri dari tiga, yaitu: (1) Adanya nilai-nilai sosial fundamental yang disepakati sebagai acuan normatif dan praktis dalam berinteraksi dengan sesama warga masyarakat, (2) adanya kesadaran untuk memelihara kesetiaan ganda kepada masing-masing unit sosial sebagai wadah menjalin serta memelihara hubungan sosial sambil tetap memelihara kesetiaan kepada masing-masing unit sosial tersebut, dan (3) Adanya tuntutan untuk bekerja sama sebagai konsekuensi saling ketergantungan antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing

Secara teologis keberadaan agama Islam sebagai keyakinan mayoritas penduduk yang mendiami wilayah Kawasan Bosowasi merupakan hal yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Hampir seluruh orang Bugis beragama Islam. Jika ada orang Bugis yang tercatat

sebagai penganut agama selain Islam, maka hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya usaha dari penganut agama lain yang berusaha untuk mengajak mereka memeluk agama tertentu selain Islam. Mereka ini, sesungguhnya, kurang atau bahkan tidak menyadari kalau mereka telah dikategorikan sebagai bukan penganut Islam lagi. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini, umumnya, tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam. Penerimaan Islam sebagai agama mereka merupakan keniscayaan budaya yang terkait dengan panngadakkang. Mereka pada umumnya hanyalah menerima Islam sebagai warisan dari orang tua mereka sehingga mereka tetap merasa sebagai muslim. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka yang dikategorikan sebagai muslim sossorang ini tidak taat menjalankan ibadah ritual. Tidak sedikit di antara mereka yang hanya menjalankan ketentuan syari'at Islam dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan dan kematian. Atau jika memungkinkan mereka ikut menyambut hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai bagian dari tradisi dalam masyarakat Bugis

Meskipun masyarakat Bugis di Kawasan Bosowasi pada umumnya merupakan penganut agama Islam, namun tidaklah semuanya tergolong taat menjalankan ibadah ritual termasuk ibadah pokok sekalipun seperti shalat dan puasa. Lebih dari itu, mereka juga tergolong orang-orang yang masih setia menjalankan tradisi keagamaan yang merupakan kelanjutan dari kepercayaan pra-Islam. Orang-orang di Kawasan Boswasi yang masih mempraktekkan tradisi keagamaan lokal tersebut akan menolak jika dikatakan sebagai bukan muslim. Kuatnya semangat keagamaan orang-orang Bugis sebagai muslim menyebabkan mereka hanya mengakui Islam sebagai agama mereka, meskipun dalam kenyataan sehari-hari sebagian dari mereka yang memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang Islam juga mempertahankan kepercayaan yang berasal dari leluhur mereka yang sebagiannya dicampur ke dalam pengamalan ajaran Islam.



REALITAS KETAHANAN PANGAN

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Permasalahan Dan Potensi Pangan
- B. Arah Kebijakan
- C. Strategi Umum
- D. Kebijakan Ketahanan Pangan

BAB 5.2

REALITAS KETAHANAN PANGAN

Data tentang realitas ketahanan pangan di Bosowasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan dan atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai direduksi ke dalam empat tema besar, yaitu: Permasalahan dan potensi pangan, arah kebijakan, strategi umum, dan kebijakan ketahanan pangan.

A. Permasalahan dan Potensi Pangan

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, dan hal ini menjadi pilar bagi ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumahtangganya secara berkelanjutan. Hal ini dapat dikatakan terwujud jika telah memenuhi dua aspek, yaitu: Pertama, tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat ditingkatkan kapasitasnya agar semakin mampu meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya, baik melalui usahatani maupun usaha lainnya. Peningkatan pendapatan akan menambah kemampuan daya beli, sehingga menambah keleluasaan masyarakat untuk memilih pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Peningkatan produksi komoditas pangan oleh masyarakat, di samping meningkatkan ketersediaan pangan dalam rumah tangga juga akan

memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di Kawasan Bosowasi, yang selanjutnya merupakan kontribusi terhadap ketersediaan pangan nasional.

Bagi kelompok masyarakat tertentu yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan seperti golongan miskin, ibu hamil dan anak balita, pemerintah daerah wajib mengupayakan jaminan akses pangan bagi mereka, agar terpenuhi haknya untuk memperoleh pangan yang cukup.

Pada tataran rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi adalah masih besarnya proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab, sehingga mereka mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien. Jika kondisi yang mereka alami ini berkelanjutan, maka Kawasan Bosowasi akan kehilangan potensi terbaik dari sebagian sumberdaya manusianya.

Pada sisi lain, Kawasan Bosowasi mempunyai keunggulan komparatif sebagai kawasan agraris dan maritim. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing. Dengan pendekatan demikian, perekonomian yang dikembangkan di Kawasan Bosowasi memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Dalam kaitan ini, pembangunan ekonomi di bidang pangan, baik yang berbasis tanaman, peternakan, perikanan maupun kehutanan, akan memperkuat ketahanan pangan kawasan tersebut. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi di bidang pangan ini merupakan prioritas strategis dalam pembangunan di Kawasan Bosowasi.

Memperhatikan permasalahan dan potensi yang di kemukakan di atas, maka pembangunan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi diarahkan untuk mewujudkan kemandirian

pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pertama, pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air, (2) menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya dari produksi, (3) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, dan (4) meningkatkan kapasitas produksi daerah masing-masing dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan.

Kedua, Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien, (2) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah di Kawasan Bosowasi, dan (3) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Ketiga, dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang, (2) mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas

pangan, (3) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan, dan (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dan sebagainya).

C. Strategi Umum

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan di Kawasan Bosowasi adalah strategi jalur ganda, yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pendapatan, dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk, serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri. Kedua strategi tersebut dijalankan dengan menggerakkan seluruh komponen di daerah masing-masing, yaitu pemerintah daerah, masyarakat termasuk LSM, organisasi profesi, organisasi massa, koperasi, organisasi sosial, serta pelaku usaha, untuk melaksanakan aktivitas ekonominya secara efisien dan bertanggungjawab, melaksanakan kewajiban sosialnya serta, membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, golongan usia lanjut dan cacat ganda.

D. Kebijakan Ketahanan Pangan

Kebijakan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi terdiri dari 14 elemen penting, yang diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah masing-masing, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, dan tingkat wilayah. Ke 14 elemen penting tersebut, yaitu:

Pertama, Menjamin Ketersediaan Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan Lahan Abadi Beririgasi dan Lahan Kering. Kegiatan ini

mencakup penetapan kawasan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan peraturan secara lebih tegas, penataan infrastruktur dan penerapan regulasi atas infrastruktur pertanian, dan penguatan status kepemilikan lahan, (2) Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan. Kegiatan ini meliputi penyebarluasan penerapan teknologi konservasi dan rehabilitasi pada usaha-usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan, serta rehabilitasi lahan-lahan usaha pertanian dan perkebunan secara luas, (3) Pelestarian Sumberdaya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penegakan peraturan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara ramah lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis, konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan dan aliran permukaan, pengembangan infrastruktur pengairan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, serta penyebarluasan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumber daya air dan daerah aliran sungai, (4) Pengembangan dan Penyediaan Benih, Bibit Unggul dan Alsintan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan benih/bibit induk unggul berkualitas spesifik lokasi, perakitan serta pengembangan produksi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi budidaya pertanian, (5) Pengembangan Skim Permodalan yang Kondusif bagi Petani dan Nelayan. Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, baik dalam hal teknis administrasi maupun beban finansial yang harus ditanggung petani/nelayan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pinjaman langsung bergulir kepada kelompok petani/nelayan, pengembangan usaha kredit mikro, pengembangan koperasi simpan pinjam, dikembangkan dan diting-

katkan kualitasnya agar lebih efektif dalam membantu menyediakan modal usaha dan mendidik kedisiplinan mengelola pinjaman pada petani/nelayan, (6) Peningkatan Produktivitas Melalui Perbaikan Genetis dan Teknologi Budaya. Kegiatan ini mencakup perakitan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul spesifik lokasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan serta untuk perbaikan teknologi budidaya, meningkatkan efisiensi, memperbaiki/mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan petani, (6) Peningkatan Efisiensi Penangan Pasca Panen dan Pengolahan. Kegiatan ini antara lain terdiri atas perakitan dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, mendorong pemanfaatan teknologi dan peralatan tersebut melalui penyediaan insentif bagi pelaku usaha, khususnya skala kecil, (7) Penyediaan Insentif Investasi di Bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi pemberian berbagai kemudahan pada investor untuk mengurangi biaya dan waktu di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, antara lain dalam hal perizinan, penyediaan informasi potensi dan teknologi, kepastian hukum atas penguasaan lahan/konsesi, perpajakan dan pungutan lainnya, serta keamanan usaha dari tindak kriminal, dan (8) Penguatan Penyuluhan, Kelembagaan Petani/Nelayan dan Kemitraan. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan penerapan secara meluas pendekatan pemberdayaan/pendampingan kepada kelompok masyarakat petani/ nelayan.

Kedua, Menata Pertanahan dan Tata Ruang/Wilayah. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan Reforma Agraria. Kegiatan ini adalah penataan kembali kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanian untuk memenuhi sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kelestarian sumberdaya alam. Hal ini dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan operasional dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, serta melaksanakannya secara terdesentralisasi dan partisipatif mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat, (2) Penyusunan Tata Ruang Daerah dan Wilayah. Kegiatan ini meliputi perbaikan Rencana Tata Ruang Daerah dan Wilayah secara terkoordinasi antar daerah/wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya dan kelestarian sumberdaya alam, disertai penerapannya secara tegas dan konsisten, dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, (3) Perbaikan Administrasi Pertanahan dan Sertifikasi Lahan. Kegiatan ini meliputi perbaikan sistem pelayanan sertifikasi lahan, fasilitasi/dukungan proses sertifikasi lahan bagi masyarakat kurang mampu dan percepatan penyelesaian masalah administrasi pertanahan secara hukum, dan (4) Penerapan Sistem Perpajakan Progresif Bagi Pelaku Konversi Lahan Pertanian Subur dan Pembiaran Lahan Pertanian Terlantar. Kegiatan ini meliputi penyusunan peraturan dan penerapannya secara tegas bidang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/memberatkan setiap upaya mengkonversi lahan pertanian subur, dan atau membiarkan lahan pertanian terlantar.

Ketiga, Pengembangan Cadangan Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini ditekankan pada fasilitasi pengembangan cadangan pemerintah daerah masing-masing di Kawasan Bosowasi agar setiap jenjang pemerintahan mampu mengatasi masalah kerawanan pangan sesuai kewenangan dan tanggungjawab otonominya. Pengembangan sistem cadangan pangan pemerintah secara berjenjang ini diprioritaskan pada daerah-daerah rentan kerawanan pangan, dengan jenis pangan serta sistem pengelolaan yang sesuai budaya masyarakat setempat, dan (2) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Kegiatan ini

meliputi fasilitasi pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat, di daerah rawan pangan kronismaupun rawan pangan darurat, agar masing-masing kelompok masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola sistem cadangan pangannya untuk mengatasi masalah kerawanan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan dalam aspek manajemen kelompok maupun aspek teknis pengelolaan pangan sehingga kualitas dan nilai ekonominya dapat ditingkatkan.

Keempat, Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan yang Efisien. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Distribusi. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pendaratan, serta pengembangan sistem angkutan umum yang menjangkau daerah-daerah terpencil dan rawan gangguan bencana. Pemerintah melaksanakan pembangunan pada segmen-segmen yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta, dan memfasilitasi peran swasta untuk mengembangkan segmen-segmen yang menguntungkan, (2) Penghapusan Retribusi Produk Pertanian dan Perikanan. Kegiatan ini meliputi penetapan aturan penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, penelaahan terhadap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan membatalkannya bila masih ada, (3) Pemberian Subsidi Transportasi bagi Daerah Sangat Rawan dan Daerah Terpencil. Kegiatan ini antara lain dapat berupa penyediaan pelayanan transportasi bersubsidi oleh pemerintah daerah masing-masing, bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan swasta untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan terisolasi dan daerah terpencil, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut, dan (4) Pengawasan Sistem Persaingan Perdagangan yang Tidak Sehat. Kegiatan ini meliputi pengkajian dan penerapan regulasi perdagangan

yang menjamin proses yang adil dan bertanggungjawab, serta melindungi para pelaku ekonomi dari persaingan yang tidak sehat.

Kelima, Menjaga Stabilitas Harga Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pemantauan Harga Pangan Pokok Secara Berkala. Kegiatan ini meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga, dan (2) Pengelolaan Pasokan Pangan dan Cadangan Penyangga untuk Stabilisasi Harga. Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah setempat, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah setempat dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/dimobilisasi apabila terjadi kelangkaan pasokan atau gejolak harga.

Keenam, Meningkatkan Aksesibilitas Rumahtangga Terhadap Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan. Kegiatan ini meliputi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memahami peluang dan mendayagunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Peningkatan kapasitas meliputi kemampuan berorganisasi, bekerja sama dan pembentukan modal, keterampilan mengolah sumberdaya alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jaringan usaha. Di samping itu diberikan pula bantuan untuk menambah aset kelompok untuk mempercepat pengembangan usahanya. Tahap selanjutnya adalah peningkatan kesadaran gizi serta sanitasi dan higiene dalam lingkungan rumah

tangga, (2) Peningkatan Efektivitas Program Raskin. Kegiatan ini meliputi perbaikan metode penentuan kelompok sasaran menggunakan informasi terkini, melibatkan masyarakat desa untuk menajamkan proses seleksi kelompok sasaran, memantau dan mengawasi proses penyaluran, dan memberikan saran/umpan balik terhadap efektivitas program Raskin. Di samping itu juga kontribusi pemerintah setempat dalam penyediaan biaya distribusi dari tingkat desa ke titik bagi, dan (3) Penguatan Lembaga Pengelola Pangan di Pedesaan. Kegiatan ini memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.

Ketujuh, Melaksanakan Diversifikasi Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi Seimbang. Kegiatan ini meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumberdaya keluarga untuk meningkatkan gizi, (2) Pengembangan Teknologi Pangan. Kegiatan ini meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat, dan (3) Diversifikasi Usahatani dan Pengembangan Pangan Lokal. Kegiatan ini antara lain adalah memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan

melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri.

Kedelapan, Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan dan Penerapan Sistem Mutu Pada Proses Produksi, Olahan dan Perdagangan Pangan. Kegiatan ini meliputi perumusan dan penetapan sistem mutu, penyuluhan, pelayanan dan fasilitasi penerapan sistem mutu, pemantauan penerapan sistem mutu serta penghargaan terhadap produsen, pengolah dan pedagang di bidang pangan yang telah menerapkan sistem mutu dengan baik, (2) Peningkatan Kesadaran Mutu dan Keamanan Pangan Pada Konsumen. Kegiatan ini meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur formal maupun non formal untuk meningkatkan pemahaman terhadap mutu dan keamanan pangan serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi, dan (3) Pencegahan Dini dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Aturan Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini antara lain adalah kampanye peningkatan kesadaran masyarakat atas berbagai aturan tentang mutu dan keamanan pangan, penerapan sistem pemantauan terhadap produk pangan yang berpotensi pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang dikonsumsi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan dini dan pengawasan.

Kesembilan, Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan Isyarat Dini dan Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi (SKPG). Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat khususnya di kabupaten, terhadap manfaat sistem isyarat dini serta memfasilitasi

penerapannya sesuai kondisi setempat. Di samping itu juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk membangun kemampuan untuk merespon isyarat tersebut secara tepat dan cepat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerawanan pangan, (2) Peningkatan Keluarga Sadar Gizi. Kegiatan ini antara lain meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial kepada keluarga yang membutuhkan melalui sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang sesuai dengan situasi sosial budaya dan ekonomi setempat, (3) Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Peningkatan Gizi Keluarga. Kegiatan ini antara lain adalah penyuluhan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, dan (4) Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini berupa pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.

Kesepuluh, Meningkatkan Peran Serta Masyarakat. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menerapkan sistem penghargaan tingkat nasional kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di bidang pangan dan gizi, untuk memotivasi dan memperluas peran serta lembaga-lembaga pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa.

Kesebelas, Mengembangkan Sumberdaya Manusia. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Perbaikan Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi penataan kembali kelembagaan, peningkatan kualifikasi tenaga pengelola dan pelaksana, peningkatan mutu penyelenggaraan, serta pengembangan jaringan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, (2) Pemberian Muatan Pangan dan Gizi pada Pendidikan Formal. Kegiatan ini meliputi

penyusunan program dan kurikulum yang tepat untuk masing-masing segmen dan tingkatan, sosialisasi kepada pihak terkait dan penerapan secara partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan, dan (3) Pemberian Jaminan Pendidikan Dasar dan Menengah Khususnya bagi Perempuan dan Anak-anak di Pedesaan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan fasilitasi kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh kebijakan wajib belajar sembilan tahun, dengan penajaman prioritas pada perempuan dan anak-anak di pedesaan. Dana alokasi khusus bidang pendidikan, dikombinasikan dengan dana pemerintah daerah dan dana sumbangan masyarakat, digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.



KONTRIBUSI SOSIAL KEAGAMAAN

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Konstruksi Variabel
- B. Konstruksi Diagram Jalur
- C. Pengujian Model

BAB 6.2

KONTRIBUSI SOSIAL KEAGAMAAN

A. Konstruksi Variabel

Dalam mengetahui kontribusi Realitas Sosial Keagamaan (RS) terhadap Penguatan Ketahanan Pangan (PK) rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi dan tanpa mediasi Norma Subjektif (NS) digunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis variance. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Alat bantu yang digunakan berupa program aplikasi statistik *Smart-PLS* Versi 3.3.2 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis variance.

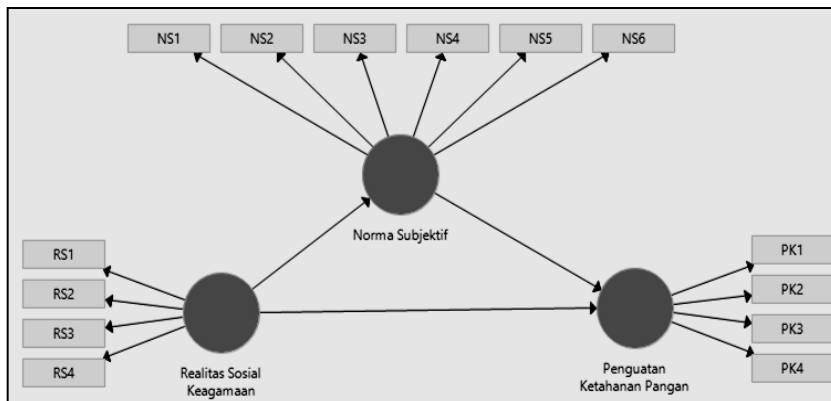
Variabel Realitas Sosial Keagamaan (RS) merupakan variabel eksogen, terdiri dari 4 indikator. Keempat indikator tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan 4 Kementerian Agama dan 4 MUI di Kawasan Bosowasi. Keempat indikator yang dimaksud, yaitu: *Sipakatau'* (tidak saling membeda-bedakan), *Sipakalebbi* (Saling Menghargai), *Sipakainge* (Saling mengingatkan), dan *Sipatokkong* (Saling Bekerjasama). Sedangkan variabel Norma Subjektif (NS) merupakan variabel intervening, terdiri dari 6 indikator. Variabel dan indikatornya diturunkan dari Teori *Planned Behavior*. Indikatornya, yaitu: Pengaruh Teman, Keluarga, Tetangga, Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Adapun variabel Penguatan Ketahanan Pangan (PK) merupakan variabel endogen, terdiri dari 4 indikator. Keempat indikatornya diturunkan dari konsep FAO tentang ketahanan pangan dan indikatornya, yaitu: Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan, dan Stabilitas Pangan.

B. Konstruksi Diagram Jalur

Konstruksi Diagram Jalur untuk pengukuran kontribusi Realitas Sosial Keagamaan (RS) terhadap Penguatan Ketahanan Pangan (PK) rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi dan tanpa mediasi Norma Subjektif (NS), disajikan dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 6.2.1.

Gambar 6.2.1.

Konstruksi Diagram Jalur



Sumber: Dirangkum dari Berbagai Sumber, 2020

Pada gambar 6.2.1. ditunjukkan bahwa konstruk Realitas Sosial Keagamaan (RS) diukur dengan 4 buah indikator, yaitu RS1, RS2, RS3, dan RS4 dan KM5. Demikian juga konstruk Norma Subjektif (NS) diukur dengan 6 indikator, yaitu: NS1, NS2, NS3, NS4, NS5 dan NS6. Sedangkan konstruk Penguatan Ketahanan Pangan (PK) diukur dengan 4 indikator, yaitu PK1, PK2, PK3 dan PK4. Arah panah antara indikator dengan konstruk laten yang menuju indikator menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator reflektif yang relatif sesuai untuk mengukur penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Hubungan yang diteliti dilambangkan dengan anak panah antara konstruk.

Diagram Jalur tersebut di atas dapat dikonversi ke dalam persamaan struktural. Persamaan strukturalnya dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

1. Outer Model

Persamaan struktural untuk indikator variabel eksogen 1 (Realitas Sosial Keagamaan) dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$\chi_{RS1} = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$$

$$\chi_{RS2} = \lambda_2 \xi_2 + \delta_2$$

$$\chi_{RS3} = \lambda_2 \xi_3 + \delta_3$$

$$\chi_{RS4} = \lambda_2 \xi_4 + \delta_4$$

Persamaan struktural untuk indikator variabel eksogen 2 (Intervening: Norma Subjektif) dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$\chi_{NS1} = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$$

$$\chi_{NS2} = \lambda_2 \xi_2 + \delta_2$$

$$\chi_{NS3} = \lambda_2 \xi_3 + \delta_3$$

$$\chi_{NS4} = \lambda_2 \xi_4 + \delta_4$$

$$\chi_{NS5} = \lambda_2 \xi_5 + \delta_5$$

$$\chi_{NS6} = \lambda_2 \xi_6 + \delta_6$$

Persamaan struktural untuk indikator variabel endogen (Penguatan Ketahanan Pangan) dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$\gamma_{PK1} = \lambda_1 \eta_1 + \varepsilon_1$$

$$\gamma_{PK2} = \lambda_2 \eta_2 + \varepsilon_2$$

$$\gamma_{PK3} = \lambda_3 \eta_3 + \varepsilon_3$$

$$\gamma_{PK4} = \lambda_4 \eta_4 + \varepsilon_4$$

Keterangan:

- \mathbf{x}_{RS1-4} : indikator variabel laten eksogen RS1-4 dari ξ (Realitas Sosial Keagamaan)
- \mathbf{x}_{NS1-6} : indikator variabel laten eksogen (intervening) NS1-6 dari ξ (Norma Subjektif)
- \mathbf{y}_{KH1-4} : indikator variabel laten endogen PK1-4 dari η (Penguatan Ketahanan Pangan)
- ξ : variabel laten eksogen (independen/intervening)

- η variabel laten endogen
- λ loading factor indikator variabel laten endogen dan eksogen
- δ : galat pengukuran dari indikator x
- ε : galat pengukuran dari indikator y

2. Inner Model

Persamaan struktural untuk variabel laten (Realitas Sosial Keagamaan, Norma Subjektif, dan Penguatan Ketahanan Pangan) dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$\eta_{PK} = \beta\eta_{PK} + \gamma_{1NS}\xi_{1NS} + \zeta$$

$$\eta_{NS} = \beta\eta_{NS} + \gamma_{2RS}\xi_{2RS} + \zeta$$

$$\eta_{PK} = \beta\eta_{PK} + \gamma_{3RS}\xi_{3RS} + \zeta$$

$$\eta_{PK} = \beta\eta_{PK} + \gamma_{4NS}\xi_{4NS} + \gamma_{5RS}\xi_{5RS} + \zeta$$

Keterangan:

- η_{NS} : variabel laten endogen (Intervening: Norma Subjektif)
- η_{PK} : variabel laten endogen (Penguatan Ketahanan Pangan)
- $\beta\eta_{NS}$: matriks koefisien untuk variabel laten endogen (Intervening: Norma Subjektif)
- $\beta\eta_{PK}$: matriks koefisien untuk variabel laten endogen (Penguatan Ketahanan Pangan)
- γ_{1NS} matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Norma Subjektif) 1
- γ_{2RS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 2
- γ_{3RS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 3
- γ_{4NS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Intervening: Norma Subjektif) 4
- γ_{5RS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 5

- ξ_{1NS} : variabel laten eksogen (Norma Subjektif) 1
- ξ_{2RS} : variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 2
- ξ_{3RS} : variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 3
- ξ_{4NS} : variabel laten eksogen (Intervening: Norma Subjektif) 4
- ξ_{5RS} : variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 5
- ζ : galat struktural

C. Pengujian Model

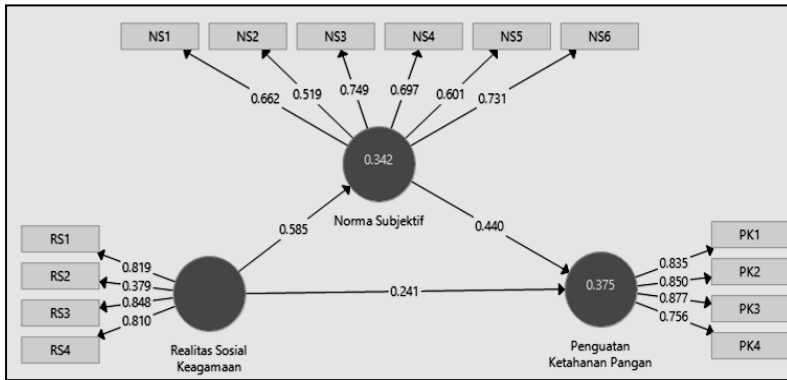
1. Pengujian Outer Model

Outer Model (Model Pengukuran) menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Pada penelitian ini, pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel laten, yaitu: Variabel Realitas Sosial Keagamaan (RS), Norma Subjektif (NS), dan Penguatan Ketahanan Pangan (PK) dengan menggunakan bantuan software *Smart-PLS*. Ukuran refleksif individual dikatakan valid jika memiliki nilai *loading* (λ) dengan variabel laten yang ingin diukur > 0.5 . Jika salah satu indikator memiliki nilai *loading* (λ) < 0.5 maka indikator tersebut harus dibuang (didrop) karena akan mengindikasikan bahwa indikator tersebut tidak cukup baik untuk mengukur variabel laten secara tepat.

Output diagram jalur persamaan struktural pada PLS dengan menggunakan software *Smart-PLS* untuk uji validitas pada masing-masing variabel laten disajikan dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 6.2.2. Pada gambar 6.2.2. ditunjukkan bahwa terdapat satu indikator variabel dengan nilai *loading* (λ) $< 0,5$, yaitu pada variabel indikator RS2 (0,379). Indikator tersebut harus dibuang (didrop). Setelah indikator RS2 dikeluarkan dari model, selanjutnya dilakukan pengujian ulang. Output diagram jalur persamaan struktural pada PLS dengan menggunakan software *Smart-PLS* untuk

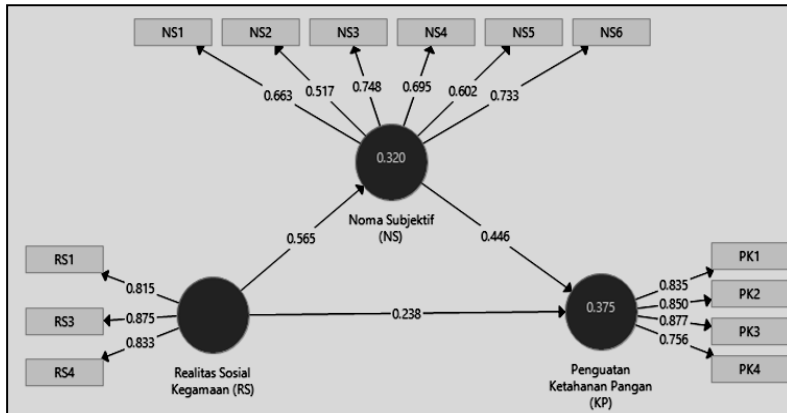
pengujian yang kedua, juga disajikan dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 6.2.2. Output Diagram Jalur Uji Validitas untuk pengujian yang kedua seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.2.3., disimpulkan dalam bentuk tabel seperti yang disajikan pada tabel 6.2.1.

Gambar 6.2.2.
Output Diagram Jalur Uji Validitas (1)



Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Gambar 6.2.3.
Output Diagram Jalur Uji Validitas (2)



Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Tabel 6.2.1.
Hasil Uji Validitas

Hubungan Konstruk dengan Indikator		Loading (λ)	Standart Error	T-Statistik	P-Values
Realitas Sosial Keagamaan (RS)	RS1	0.815	0.022	36.963	0.000
	RS3	0.875	0.014	61.637	0.000
	RS4	0.833	0.022	38.691	0.000
Norma Subjektif (NS)	NS1	0.663	0.038	17.652	0.000
	NS2	0.517	0.055	9.445	0.000
	NS3	0.748	0.028	26.944	0.000
	NS4	0.695	0.040	17.540	0.000
	NS5	0.602	0.044	13.695	0.000
	NS6	0.733	0.028	26.369	0.000
Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	PK1	0.835	0.020	42.763	0.000
	PK2	0.850	0.019	44.882	0.000
	PK3	0.877	0.014	62.062	0.000
	PK4	0.756	0.031	24.782	0.000

Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Pada tabel 6.2.1. dapat disimpulkan bahwa nilai *loading* dari hubungan indikator RS1, RS3 dan RS4 dengan konstruk Realitas Sosial Keagamaan (RS), hubungan indikator NS1, NS2, NS3, NS4, NS5 dan NS6 dengan konstruk Norma Subjektif (NS), hubungan indikator PK1, PK2, PK3 dan PK4 dengan konstruk Penguatan Ketahanan Pangan (PK), masing-masing memiliki nilai *loading* (λ) > 0.5 dan memiliki nilai T-Statistik > 1.64 pada taraf signifikansi $\alpha < 0.05$.

Dengan demikian indikator RS1, RS3 dan RS4 dapat dikatakan valid untuk mengukur konstruk Realitas Sosial Keagamaan (RS), indikator NS1, NS2, NS3, NS4, NS5 dan NS6 juga dapat dikatakan valid untuk mengukur konstruk Norma Subjektif (NS). Demikian pula, indikator PK1, PK2, PK3 dan PK4 dapat dikatakan valid untuk mengukur Penguatan Ketahanan Pangan (PK). Sedangkan model yang dapat ditulis untuk semua indikator tersebut, yaitu:

RS1 = 0.815 Realitas Sosial Keagamaan + 0.022
 RS2 = 0.875 Realitas Sosial Keagamaan + 0.014
 RS3 = 0.833 Realitas Sosial Keagamaan + 0.022
 NS1 = 0.663 Norma Subjektif + 0.038
 NS2 = 0.517 Norma Subjektif + 0.055
 NS3 = 0.748 Norma Subjektif + 0.028
 NS4 = 0.695 Norma Subjektif + 0.040
 NS5 = 0.602 Norma Subjektif + 0.044
 NS6 = 0.733 Norma Subjektif + 0.028
 PK1 = 0.835 Penguatan Ketahanan Pangan + 0.020
 PK2 = 0.850 Penguatan Ketahanan Pangan + 0.019
 PK3 = 0.877 Penguatan Ketahanan Pangan + 0.014
 PK4 = 0.756 Penguatan Ketahanan Pangan + 0.031

Tabel 6.2.2.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	AVE	Nilai Composite Reliability	Nilai Cronbach's Alpha
Realitas Sosial Keagamaan (RS)	0.708	0.879	0.793
Norma Subjektif (NS)	0.641	0.824	0.745
Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	0.690	0.899	0.849

Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Sedangkan untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini, variabel Realitas Sosial Keagamaan (RS), Norma Subjektif (NS) dan Penguatan Ketahanan Pangan (PK) dikatakan reliabel jika nilai AVE variabel-variabel tersebut lebih besar dari 0.5, nilai *Composite Reliability*-nya lebih besar dari 0.7, dan Nilai Cronbach's Alpha-nya lebih besar dari 0.6. Hasil pengujian reliabilitas pada ketiga variabel laten tersebut dengan bantuan software *Smart-PLS* dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti yang disajikan pada tabel 6.2.2.

Pada tabel 6.2.2. dapat disimpulkan bahwa untuk variabel laten eksogen Realitas Sosial Keagamaan (independen) dan Norma Subjektif (intervening) memiliki nilai AVE (*Average Variance Extracted*) lebih besar dari 0.5, memiliki nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0.7, dan memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.6. Demikian pula variabel laten endogen Penguatan Ketahanan Pangan memiliki nilai AVE lebih besar dari 0.5, nilai *Composite Reliability*-nya lebih besar dari 0.7, dan nilai *Cronbach's Alpha*-nya lebih besar dari 0.6. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua konstruk pada model yang digunakan memenuhi kriteria *discriminant validity* dan juga dapat dinyatakan reliabel.

2. Pengujian Inner Model

Pengujian pada Inner Model (Model Struktural) dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Hasil pengujian pada Inner Model dapat dilihat nilai R^2 pada variabel endogen dan nilai *koefisien parameter jalur (path coefficient parameter)*. Hasil pengujian pada Inner Model dengan bantuan software *Smart-PLS* dapat disajikan seperti di bawah ini:

a. Nilai R-Square

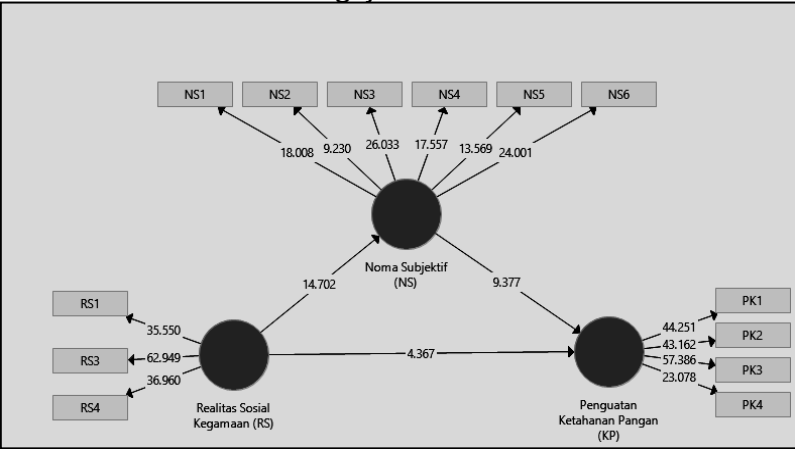
Nilai R^2 yang diperoleh dari hasil pengujian pada *Inner Model* dengan bantuan software *Smart-PLS* untuk variabel endogen Norma Subjektif sebesar 0.342 (34%), yang artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa variasi Norma Subjektif dapat dijelaskan oleh variabel Realitas Sosial Keagamaan hanya sebesar 34% sedangkan sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini, dengan kata lain Besarnya pengaruh Realitas Sosial Keagamaan terhadap Norma Subjektif adalah sebesar 0,342 (34%). Sedangkan untuk variabel endogen Penguatan Ketahanan Pangan adalah sebesar 0.375 (37%), yang artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa variasi Penguatan Ketahanan Pangan di Kawasan Bosowasi dapat dijelaskan oleh variabel Realitas Sosial Keagamaan dengan mediasi Norma Subjektif hanya sebesar

37%, sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini, dengan kata lain bahwa besarnya pengaruh Realitas Sosial Kegamaan dan Norma Subjektif terhadap Penguatan Ketahanan Pangan adalah sebesar 0,375 (37%). Artinya, hanya sebesar 37% Realitas Sosial Keagamaan mampu menjelaskan penguatan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi dengan mediasi Norma Subjektif, sedangkan 63% dijelaskan oleh variable lain.

b. Nilai Koefisien Parameter Jalur

Hasil pengujian Inner Model (Output) disajikan dalam bentuk diagram jalur seperti yang disajikan pada gambar 6.2.4. Lalu Output Diagram Jalur untuk pengujian Inner Model seperti yang disajikan pada gambar 6.2.4. tersebut, disimpulkan dalam bentuk tabel seperti yang disajikan pada tabel 6.2.3.

Gambar 6.2.4. Hasil Pengujian Inner Model



Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Tabel 6.2.3.
Hasil Pengujian Inner Model

No	Hubungan Kausalitas	Koefisien Parameter	Standart Error	T-Statistik	P-Values
Pengaruh Langsung					
1	Norma Subjektif (NS) -> Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	0.446	0.045	9.984	0.000
2	Realitas Sosial Keagamaan (RS) -> Norma Subjektif (NS)	0.565	0.039	14.395	0.000
3	Realitas Sosial Keagamaan (RS) -> Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	0.238	0.054	4.402	0.000
Pengaruh Tidak Langsung					
4	Realitas Sosial Keagamaan (RS) -> Norma Subjektif (NS) -> Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	0.252	0.031	8.058	0.000

Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Pengaruh (langsung dan tidak langsung) variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen seperti yang disajikan pada tabel 6.2.3. dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Norma Subjektif dengan Penguatan Ketahanan Pangan sebesar 0.446 dengan nilai T-statistik 9.984 (> 1.96) pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ (P-Values = 0.000) yang

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Norma Subjektif dengan Penguatan Ketahanan Pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Nilai positif pada koefisien parameter menunjukkan bahwa jika teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat mendorong dan pemerintah daerah memerintahkan rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk menguatkan ketahanan pangannya, maka ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan bagi mereka akan menjadi semakin baik, demikian pula sebaliknya.

Kedua, Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Realitas Sosial Kegamaan dengan Norma Subjektif sebesar 0.565 dengan nilai T-statistik 14.395 (> 1.96) pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ (P-Values = 0.000) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kondisi Realitas Sosial Kegamaan dengan Norma Subjektif. Nilai positif pada koefisien parameternya menunjukkan bahwa jika prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dijadikan sebagai pegangan, maka teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah akan menjadi semakin termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam mendorong dan memerintahkan rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk menguatkan ketahanan pangannya, demikian pula sebaliknya.

Ketiga, Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Realitas Sosial Keagamaan dengan Penguatan Ketahanan Pangan sebesar 0.238 dengan nilai T-statistik 4.402 (> 1.96) pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ (P-Values = 0.000) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Realitas Sosial Keagamaan dengan Penguatan Ketahanan Pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Nilai positif pada koefisien parameternya menunjukkan bahwa jika prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dijadikan sebagai pegangan oleh rumah tangga di Kawasan Bosowasi, maka ketersediaan pangan, akses pangan,

pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan mereka akan semakin baik dan juga semakin terjamin, demikian pula sebaliknya.

Keempat, Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Realitas Sosial Keagamaan dengan Penguatan Ketahanan Pangan melalui mediasi Norma Subjektif sebesar 0.252 dengan nilai T-statistik 8.058 (> 1.96) pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ (P-Values = 0.000) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Realitas Sosial Keagamaan dengan Penguatan Ketahanan Pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi Norma Subjektif. Nilai positif pada koefisien parameternya menunjukkan bahwa jika prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong digunakan sebagai pegangan oleh teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat dalam mendorong dan pemerintah daerah dalam memerintahkan rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk menguatkan ketahanan pangannya, maka ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan bagi mereka akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin, demikian pula sebaliknya.

Sedangkan koefisien-koefisien parameter jalur seperti yang disajikan pada tabel 6.2.3., dapat ditulis model persamaan strukturalnya sebagai berikut: (1) Penguatan Ketahanan Pangan = 0.446 Norma Subjektif + 0.045 , (2) Penguatan Ketahanan Pangan = 0.238 Realitas Sosial Keagamaan + 0.054 , (3) Norma Subjektif = 0.565 Realitas Sosial Keagamaan + 0.039 , dan (4) Penguatan Ketahanan Pangan = 0.446 Norma Subjektif + 0.238 Realitas Sosial Keagamaan + 0.031 .



MODEL PENGUATAN

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Perumusan Model
- B. Hasil Interpretasi

BAB 7.2

MODEL PENGUATAN

A. Perumusan Model

Hasil pengujian *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) sebagaimana yang diuraikan pada Bab sebelumnya (Bab 6.2), menunjukkan bahwa realitas sosial keagamaan berpengaruh secara signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi secara kolektif dan individu. Secara kolektif, yakni rumah tangga bersama-sama dengan pihak lain dalam menguatkan ketahanan pangannya, sedangkan secara individu, yakni rumah tangga dapat menguatkan ketahanan pangannya secara mandiri karena kondisinya sudah berada pada level kemandirian pangan. Namun demikian, secara kolektif peran norma subjektif sangat penting dalam menjadikan realitas sosial keagamaan sebagai prinsip utama dalam membantu rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk menguatkan ketahanan pangannya.

Konstruk realitas sosial keagamaan terdiri dari (1) Tidak saling membeda-bedakan (Sipakatau'), (2) Saling mengingatkan (Sipakainge) dan (3) Saling bekerjasama (Sipatokkong). Ketiga hal ini tidak akan berjalan maksimal tanpa mediasi dari norma subjektif. Norma subjektif, yang dimaksud di sini, adalah pengaruh teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dalam membantu untuk menguatkan ketahanan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Karena peran norma subjektif di tengah-tengah masyarakat, maka rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat melakukan penguatan ketahanan pangan secara kolektif untuk

keberlangsungan rumah tangganya, namun demikian rumah tangga dapat juga melakukannya secara individu. Artinya, ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan bagi mereka akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin baik dilakukan secara kolektif maupun secara individu. Jika demikian adanya, maka ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dikuatkan dengan tiga prinsip utama, yaitu: Sipakatau, Sipakainge, dan Sipatokkong baik secara kolektif maupun secara individu.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi secara sosial keagamaan. Oleh karena realitas sosial keagamaan berpengaruh secara signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi baik secara langsung maupun tidak langsung, maka ada model penguatan yang dapat dirumuskan, yaitu model penguatan secara kolektif dan model penguatan secara individu. Kedua model penguatan tersebut, dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 7.2.1 dan 7.2.2.

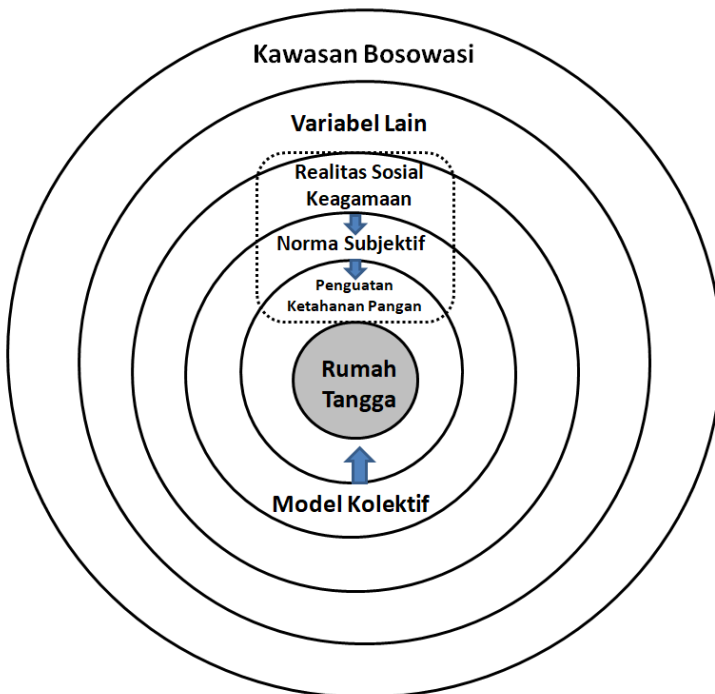
Pada gambar 7.2.1 ditunjukkan bahwa model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dilakukan secara kolektif dengan mediasi norma subjektif. Hal mensiratkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin jika dikuatkan dengan realitas sosial keagamaan melalui mediasi norma subjektif. Atas dasar ini dapat dinyatakan bahwa jika teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah menjadikan prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dalam membantu rumah tangga untuk mengelola pangannya, maka ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangannya akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin. Akan tetapi perlu disadari bahwa model penguatan

ketahanan pangan seperti yang digambarkan tersebut di atas bukanlah segala-segalanya melainkan hanya sekitar 37% kontribusi sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Sedangkan 63% merupakan kontribusi dari faktor lain. Meskipun demikian adanya, penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga akan mudah dilakukan jika prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong bisa dijadikan pegangan oleh teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat dan juga oleh pemerintah daerah dalam membantu rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk mengelolah pangannya jika kondisinya belum berada pada level kemandirian pangan. Jika demikian adanya maka model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi norma subjektif dapat ditetapkan sebagai rumusan model penguatan ketahanan pangan secara kolektif bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi.

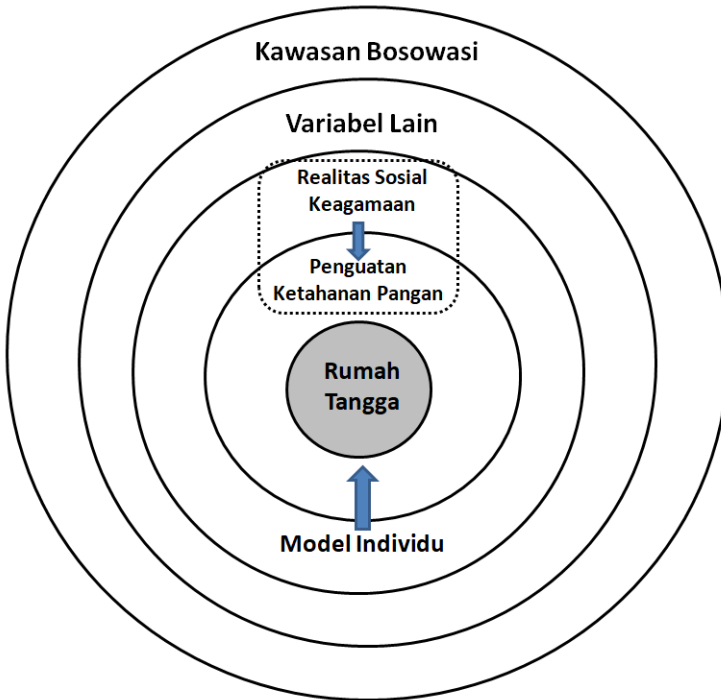
Sedangkan pada Gambar 7.2.2 ditunjukkan bahwa model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dilakukan secara mandiri tanpa mediasi norma subjektif. Hal ini mensiratkan bahwa jika kondisi pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi sudah berada pada level kemandirian pangan, yakni sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam mengelolah pangannya sendiri, dimana realitas sosial keagamaan dijadikan sebagai prinsip utama dalam mengelola pangannya, maka kondisi pangannya akan menjadi semakin baik dan juga menjadi semakin terjamin meskipun dilakukannya secara mandiri tanpa mediasi norma subjektif. Atas dasar ini, maka dapat dinyatakan bahwa jika rumah tangga di Kawasan Bosowasi menjadikan prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dalam mengelola pangannya sendiri, maka ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangannya akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin. Akan tetapi perlu disadari bahwa model penguatan ketahanan pangan seperti yang digambarkan tersebut di

atas bukanlah segala-segalanya melainkan hanya sekitar 37% kontribusi sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Sedangkan 63% merupakan kontribusi dari faktor lain. Meskipun demikian adanya bahwa prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sapatokkong bisa dijadikan pegangan oleh rumah tangga di Kawasan Bosowasi dalam mengelolah pangannya sendiri jika kondisinya sudah berada pada level kemandirian pangan. Jika demikian adanya maka model penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi tanpa mediasi dapat ditetapkan sebagai rumusan model penguatan ketahanan pangan secara individu bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi.

Gambar 7.2.1
Model Penguatan Kolektif



Gambar 7.2.2
Model Penguatan Individu



B. Hasil Interpretasi

Studi ini mengasumsikan bahwa: (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat di daerah dapat dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan rumah tangga, (2) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga yang berorientasi kepada realitas kehidupan sosial keagamaan di daerah akan lebih mudah dilakukan, dan (3) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi akan lebih mudah dikembangkan jika dilakukan secara sosial keagamaan baik melalui mediasi norma subjektif maupun tanpa mediasinya. Dalam merespon tiga asumsi studi ini digunakan hasil studi sebagaimana yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya.

Sedangkan dalam memaknai hasil studi ini digunakan teori struktur sosial, konstruksi sosial, perubahan sosial dan konsep falah dalam Islam.

1. Rumah Tangga di Kawasan Bosowasi

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Rumah tangga di sini hanya terbatas pada keluarga tertentu di Kawasan Bosowasi yang dijadikan sebagai uni analisis dalam studi ini. Jika dipandang dari aspek struktur sosial, sesungguhnya keluarga itu merupakan salah satu jenis lembaga sosial, yakni lembaga sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang memiliki peran dan fungsi tersendiri.

Sebagai lembaga sosial, keluarga di Kawasan Bosowasi telah melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Anak-anak mereka berkembang, melihat dan mengenal arti diri sendiri, kemudian dikenal sebagai individu. Keluarga di Kawasan Bosowasi telah berperan membina dan membimbing anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana mereka berada. Semua anggotanya dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal, sehingga kehidupan masyarakat di kawasan tersebut tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman dan tenteram. Jika demikian adanya, sadar atau tidak sadar dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya setiap anggota keluarga pasti memiliki peran dan fungsi yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi anak-anaknya. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, hal tersebut mensiratkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga perlu dijaga untuk proses regenerasi tersebut.

Dipandang dari aspek struktur sosial, sesungguhnya suatu lembaga sosial harus memiliki fungsi yang pasti dan jelas (Koentjaraningrat, 1988). Demikian pula keluarga di Kawasan

Bosowasi yang dijadikan sebagai unit analisis. Diantara fungsi keluarga tersebut yang dapat diungkapkan di sini, yaitu:

1.1. Fungsi reproduksi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa anak-anak adalah wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, suami istri bertanggungjawab dalam menjamin pangannya untuk keberlangsungan keturunannya.

1.2. Fungsi proteksi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa keluarga memberikan harus mampu memberikan perlindungan kepada anggotanya, berupa perlindungan fisik dan kejiwaan. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya untuk kebelangsungan hidup penghuninya.

1.3. Fungsi ekonomi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa ayah adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga. Ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya, Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, ayah berkewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan keluarganya dengan baik.

1.4. Fungsi sosialisasi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga adalah sosialisasi pertama bagi anak. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama orang lain. Anak diajak memahami lingkungan lebih luas sehingga nanti benar-benar siap hidup dalam masyarakat. Orang tua memperkenalkan anak tentang norma yang berlaku di masyarakat seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka sosialisasi ini, anak

diajarkan menjalankan kehidupan sesuai nilai dan norma di masyarakat. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, anak harus diajarkan norma dan nilai-nilai sosial untuk dijadikan sebagai prinsip utama dalam mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dalam keluarga.

1.5. Fungsi afeksi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa keluarga harus mampu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya tanpa membedakan. Karena itu, keluarga diharapkan memberikan kehangatan perasaan kepada anggota keluarga. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, keluarga diharapkan mampu menjaga ketahanan pangannya sebagai salah satu sarana dalam memberikan kehangatan perasaan kepada anggota keluarganya.

1.6. Fungsi pengawasan sosial

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa pada dasarnya setiap anggota keluarga saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, anggota keluarga yang lebih tua yang bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi anggotanya.

1.7. Fungsi pemberian status

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat melalui perkawinan, sebagai suami atau istri. Ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan dianggap mampu bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga, anak-anak dan masyarakat. Fungsi status suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pencari nafkah. Istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Keluarga memberikan status pada anak, bukan hanya status yang

diperoleh seperti status terkait jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan, tetapi termasuk status yang diperoleh orang tua, yaitu status dalam kelas sosial tertentu. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, pangan keluarga yang terjamin dengan baik dapat menguatkan bahkan meningkatkan status kelas sosialnya dalam masyarakat.

Selain menggunakan aspek struktur sosial dalam memaknai peran dan fungsi rumah tangga di Kawasan Bosowasi dalam menguatkan ketahanan pangannya, dapat juga digunakan aspek perubahan sosial dalam memaknainya. Dalam konteks perubahan sosial, masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan terdekat harus bisa memberikan nilai-nilai sesuai harapan masyarakat kepada anak-anak. Peter Ludwig Berger menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Keluarga juga berperan sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai di masyarakat kepada anak-anaknya, karena tidak semua nilai-nilai dalam masyarakat itu baik. Dalam proses sosialisasi kepada anak, kegiatan dalam keluarga dan peran tiap anggota keluarga pada dewasa ini, telah bergeser jika dibandingkan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, hubungan antara anak dan orang tua dalam rumah tangga di Kawasan Bosowasi lebih terlihat jelas. Karena usia dan peran yang sangat berbeda, anak harus hormat kepada orang tua. Anak harus membantu pekerjaan rumah tangga orang tua. Keluarga di Kawasan Bosowasi pada zaman dahulu, anak usia dengan 10-15 tahun sudah diberikan tanggung jawab besar untuk membantu orang tuanya. Sekarang pada usia tersebut, anak dituntut mandiri dengan cara lain. Misalnya mandiri dalam kegiatan sekolah dan menyelesaikan masalah pribadi. Peran ibu dan ayah dalam keluarga sekarang tidak sama dengan dahulu. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial, sekarang perubahan itu terjadi pada peran ayah dan ibu. Dulu ibu bekerja di dapur, sekarang ibu juga bisa bekerja. Ibu

lebih bebas bekerja di luar seperti ayah, dan ayah bergantian mengurus keperluan rumah tangga seperti ibu. Bagi beberapa keluarga di Kawasan Bosowasi, hal tersebut dapat memberikan interaksi lebih positif dan berdampak kepada ketahanan pangan keluarga yang lebih kuat dan lebih terjamin.

2. Penguatan Ketahanan Pangan

Dalam memaknai penguatan ketahanan pangan yang dilakukan rumah tangga di Kawasan Bosowasi digunakan teori konstruksi sosial yang digagas oleh Berger dan Luckmann (1966). Berger dan Luckmann berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat yang telah membangun masyarakat, maka pengalaman individu itu tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat. Manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis secara simultan, yaitu: Eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Pemaknaannya dapat disajikan seperti di bawah ini:

2.1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia. Dalam konteks penguatan ketahanan pangan, rumah tangga di Kawasan Bosowasi berusaha untuk mencurahkan dirinya melalui prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokokkong ke dalam dunia untuk memenuhi kebutuhan pangannya baik dilakukan secara individu maupun secara kolektif dalam rangka untuk menguatkan eksistensi keluarga dalam masyarakat. Jika demikian adanya, maka dapat dinyatakan bahwa penguatan ketahanan pangan rumah tangga merupakan produk rumah tangga itu sendiri, namun demikian untuk mewujudkannya ke dalam dunia riil dapat dilakukan secara mandiri jika kondisi

pangannya sudah berada pada level kemandirian pangan dan juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain jika kondisinya belum berada pada level kemandirian pangan. Hal ini mensiratkan bahwa ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan yang baik bagi rumah tangga pada dasarnya diciptakan oleh rumah tangga itu sendiri, sedangkan pihak luar hanya bisa memberikan dukungan baik secara fisik maupun secara mental dalam membantu untuk menguatkan ketahanan pangan mereka.

2.2. Objektivasi

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai (baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia), berupa realitas objektif yang mungkin akan menghadapi penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Dalam konteks penguatan ketahanan, sebagian rumah tangga di Kawasan Bosowasi telah menjadikan ketahanan pangannya sebagai sebuah institusi dalam hidupnya, yakni bagian dalam hidupnya yang harus diorganisir dengan baik, akan tetapi sebagian yang lain belum melakukannya. Bagi rumah tangga yang sudah melakukannya, prinsip *Sipakatau'*, *Sipakainge*, dan *Sipatokokkong* digunakan sebagai pondasi utama dalam membangun institusi ketahanan pangan. Hal ini mensiratkan bahwa pada tahap ini, bagi rumah tangga yang memiliki institusi ketahanan pangan keluarga dapat mengorganisir ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangannya dengan baik sehingga kebutuhan pangan mereka selalu cukup bahkan lebih dari cukup terpenuhi.

2.3. Internalisasi

Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat. Dalam konteks penguatan ketahanan pangan, bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi yang sudah melembagakan ketahanan pangannya, kegiatan penguatan ketahanan pangan bagi mereka telah menjadi bagi dari hidupnya. Jika demikian adanya, hal ini dapat memberikan dampak yang baik kepada kehidupan mereka dalam dunia riil, misalnya kesejahteraan ekonominya akan semakin meningkat dan lain-lain sebagainya. Hal ini mensiratkan bahwa jika prinsip *Sipakatau'*, *Sipakainge*, dan *Sipatokokkong* dijadikan sebagai pondasi utama mengorganisir ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

3. Kolektif dan Individu

Dalam memaknai penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi yang dilakukan secara kolektif dan juga secara individu digunakan teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang digunakan adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis adalah teori yang menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Masyarakat memiliki sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sistem tersebut bergerak untuk mewujudkan tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Mengutip pandangan Person, Schae (2012) mengemukakan bahwa jika melihat masyarakat, maka harus dilihat dalam keadaan keseimbangan secara alami. Ia memberikan pengertian teori fungsionalis bahwa masyarakat cenderung menuju kondisi stabil atau mencapai keseimbangan. Ketika terjadi perubahan

dalam salah satu unsur masyarakat, harus dilakukan penyesuaian pada unsur lain. Jika tidak, keseimbangan masyarakat akan terancam dan tekanan akan terjadi.

Menurut teori fungsionalis, lembaga sosial yang ada dalam suatu kehidupan manusia tidak akan bertahan, kecuali berguna bagi masyarakat. Meskipun demikian, lembaga sosial yang secara drastis berubah akan mengancam segala bentuk keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks penguatan ketahanan pangan, rumah tangga di Kawasan Bosowasi diwajibkan memiliki ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Rumah tangga di kawasan tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Oleh karena itu, ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dikatakan stabil jika kondisi pangannya sudah terpenuhi, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Akan tetapi untuk memperkuat pencapaian ketahanan pangan, rumah tangga di Kawasan Bosowasi tidak cukup hanya dengan melakukan hal tersebut, melainkan mereka harus melakukan perubahan sosial secara fungsional dalam menguatkan ketahanan pangan keluarganya, baik dilakukan secara kolektif maupun secara individu. Jika dilakukan secara kolektif, rumah tangga belum bisa secara mandiri mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan bagi penghuninya karena masih membutuhkan bantuan pihak lain. Namun jika sudah dilakukan secara individu, rumah tangga diasumsikan dapat mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan bagi penghuninya secara mandiri.

Perubahan sosial yang dimaksud di atas adalah penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dengan mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan secara mandiri. Dikatakan secara mandiri, jika kedaulatan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi memiliki hak untuk menentukan kebijakannya sendiri, yang menjamin hak atas pangan bagi penghuninya. Juga dapat dikatakan secara mandiri, jika kemandirian pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dilakukan rumah tangga dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Demikian pula dapat dikatakan secara mandiri, jika keamanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi berada dalam kondisi aman (berada pada level keamanan pangan), yakni tidak tercemar secara biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatannya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

4. Kesejahteraan Hidup

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika prinsip *Sipakatau'*, *Sipakainge*, dan *Sipatokokkong* dijadikan sebagai pondasi utama mengorganisir ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dalam memaknai hal ini digunakan konsep *falah* dalam Islam. *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih di tekankan pada aspek spiritual. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan

berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, malah mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi, yakni bebas dari segala kebodohan (Misanam, 2014: 4-5).

Dalam konteks rumah tangga di Kawasan Bosowasi yang mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangan, dapat dijelaskan bahwa rumah tangga yang mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangannya, memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Aktivitas duniawi yang dilakukannya diberi nilai religius sehingga ada energi besar yang diarahkan untuk melakukan hal-hal tersebut karena diberi sentuhan ukhrawi. Bagi rumah tangga muslim di Kawasan Bosowasi, kebahagiaan akhirat adalah tujuan utama dalam menjalani hidup di dunia. Dengan demikian, energi yang dikerahkan untuk mencapai hal tersebut akan berlipat ganda. Dari situ, mereka akan mampu memberi kontribusi yang lebih besar kepada umat manusia utamanya pada aspek perwujudan penguatan ketahanan pangan rumah tangga.

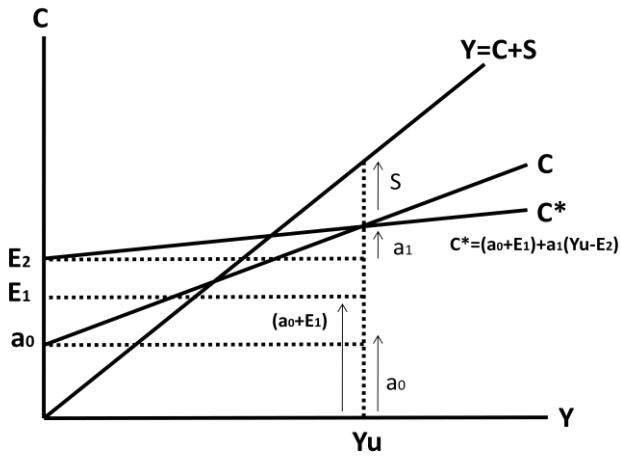
Kesejahteraan hidup rumah tangga di Kawasan Bosowasi, yang telah mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangannya dengan prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokkong, dapat dijabarkan dalam bentuk kurva seperti yang disajikan pada gambar 7.2.3 .

Pada gambar 7.2.3 ditunjukkan beberapa simbol, yaitu: C (konsumsi rumah tangga), Y (pendapatan rumah tangga), C* (tingkat konsumsi rumah tangga di Kawasan Bosowasi), Yu (pendapatan disposabel rumah tangga di Kawasan Bosowasi), a0 (komsusi fisik), E1 (konsumsi ibadah), a0 + E1 (konsumsi dasar), E2 (kebijakan), a1

(konsumsi marginal), dan S (tabungan rumah tangga), $Y=C+S$ (alokasi pendapatan dalam bentuk konsumsi dan tabungan), $C^*=(a_0+E_1)+a_1(Y_u-E_2)$ (persamaan konsumsi berbasis falah bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi). Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa konsumsi dasar secara riil yang terjadi pada rumah tangga di Kawasan Bosowasi yang telah mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangannya dengan prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokkong, terdiri dari dua, yaitu: Konsumsi fisik dan konsumsi ibadah. Konsumsi ini telah menjadi orientasi hidup mereka, yakni dunia dan akhirat. Selain dari itu, rumah tangga tersebut juga memiliki konsumsi marginal, yakni konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan disposabel mereka. Pendapatan disposabel yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang dialokasi oleh mereka khusus untuk konsumsi marjinal (konsumsi tambahan terhadap konsumsi dasar). Akan tetapi, sebelum mereka membelanjakannya untuk konsumsi marjinal, perlakuan kebajikan (perlakuan ZIS) atas pendapatan disposabel tersebut juga dijadikan prioritas utama dalam hidup mereka dengan tujuan untuk menstabilkan MPC (kecenderungan konsumsi) saudara-saudara mereka yang kurang mampu. Sedangkan untuk berjaga-jaga di masa akan datang, sebagian pendapatan utama mereka disimpan dalam bentuk tabungan.

Dari penjelasan tersebut di atas, ternyata rumah tangga di Kawasan Bosowasi, yang telah mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangannya dengan prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokkong memiliki kehidupan falah, seperti yang disajikan pada gambar 7.2.3

Gambar 7.2.3
 Kurva Kesejahteraan Hidup Rumah Tangga



REFERENSI

- Abdullah, F. dkk. (2014). *Islam dan Budaya Jawa*, Surakarta: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta.
- Abdullah, I., dkk. (2008), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Ed.Rev.,Cet.2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abercrombie, N., dkk. (2011). *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ajzen, I. (1985). *From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior*, Dalam J. Kuhl & J. Beckman, Eds., *Action-control: From Cognition to Behavior*, Springer, Heidelberg
- Ajzen, I. (1991). "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50.
- Ajzen, I. (2001). "Perceived Behavioral Control, Self-efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior", *Journal of Applied Social Psychology*, 32.4.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*, 2nd Edition, McGraw-Hill Professional Publishing, Berkshire, GBR.
- Ajzen, I., & Fishbein, M., (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley, Reading, MA.
- Ajzen, I., & Fishbein, M., (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
- Anderson, M. D., & Cook, J. T. (1999). "Community food security: Practice in need of theory?", *Agriculture and human values*, 16 (2), 141-150.
- Arikunto, S. (2003). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: LP3ES.
- Bantacut, T. (2013). "Pembangunan ketahanan ekonomi dan pangan perdesaan mandiri berbasis nilai tambah (Rural Economic and Food Security Development Based on Added Value Formation):", *Jurnal Pangan*, 22 (2), 181-196.
- Bappenas, "Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)", *Dokumen Internal*, Bappenas, Tahun 2019.

- Berger, P. L. and Luckmann, T. (1966) *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Anchor Books.
- Blau, P. M. (1977). "A Macrosociological Theory of Social Structure." *American Journal of Sociology*, 83.1.
- BPS Kabupaten Bone. (2020). *Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Bone.
- BPS Kabupaten Sinjai. (2020). *Kabupaten Sinjai dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Sinjai.
- BPS Kabupaten Soppeng. (2020) *Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Soppeng.
- BPS Kabupaten Wajo. (2020). *Kabupaten Wajo dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Wajo.
- Brown, R. and Reginald, A. (1940). "On Social Structure." *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 70.1.
- Budiyanto, M. A. K. (2012). "Model pengembangan ketahanan pangan berbasis pisang melalui revitalisasi nilai kearifan lokal", *Jurnal Teknik Industri*, 11 (2), 170-177.
- Cohen, Bruce J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Terj., Jakarta: Rineka Cipta.
- dan Bisnis Universitas Udayana*, 4 (2015).
- Darwanto, D. H. (2005). "Ketahanan pangan berbasis produksi dan kesejahteraan petani", *Ilmu Pertanian*, 12 (2), 152-164.
- Dokumen Internal Pemda Kabupaten Bone tentang Sejarah Kabupaten Bone (2020).
- Dokumen Internal Pemda Kabupaten Sinjai tentang Sejarah Kabupaten Sinjai (2020).
- Dokumen Internal Pemda Kabupaten Soppeng tentang Sejarah Kabupaten Soppeng (2020).
- Dokumen Internal Pemda Kabupaten Wajo tentang Sejarah Kabupaten Wajo (2020).
- Ecker and Breisinger, (2012). "The Food Security System" Washington: International Food Policy Research Institute, 1–14.
- Eshleman, J. R., and Cashion, B. G. (1985). *Sociology an Introduction*. Toronto: Little Brown & Company.

- Esti, I. (2012). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- FAO (1997). "The food system and factors affecting household food security and nutrition". *Agriculture, food and nutrition for Africa: a resource book for teachers of agriculture*, Rome: Agriculture and Consumer Protection Department. Diakses tanggal 06 Agustus 2019.
- Geertz, C. (1973) *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Book.
- Gottlieb, R., & Fisher, A. (1996). "Community food security and environmental justice: Searching for a common discourse", *Agriculture and human values*, 13 (3), 23-32.
- Gregory, P. J.; Ingram, J. S. I.; Brklacich, M., (2005). "Climate change and food security". *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 360 (1463): 2139–2148.
- Hardono, G. S. (2016). "Strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal", *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12 (1), 1-17.
- Haris, R. (2018) "Dinamika Kelompok Sosial Budaya di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19.2.
- Hariyadi, P. (2010). "Penguatan Industri Penghasil Nilai Tambah Berbasis Potensi Lokal peranan Teknologi Pangan untuk Kemandirian Pangan", *Pangan*, Vol. 19 No. 4 Desember 2010: 295-301, 19 (4), 295-301.
- Henslin, J. M. (2006). *Sosiologi dengan Pendekatan Mebumi*, Edisi 6, Terj., Jakarta: Erlangga.
- Hidayah, N. (2011). "Kesiapan psikologis masyarakat pedesaan dan perkotaan menghadapi diversifikasi pangan pokok", *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*, 8 (1), 88-104.
- Hoddinott, J. (1999). "Operationalizing household food security in development projects: an introduction" *Technical guide*, 1, 1-19.
- Horton, P. B., dan Chester L H.(1987). *Sosiologi*. Jilid I. terj. Aminudin Ram & Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
- Japan Times, (2011). "Food self-sufficiency rate fell below 40% in 2010" , *Japan Times*, Aug. 12, 2011.

- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj., Jilid 1 –2. Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.
- Kamanto, S. (2000). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: LPE-UI.
- Koentjaraningrat. (1988). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Kornblum, W. (2000). *Sociology in a Changing World*. Florida: Harcourt College Publisher.
- Landis, J. R. (1986). *Sociology, Concepts and Characteristics*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Loomis, C. P. (1867). "In Praise of Conflict and its Resolution." *The American Sociological Review*, 32.6.
- Mahbubi, A. (2013). "Model Dinamis Supply Chain Beras Berkelanjutan dalam Upaya Ketahanan Pangan Nasional", *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 10 (2), 81-89.
- Maxwell, S. (1990). "Food Security in Developing Countries: Issues and Options for the 1990s 1", *IDS bulletin*, 21 (3), 2-13.
- McMichael, P., & Schneider, M. (2011). "Food security politics and the Millennium Development Goals", *Third World Quarterly*, 32 (1), 119-139.
- Michael, H., and Andreas, M. K. (2004). *A Beginner's Guide to Partial Least Square Analysis*, Lawrence Erlbaum Association, Inc.
- Muksin, S. M., dkk. (2018). "Pola Adaptasi Sosial Ekonomi Suku Bugis sebagai Pendatang di Desa Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan." *Jurnal Neo Societal*, 3.1.
- Mungim, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mustari, A. (2016). "Perempuan dalam Struktur Sosial dan Kultur Hukum Bugis Makassar." *Al-'Adl*, 9.1.
- Nasution, S. (2000) *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumu Aksara.
- Ogburn, W. F. (1922). *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. New York: B. W. Huebsch.
- Parsons, T. (1939). "The Professions and Social Structure." *Social Forces*, 17.4.

- Pothukuchi, K. (2004). "Community food assessment: A first step in planning for community food security", *Journal of Planning Education and Research*, 23 (4), 356-377.
- Prastowo, A. (2008) *Menguasai Teknik-teknik Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press.
- Prawoto, N. (2012). "Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8 (2), 135-154.
- Purwaningsih, Y. (2008). "Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat" *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 9 (1), 1-27.
- Purwantini, T. B. (2016). "Potensi dan prospek pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan", In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 30, No. 1, pp. 13-30.
- Robert. H. (1993). *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Rogers, A., Ferguson, M., Ritchie, J., Van Den Boogaard, C., & Brimblecombe, J. (2016). "Strengthening food systems with remote Indigenous Australians: stakeholders' perspectives", *Health promotion international*, 33 (1), 38-48.
- Sanderson. (2000). *Sosiologi Macro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sihabudin, A. (2011). *Komunikasi Antarbudaya: Suatu Perspektif Multidimensi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Simatupang, P. (2016). "Analisis kritis terhadap paradigma dan kerangka dasar kebijakan ketahanan pangan nasional". In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 25, No. 1, pp. 1-18.
- Sjafari, A., dkk. (Editor). (2011). *Perubahan Sosial (Sebuah Bunga Rampai)*, Banten: FISIP UNITIRTA.
- Smelser, N. J. (1981). *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Soekanto, S. (1982). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali.

- Soekanto, S. (1998). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemardjan, S. S. (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbitan UI.
- Soerjanto, P. (1989). *Strategi Kebudayaan Suatu Pengantar Filosofis*, Jakarta: Gramedia.
- Subagio, A. (2008). "Modified Cassava Flour (Mocal): Sebuah Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Potensi Lokal", *Jurnal Pangan*, 17 (1), 92-103.
- Sudibyo, L. (2013). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sugiyono. (2009). *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Empat Belas, Bandung: Alfa Betha.
- Sulasman, G. S. (2013). *Teori-teori Kebudayaan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Cet. ke 1, Yogyakarta: UII Press.
- Supartiningsih. (2010). "Konsep Ajoareng-Joa' dalam Tatanan Sosial Masyarakat Bugis (Perspektif Filsafat Sosial)." *Jurnal Filsafat*, 20. 3.
- Suryana, A. (2014). "Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: tantangan dan penanganannya", *In Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 32, No. 2, pp. 123-135.
- Suwardi, E. (2012). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Swastika, D. K. S. (2011). "Membangun kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mengentaskan petani dari kemiskinan", *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 4 (2), 103-117.
- Syani, A. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Tweeten, Luther. (1999). "The Economics of Global Food Security", *Review of Agricultural Economics*, 21 (2): 473-488.
- United Nations (UN). (1999). "The right to adequate food", *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*, Geneva: United Nations.
- Vincenzo, et,.al. (2010). *Handbook of Partial Least Square*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

- Vos, R. (2015). "Thought for food: Strengthening global governance of food security", *Global Governance and Rules for the Post-2015 Era: Addressing Emerging Issues in the Global Environment*, 1-12.
- Warsito. (2012). "Antropologi Budaya". Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- Werner, E. (1989). "Cooperating Agents: A Unified Theory of Communication and Social Structure." *Distributed Artificial Intelligence*. Morgan Kaufmann.
- YP, N. M. S. (2008). "Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah tangga Pedesaan Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul", *Economic Journal Of Emerging Markets*, 13 (1).

TENTANG PENULIS



Syaparuddin, Jenis Kelamin: Laki-laki, NIDM: 202012680, Dosen Tetap (PNS) pada Prodi Ekonomi Syariah (S2) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan Program Sarjana S1 (Muamalah) di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Program Magister (S2 Keuangan dan Perbankan Syariah) dan Program Doktor (S3 Ekonomi Islam) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain mengajar dan menulis buku dan artikel jurnal (**ID Scopus: 57203352312** dan **ID Sinta: 6665992**), juga aktif dalam berbagai pertemuan dan kegiatan ilmiah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam (lokal, nasional dan internasional), penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam, dan juga aktif di berbagai kegiatan organisasi profesi, kemasyarakatan, dan keagamaan.



Andi Nuzul, Jenis Kelamin: Laki-laki, NIDM: 2031126309, Guru Besar (Profesor) Ilmu Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara (S2) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan Program Sarjana S1 (Hukum Islam) di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang, Program Sarjana S1 (Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum UMI Ujung Pandang, Program Magister (S2 Ilmu Hukum) di

Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, dan Program Doktor (S3 Ilmu Hukum) pada Pascasarjana Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Selain mengajar dan menulis buku dan artikel jurnal, juga aktif dalam berbagai pertemuan dan kegiatan ilmiah dalam bidang hukum (lokal, nasional dan internasional) baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Selain itu, juga aktif dalam penelitian ilmiah bidang hukum, serta aktif di berbagai kegiatan organisasi profesi, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Korespondensi:

Email : safarb135@gmail.com

No. WA : 082344936164

Face Book : Syaparuddin Razak

Instagram : @safarrazak

ISLAM & KETAHANAN PANGAN

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dan hasilnya menunjukkan bahwa (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat ternyata dapat dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi, (2) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga yang berorientasi kepada realitas kehidupan sosial keagamaan ternyata lebih mudah dilakukan di Kawasan Bosowasi, dan (3) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi ternyata lebih mudah dikembangkan jika dilakukan secara sosial keagamaan baik melalui mediasi norma subjektif maupun tanpa mediasinya.

Dari ketiga pernyataan ini, dapat dirumuskan dua model penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi, yaitu: Model penguatan kolektif dan model penguatan individu. Model penguatan kolektif adalah model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dengan prinsip Sipakatau, Sipakainge, dan Sipatokkong, yang dilakukan oleh rumah tangga dan pihak lain (teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah) secara kolektif dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga yang bersangkutan karena kondisi ketahanan pangannya belum berada pada level kemandirian pangan. Sedangkan model penguatan Individu adalah model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dengan prinsip Sipakatau, Sipakainge, dan Sipatokkong, yang dilakukan oleh rumah tangga secara individu dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangganya karena kondisi ketahanan pangannya sudah berada pada level kemandirian pangan sehingga dapat dilakukannya secara mandiri.